



RPJMD KAB. BLITAR 2016- 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG**

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016 - 2021



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

Dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Blitar.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Blitar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Blitar untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh perangkat daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021.

BAB III

SISTIMATIKA

Pasal 3

Sistimatika penulisan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
BABII	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BABIV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BABV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BABVI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BABVII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati Blitar melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bupati Blitar melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RKPD setiap tahun pada periode masa jabatan Bupati Blitar.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan, apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional; dan/atau
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau pemekaran daerah.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, maka perubahan tersebut akan

dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 AGUSTUS 2016

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
Asisten Pemerintahan dan Kesra

U.b.

Kepala Bagian Hukum

HARIS SUSIANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 202-4/2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR GAMBAR		xx
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	I- 1
1.2	DASAR HUKUM	I- 2
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I- 5
1.3.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	I- 5
1.3.2	Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kabupaten Blitar	I- 5
1.3.3	Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RTRW Kabupaten Blitar	I- 6
1.3.4	Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan KLHS	I- 8
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	I- 8
1.5	MAKSUD DAN TUJUAN	I- 9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II- 1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II- 1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II- 1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II- 4
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II- 7
2.1.4	Demografi	II- 9
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-14
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
	a. Pertumbuhan PDRB	II-14
	b. Laju Inflasi	II-21
	c. PDRB Per Kapita	II-22
	d. Indeks Gini	II-23
	e. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	II-24
	f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-25
	g. Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-26
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-26
	1) Pendidikan	II-26
	a. Angka Melek Huruf	II-26



	b.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-27
	c.	Angka Partisipasi Kasar	II-28
	d.	Angka Partisipasi Murni	II-29
	2)	Kesehatan	II-30
	a.	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran	II-30
	b.	Angka Harapan Hidup	II-31
	c.	Persentase Balita Gizi Buruk	II-32
2.2.3		Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-33
	1)	Kebudayaan	II-33
	a.	Jumlah Grup Kesenian	II-33
	b.	Jumlah Gedung Kesenian	II-34
	2)	Pemuda dan Olahraga	II-34
	a.	Jumlah Klub Olahraga	II-34
	b.	Jumlah Sarana/Gedung Olahraga	II-34
2.3		ASPEK PELAYANAN UMUM	II-35
2.3.1		Fokus Layanan Urusan Wajib	II-35
	1)	Pendidikan	II-35
	a.	Pendidikan Dasar	II-35
	a.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-35
	a.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	II-36
	a.3	Rasio Guru/Murid	II-36
	b.	Pendidikan Menengah	II-37
	b.1	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	II-37
	b.2	Rasio Guru terhadap Murid	II-37
	b.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-38
	c.	Fasilitas Pendidikan	II-39
	c.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	II-39
	c.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	II-39
	d.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	II-39
	e.	Angka Putus Sekolah	II-40
	f.	Angka Kelulusan	II-40
	g.	Angka Melanjutkan (AM) Sekolah	II-41
	h.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-42
	2)	Kesehatan	II-42
	a.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	II-42
	b.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustus Per Satuan Penduduk	II-43



c.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	II-44
d.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	II-44
e.	Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk	II-45
f.	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	II-45
g.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-45
h.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	II-46
i.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	II-47
j.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-47
k.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	II-47
l.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	II-48
m.	Cakupan Kunjungan Bayi	II-49
n.	Cakupan Puskesmas	II-49
o.	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)	II-49
3)	Pekerjaan Umum	II-49
a.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	II-49
b.	Jaringan Irigasi	II-50
c.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	II-50
d.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	II-51
e.	Rumah Tidak Layak Huni	II-51
f.	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat	II-51
g.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	II-52
h.	Drainase dalam Kondisi Baik	II-52
4)	Perumahan	II-53
a.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-53
b.	Rumah Tangga Bersanitasi	II-53
c.	Rumah Tidak Layak Huni	II-54
5)	Perencanaan Pembangunan	II-54
a.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda	II-54



b.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada	II-55
6)	Perhubungan	II-55
a.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	II-55
b.	Rasio Ijin Trayek	II-56
c.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	II-56
d.	Jumlah Terminal	II-56
e.	Jumlah Angkutan Darat	II-56
f.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	II-57
g.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	II-57
h.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	II-57
i.	Pemasangan Rambu-rambu	II-57
7)	Lingkungan Hidup	II-58
a.	Persentase Penanganan Sampah	II-58
b.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	II-58
c.	Persentase Status Mutu Air	II-59
d.	Penegakan Hukum Lingkungan	II-59
e.	Indeks Kualitas Air	II-59
f.	Indeks Kualitas Udara	II-59
g.	Indeks Tutupan Lahan	II-60
8)	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-60
a.	Persentase Kepemilikan KTP	II-60
b.	Kepemilikan Akta Kelahiran	II-61
c.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-61
9)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-61
a.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-61
b.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-62
c.	Rasio KDRT	II-62



d.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-62
e.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	II-63
10)	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-63
a.	Peserta KB Aktif	II-63
b.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	II-64
c.	Rasio Akseptor KB	II-64
d.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-64
11)	Sosial	II-65
a.	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	II-65
b.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-65
c.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-65
12)	Ketenagakerjaan	II-66
a.	Jumlah Angkatan Kerja	II-66
b.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-67
c.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	II-68
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-68
13)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-69
a.	Persentase Koperasi Aktif	II-69
b.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	II-69
c.	Usaha Mikro dan Kecil	II-69
14)	Penanaman Modal	II-70
a.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-70
b.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-70
15)	Kebudayaan	II-71
a.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-71



b.	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-71
c.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	II-71
16)	Kepemudaan dan Olahraga	II-72
a.	Jumlah Organisasi Pemuda	II-72
b.	Jumlah Organisasi Olahraga	II-72
c.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	II-72
d.	Jumlah Kegiatan Olahraga	II-73
e.	Lapangan Olahraga	II-73
17)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-73
a.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	II-73
b.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	II-73
18)	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-74
a.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	II-74
b.	Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	II-74
c.	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	II-75
d.	Pertumbuhan Ekonomi	II-75
e.	Kemiskinan	II-76
f.	Penegakkan Perda	II-78
g.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	II-78
h.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Blitar	II-78
i.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar	II-79
j.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	II-79
k.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	II-79
l.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	II-80
19)	Ketahanan Pangan	II-80



a.	Ketersediaan Bahan Pangan	II-80
b.	Ketersediaan Pangan Utama	II-80
20)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-81
a.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-81
b.	Posyandu	II-82
21)	Statistik	II-82
a.	Buku "Blitar dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Blitar"	II-82
22)	Kearsipan	II-82
a.	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	II-82
23)	Komunikasi dan Informatika	II-83
a.	Jumlah Jaringan Komunikasi	II-83
b.	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk	II-83
c.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	II-83
d.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	II-83
e.	Website Milik Pemerintah Daerah	II-84
f.	Pameran atau Expo	II-84
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-84
1)	Pertanian	II-85
a.	Produksi Padi	II-85
b.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	II-85
2)	Kehutanan	II-87
a.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	II-87
b.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	II-88
3)	Pariwisata	II-89
a.	Kunjungan Wisata	II-89
4)	Kelautan dan Perikanan	II-90
a.	Produksi Perikanan	II-90
b.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	II-93
c.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	II-93
5)	Perdagangan	II-93



	a.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	II-93
6)		Perindustrian	II-94
	a.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II-94
7)		Ketransmigrasian	II-95
	a.	Transmigran yang diberangkatkan	
2.4		ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-95
2.4.1		Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-95
1)		Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-95
	a.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-95
	b.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita	II-96
2)		Pertanian	II-96
	a.	Nilai Tukar Petani	II-96
2.4.2		Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-97
1)		Perhubungan	II-97
	a.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-97
	b.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	II-97
	c.	Jumlah Orang/Barang melalui Terminal	II-98
2)		Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-98
	a.	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran	II-98
	b.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	II-98
3)		Lingkungan Hidup	II-99
	a.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-99
4)		Komunikasi dan Informatika	II-99
	a.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	II-99
2.4.3		Fokus Iklim Investasi	II-100
1)		Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-100



	a.	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-100
	b.	Jumlah Demo	II-100
	c.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	II-101
	d.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	II-101
2.4.4		Fokus Sumber Daya Manusia	II-101
	1)	Ketenagakerjaan	II-101
	a.	Rasio Ketergantungan	II-101
BAB III		GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III- 1
3.1		KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III- 4
3.1.1		Kinerja Pelaksanaan APBD	III- 4
	a.	Pendapatan Daerah	III- 5
	1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III- 6
	2.	Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	III- 7
	b.	Belanja Daerah	III- 8
	c.	Pembiayaan	III- 9
3.1.2		Neraca Daerah	III-10
3.2		KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-14
3.2.1		Proporsi Penggunaan Anggaran	III-17
3.2.2		Analisis Pembiayaan	III-19
3.3		KERANGKA PENDANAAN	III-22
3.3.1		Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-22
3.3.2		Proyeksi Data Masa Lalu	III-23
3.3.3		Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-25
	1.	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-25
	2.	Proyeksi SILPA	III- 34
	3.	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat	III- 35
	4.	Kebijakan Alokasi Anggaran	III- 36
BAB IV		ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV- 1
4.1		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV- 1
4.1.1		Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial	IV- 1
4.1.2		Sumber Daya Manusia	IV- 4
4.1.3		Perekonomian dan Daya Saing	IV- 7
4.1.4		Infrastruktur	IV- 9



4.1.5	Tata Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	IV- 9
4.1.6	Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban Daerah	IV- 10
4.2	ISU-ISU STRATEGIS	IV-12
4.2.1	Dinamika Internasional	IV-12
a.	Masyarakat Ekonomi ASEAN (<i>Asean Economic Community</i>)	IV-12
b.	<i>Millenium Development Goals</i> (MDG's) dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	IV-12
4.2.2	Dinamika Nasional	IV-14
a.	RPJMN 2015-2019	IV-14
b.	Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	IV-15
1	Kesehatan dan Gizi Masyarakat	IV-15
2	Pendidikan	IV-16
3	Kebudayaan	IV-17
4	Agama	IV-18
5	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IV-19
c.	Pembangunan Ekonomi	IV-19
1	Stabilitas Moneter	IV-19
2	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	IV-21
3	Peningkatan Pariwisata	IV-22
d.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IV-22
1	Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim	IV-22
2	Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang	IV-23
3	Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat	IV-24
4.2.3	Dinamika Regional (Provinsi)	IV-24
a.	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019	IV-24
b.	Isu/Kondisi Terkini di Jawa Timur	IV-28
1	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	IV-28
2	Infrastruktur	IV-30
3	Lingkungan Hidup	IV-30
4.2.4	Telaahan RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah	IV-40
4.2.5	Dinamika Lokal	IV-41
a.	Telaahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Blitar	IV-41
b.	Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Blitar	IV-43
c.	Telaahan KLHS	III-56
4.2.6	Isu Strategis Kabupaten Blitar 2016-2021	IV-68
a.	Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi	IV-68
b.	Ketersediaan infrastruktur yang memadai	IV-69



	c.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan	IV-69
	d.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	IV-69
		1 Pendidikan	IV-70
		2 Kesehatan	IV-71
		3 Ekonomi	IV-71
	e.	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	IV-72
	f.	Pengembangan Potensi Pariwisata	IV-73
	g.	Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah	IV-74
	h.	Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa	IV-75
BAB V		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
	5.1	VISI	V- 1
	5.2	MISI	V- 2
	5.3	TUJUAN DAN SASARAN	V- 3
BAB VI		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI- 1
	6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI- 1
	6.2	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN	VI- 9
		6.2.1 Arah Kebijakan Tahun 2017	VI- 9
		6.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2018	VI-10
		6.2.3 Arah Kebijakan Tahun 2019	VI-11
		6.2.4 Arah Kebijakan Tahun 2020	VI-12
		6.2.5 Arah Kebijakan Tahun 2021	VI-12
BAB VII		KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII- 1
BAB VIII		INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII- 1
BAB IX		INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X		PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X- 1
	10.1	PEDOMAN TRANSISI	X- 1
	10.2	KAIDAH PELAKSANAAN	X- 1
	10.3	PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	X- 2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II- 5
Tabel 2.2	Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015	II- 6
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	II- 10
Tabel 2.4	Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar ADHK 2010 Tahun 2011-2015 (%)	II-16
Tabel 2.5	PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)	II-18
Tabel 2.6	PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)	II-19
Tabel 2.7	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2015	II-20
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Blitar	II-25
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015	II-26
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-28
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-29
Tabel 2.12	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-32
Tabel 2.13	Jumlah Gedung Olahraga (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-35
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-36
Tabel 2.15	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-36
Tabel 2.16	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-37
Tabel 2.17	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-37
Tabel 2.18	Rasio Guru/Murid (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-38
Tabel 2.19	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Blitar	II-38



Tahun 2012-2015

Tabel	2.20	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-39
Tabel	2.21	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-39
Tabel	2.22	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-40
Tabel	2.23	Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-40
Tabel	2.24	Angka Kelulusan (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-41
Tabel	2.25	Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-41
Tabel	2.26	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-42
Tabel	2.27	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-43
Tabel	2.28	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-43
Tabel	2.29	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-44
Tabel	2.30	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-44
Tabel	2.31	Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-45
Tabel	2.32	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-45
Tabel	2.33	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-46
Tabel	2.34	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-46
Tabel	2.35	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-47
Tabel	2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-48
Tabel	2.37	Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-49
Tabel	2.38	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-50
Tabel	2.39	Jaringan Irigasi (Km) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-50



Tabel	2.40	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar	II-51
Tabel	2.41	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (Km) Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar	II-52
Tabel	2.42	Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-52
Tabel	2.43	Drainase Dalam Keadaan Baik (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-52
Tabel	2.44	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-53
Tabel	2.45	Rumah Tangga Bersanitasi (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-54
Tabel	2.46	Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-55
Tabel	2.47	Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-55
Tabel	2.48	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-55
Tabel	2.49	Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-56
Tabel	2.50	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-56
Tabel	2.51	Jumlah Terminal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-56
Tabel	2.52	Jumlah Angkutan Darat Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-56
Tabel	2.53	Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-57
Tabel	2.54	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-57
Tabel	2.55	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-57
Tabel	2.56	Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-58
Tabel	2.57	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-58
Tabel	2.58	Pencemaran Status Mutu Air (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015	II-59
Tabel	2.59	Penegakan Hukum Lingkungan (Tindakan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-59
Tabel	2.60	Indeks Kualitas Air Kabupaten Blitar Tahun 2015	II-59
Tabel	2.61	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar Tahun 2015	II-60
Tabel	2.62	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar Tahun 2015	II-60
Tabel	2.63	Kepemilikan KTP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-60



Tabel	2.64	Kepemilikan Akta Kelahiran Yang Diselesaikan 1 Tahun Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-61
Tabel	2.65	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-61
Tabel	2.66	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015	II-61
Tabel	2.67	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015	II-62
Tabel	2.68	Persentase KDRT Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-62
Tabel	2.69	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-63
Tabel	2.70	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-63
Tabel	2.71	Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-64
Tabel	2.72	Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-64
Tabel	2.73	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-64
Tabel	2.74	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2012-2015 Kabupaten Blitar	II-65
Tabel	2.75	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015	II-65
Tabel	2.76	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2015 Kabupaten Blitar	II-66
Tabel	2.77	Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-66
Tabel	2.78	Kegiatan Ketenagakerjaan di Lingkup Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-66
Tabel	2.79	Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-67
Tabel	2.80	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-68
Tabel	2.81	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-68
Tabel	2.82	Tingkat Pengguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-68
Tabel	2.83	Persentase Koperasi Aktif (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-69
Tabel	2.84	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-69
Tabel	2.85	Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-70
Tabel	2.86	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-70
Tabel	2.87	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	II-71



		(PMDN/PMA) (Rp) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	
Tabel	2.88	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-71
Tabel	2.89	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-71
Tabel	2.90	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-72
Tabel	2.91	Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-72
Tabel	2.92	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-72
Tabel	2.93	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-73
Tabel	2.94	Lapangan Olahraga (Lapangan) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-73
Tabel	2.95	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Kegiatan) Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	II-74
Tabel	2.96	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-74
Tabel	2.97	Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-75
Tabel	2.98	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-75
Tabel	2.99	Penegakan Perda (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-78
Tabel	2.100	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-78
Tabel	2.101	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar (%)	II-78
Tabel	2.102	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-79
Tabel	2.103	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-79
Tabel	2.104	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-79
Tabel	2.105	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-80
Tabel	2.106	Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015	II-81
Tabel	2.107	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-81
Tabel	2.108	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar	II-82
Tabel	2.109	Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten	II-83



Blitar Tahun 2011-2015			
Tabel	2.110	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-83
Tabel	2.111	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-83
Tabel	2.112	Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-84
Tabel	2.113	Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-84
Tabel	2.114	Pameran/Expo (Kegiatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-84
Tabel	2.115	Produksi Padi Kabupaten Blitar (Ton) Tahun 2012-2015	II-85
Tabel	2.116	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-87
Tabel	2.117	Luas Lahan Kritis Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-88
Tabel	2.118	Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan Tahun 2015 (%) Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015	II-88
Tabel	2.119	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-89
Tabel	2.120	Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 (m ³)	II-89
Tabel	2.121	Kunjungan Wisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Kunjungan)	II-90
Tabel	2.122	Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-90
Tabel	2.123	Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-91
Tabel	2.124	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014 dan 2015	II-92
Tabel	2.125	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-93
Tabel	2.126	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-93
Tabel	2.127	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-94
Tabel	2.128	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)	II-94
Tabel	2.129	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (KK)	II-95
Tabel	2.130	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)	II-96
Tabel	2.131	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)	II-96
Tabel	2.132	Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-97



Tabel	2.133	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-97
Tabel	2.134	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2015 di Kabupaten Blitar	II-97
Tabel	2.135	Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-98
Tabel	2.136	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-98
Tabel	2.137	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-99
Tabel	2.138	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-99
Tabel	2.139	Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Pengguna HP/Telepon Tahun 2011-2015	II-100
Tabel	2.140	Jumlah Demo di Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015	II-100
Tabel	2.141	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-101
Tabel	2.142	<i>Dependency Ratio</i> di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014	II-102
Tabel	3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	III- 5
Tabel	3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	III- 8
Tabel	3.3	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	III- 9
Tabel	3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	III-11
Tabel	3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	III-12
Tabel	3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Blitar	III-18
Tabel	3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	III-19
Tabel	3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	III-20
Tabel	3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015	III-21
Tabel	3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015	III-22
Tabel	3.11	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2010-2016	III-23
Tabel	3.12	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-26
Tabel	3.13	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-34
Tabel	3.14	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-35



Tabel	3.15	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-35
Tabel	3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-37
Tabel	3.17	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021	III-40
Tabel	4.1	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015	IV-6
Tabel	4.2	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015	IV-7
Tabel	4.3	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015	IV-7
Tabel	4.4	Telaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	IV-32
Tabel	4.5	Telaahan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar	IV-40
Tabel	4.6	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Blitar	IV-44
Tabel	4.7	Program Perwujudan Kawasan Strategis	IV-53
Tabel	4.8	Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD	IV-57
Tabel	5.1	Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021	V-4
Tabel	5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021	V-5
Tabel	6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1	VI-2
Tabel	6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2	VI-3
Tabel	6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-3	VI-4
Tabel	6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4	VI-5
Tabel	6.5	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5	VI-7
Tabel	6.6	Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-6	VI-8
Tabel	6.7	Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	VI-13
Tabel	7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2016-2021	VII-2
Tabel	8.1	Program Kabupaten Blitar Tahun 2016	VIII-2
Tabel	8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021	VIII-22
Tabel	9.1	Indikator Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021	IX- 2
Tabel	9.2	Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IX- 6
Tabel	9.3	Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Layanan Umum	IX- 7
Tabel	9.4	Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar pada Aspek Daya Saing Daerah	IX-17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lain	I- 6
Gambar 1.2	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Blitar Dalam RTRW Kabupaten Blitar	I- 7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Blitar	II- 2
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Blitar	II- 8
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 (Jiwa)	II- 9
Gambar 2.4	Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 (Jiwa)	II- 11
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015	II- 12
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Menurut Golongan Usia	II- 13
Gambar 2.7	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015	II-15
Gambar 2.8	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2015	II-17
Gambar 2.9	Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015	II-22
Gambar 2.10	PDRB Perkapita Kabupaten Blitar (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015	II-23
Gambar 2.11	Indeks Gini Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2014	II-24
Gambar 2.12	Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2015	II-27
Gambar 2.13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-28
Gambar 2.14	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-31
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-31
Gambar 2.16	Jumlah Grup Kesenian (Grup) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-33
Gambar 2.17	Jumlah Klub Olahraga (Klub) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-34
Gambar 2.18	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	II-76
Gambar 3.1	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III- 3
Gambar 4.1	Angka IPM Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015	IV- 5
Gambar 4.2	Angka Harapan Hidup Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015	IV- 6
Gambar 5.1	Visi Kabupaten Blitar 2016-2021	V- 1



BAB PENDAHULUAN

1

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Blitar terletak di bagian Selatan Provinsi Jawa Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Posisi Kabupaten Blitar yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah terutama dari Kota Kediri dan Kota Malang, menyebabkan daerah ini menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Blitar dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan dilantikannya Bapak Drs. H. Rijanto, MM sebagai Bupati dan Bapak Marhaenis U.W. sebagai Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka melekat kewajiban untuk menyusun dan menetapkan RPJMD melalui peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan



kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra-PD. Dengan kata lain, penyusunan Renstra-PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome*, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.
 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E).



1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 harus memperhatikan RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Selanjutnya, sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kabupaten Blitar

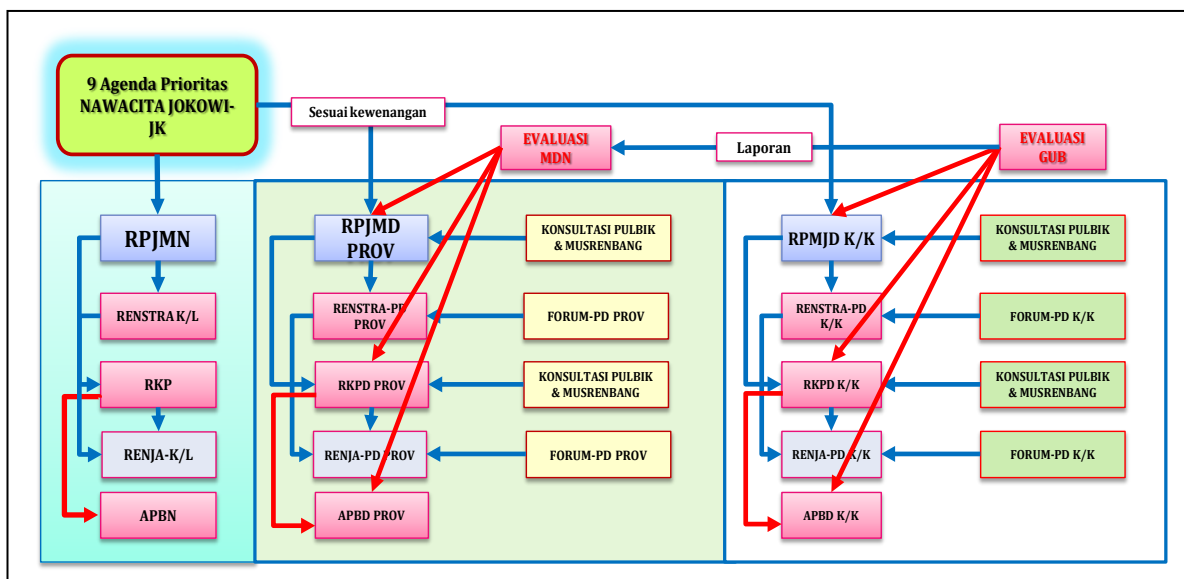
RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra-PD.

Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan

perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber: Bahan Paparan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, 2015

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RTRW Kabupaten Blitar

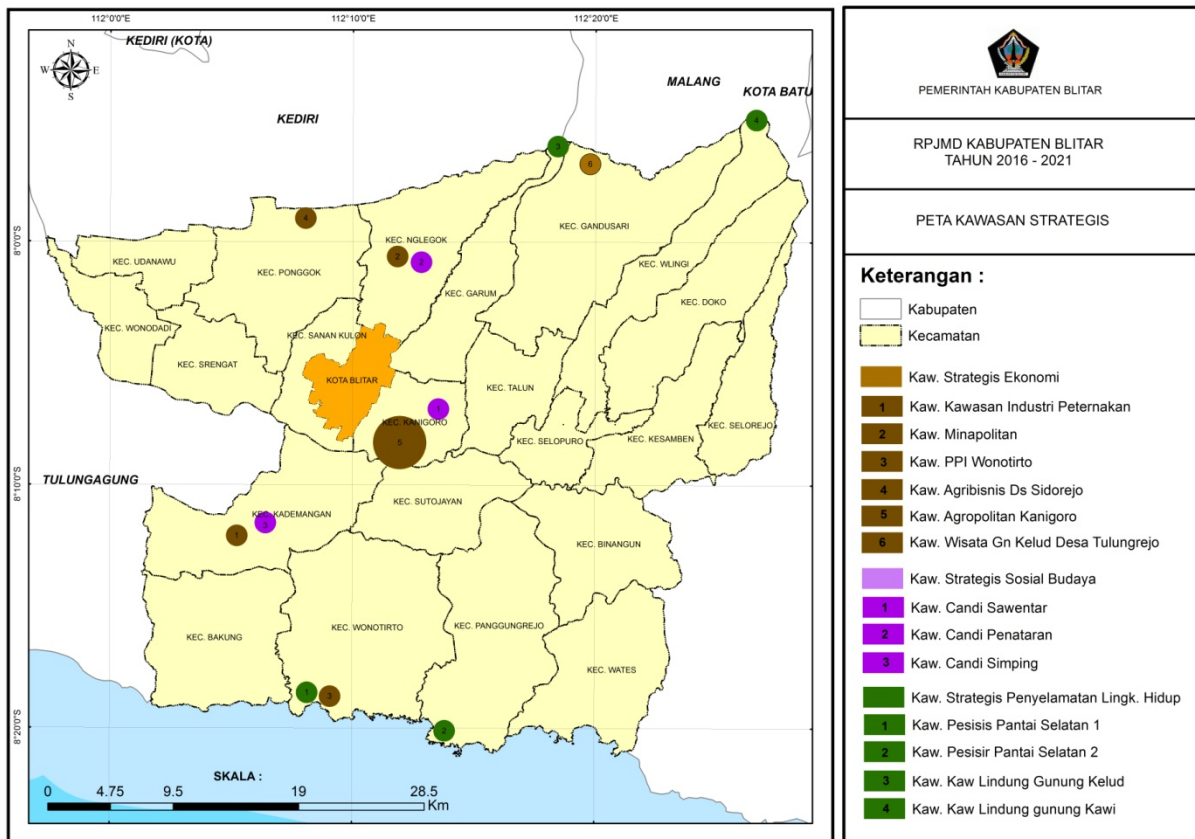
Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Blitar dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Kabupaten Blitar digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2016-2021.

Secara ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang

berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan pemerintah kabupaten Blitar dalam pembangunan lima tahun yang akan datang. Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Blitar yang sejalan dengan RTRW dapat ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Blitar Dalam RTRW Kabupaten Blitar



Sumber: Hasil Analisis

RTRW Kabupaten Blitar juga memuat rencana program yang meliputi program perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sampai tahun 2031. Mengingat perodesasi RPJMD, maka program kawasan strategis RTRW yang dilaksanakan pada periode RPJMD ini difokuskan pada Tahap II (2016-2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021. Secara detail informasi tentang RTRW Kabupaten Blitar disajikan pada Bab IV.



1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan KLHS

Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diminta melaksanakan KLHS antara lain pada penyusunan RPJMD.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN



Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Blitar yang menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun periode 2016-2021.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya yang tertuang dalam arah kebijakan.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini memuat program pemerintah Kabupaten Blitar yang disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Bab ini memuat prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah menjabarkan visi dan misi kepada daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di



dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Blitar secara berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih;
- b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renstra-PD dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD;
- c. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;
- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; dan
- e. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Blitar yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten serta beberapa data/informasi lainnya.

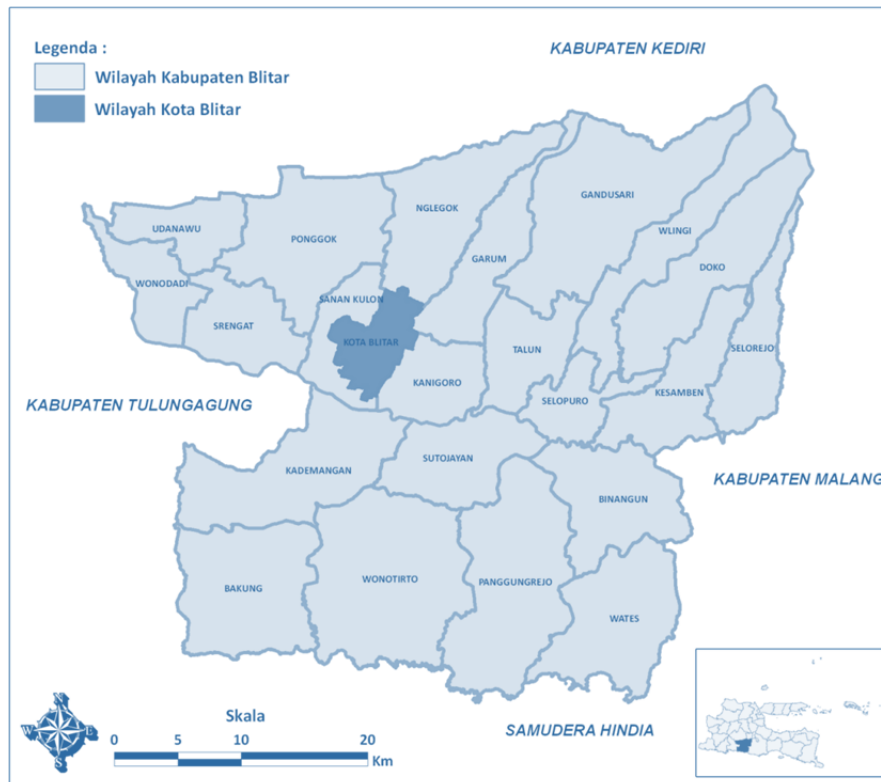
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara 111^o40'-112^o10' Bujur Timur dan 7^o58' - 8^o09'5" Lintang Selatan. Sementara itu secara administratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan kabupaten yang mempunyai luas wilayah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan ini layak diperhitungkan.

Kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah ± 167 meter adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
- b. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
- c. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Blitar



Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya. Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia.

Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang



meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah $\pm 50\%$ dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di sungai Brantas. Wilayah selatah, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni–Oktober. Sedangkan musim penghujan antara bulan November–Mei dengan jumlah curah hujan 2.467 hingga 8.282 mm/bulan. Berdasarkan data yang dikutip dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, dapat dikatakan bahwa selama tahun 2015 Kabupaten Blitar diguyur hujan selama 59 hari berturut-turut. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 °C sampai 28,3 °C dimana wilayah pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter di atas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut



umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Kabupaten Blitar melimpah dan beragam. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kabupaten Blitar masuk dalam beberapa rencana pengembangan kawasan, meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan hortikultura (sentra penghasil pisang, rambutan, dan belimbing);
- 2) Pengembangan kawasan perkebunan (tebu, kopi, kakao, kelapa, dan nilam);
- 3) Pengembangan kawasan sentra peternakan besar (ternak besar dan peternakan unggas);
- 4) Pengembangan kawasan perikanan, meliputi perikanan air tawar (budidaya ikan hias), dan perikanan air laut.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan di sektor pertanian masih memegang peran utama tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, potensi pertanian Kabupaten Blitar dikenal unggul. Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan mencapai 19,9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk kegiatan perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Dominasi sektor pertanian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar yang selalu tercatat di atas 30 persen setiap tahunnya. Di tahun 2015, kategori tersebut menyumbang 36,38 persen dari total PDRB. Disamping padi dan jagung yang merupakan komoditas pertanian tanaman pangan unggulan, komoditas unggulan lain baik perkebunan maupun hortikultura yang dihasilkan di Kabupaten Blitar adalah Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, dan Kopi.



Di sektor peternakan, produksi telur unggas Kabupaten Blitar konsisten menyumbang hampir sepertiga produksi telur Jawa Timur. Pada tahun 2012 sumbangan produksi telur Kabupaten Blitar terhadap produksi Jawa Timur sebesar 33,54 persen, tahun berikutnya meningkat menjadi 37,08 persen, dan pada tahun 2014 sebesar 27,83 persen (Data Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2015). Besarnya volume produksi telur di Kabupaten Blitar ini tidak saja menguntungkan para pengusaha/produsen, melainkan juga dinikmati pula oleh masyarakat pada umumnya, pekerja, dan secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui perolehan PAD dan peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar. Disamping telur yang berasal dari ayam ras, cukup banyak pula telur itik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Blitar. Produk lain yang dihasilkan dari sektor peternakan ini adalah daging ayam dan susu.

Tabel 2.1
Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
I. Daging / Meat (Ton)					
- Sapi/ Cow	20.005,65	21.128,59	18.042,98	18.403,75	18.988,21
- Kambing / Goat	1.682,00	1.850,19	1.790,22	1.879,73	1.907,92
- Domba / Sheep	96,86	120,61	126,91	131,46	133,52
- Ayam Buras / Domestic Hen	1.170,55	1.277,89	1.278,90	1.291,70	1.298,15
- Ayam Petelor / Layer Hen	12.510,36	13.802,68	13.602,90	12.922,76	13.181,13
- Itik / Duck	455,95	435,59	435,65	479,22	527,40
- Ayam Pedaging / Broiler	26.248,32	23.962,36	26.725,59	25.391,70	26.720,27
Total	62.169,69	62.577,90	62.003,15	60.500,31	62.756,60
II. Kulit/Leather (Ton)					
- Sapi/Cow	0,09	0,09	0,06	0,05	0,07
- Kambing / Goat	302,76	333,04	338,22	360,90	399,20
- Domba / Sheep	87,17	108,55	0,00	17,97	18,81
Total	390,02	441,68	338,28	378,92	418,08
III. Susu / Milk (Ton)					
- Sapi / Dairy Cow	40.553,23	43.073,33	31.880,84	32.201,00	32.493,00
IV. Telor / Eggs (Ton)					
- Ayam Buras / Domestic Hen	1.073,43	1.171,86	1.172,79	1.453,16	1.488,98
- Ayam Ras / Pedigree Hen	133.965,29	147.803,88	148.919,91	123.276,97	151.826,22
- Itik / Duck	3.397,59	3.245,87	3.246,36	5.223,89	5.700,73
- Entok / Manila Duck	133,11	146,63	146,63	1.832,00	138,74
- Puyuh				18,32	570,24
Total	138.569,41	152.368,24	153.485,68	131.804,35	159.724,90

Sumber: Dinas Peternakan, 2016



Disamping sektor Pertanian, Kabupaten Blitar juga memiliki Potensi Perikanan yang cukup besar baik perikanan laut (tangkap) maupun perikanan darat/budidaya. Potensi perikanan laut sangat menjanjikan karena Kabupaten Blitar langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia di bagian Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Blitar sejak beberapa tahun belakangan secara intensif mengembangkan sarana dan prasarana perikanan khususnya di Pantai Tambakrejo, guna meningkatkan produksi perikanan laut tersebut.

Pada sektor perikanan darat, khususnya budidaya ikan hias, Kabupaten Blitar terkenal dengan komoditas ikan koi dengan basis budidaya ikan koi di Kecamatan Nglegok yang telah diakui secara nasional sebagai salah satu sentra ikan koi berkualitas di Indonesia. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, saat ini wilayah selatan merupakan pemasok bahan tambang golongan C seperti, Feldspar, Kaolin, Zeolit, Pasir Besi dan Batu Kapur.

Tabel 2.2
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Blitar
Tahun 2014-2015

Jenis	2014		2015	
	Produksi	Nilai (Rp)	Produksi	Nilai (Rp)
Tangkap (ton)	1.314,5	14.272.793.000	2.226,45	21.297.411.000
1. Laut	1.063,6	11.340.052.500	1.944,96	18.366.226.000
2. PUD	250,9	2.932.740.500	281,49	2.931.185.000
Budidaya (ton)	9.733,0	160.762.800.000	14.642,26	261.454.145.000
1. Kolam	9.207,2	142.173.200.000	14.119,20	243.686.525.000
2. Mina Padi	4,7	56.400.000	4,20	59.000.000
3. Karamba	0,4	4.800.000	0,40	4.800.000
4. Jaring Apung	26,7	1.238.400.000	20,76	284.320.000
5. Tambak	494	17.290.000.000	497,70	17.419.500.000
Ikan Hias (ekor)	233.268.000	134.045.600.000	234.294.000	133.753.770.000
TOTAL		469.843.993.000		677.959.471.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Sektor perdagangan juga berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi dengan layak. Komoditas unggulan lain Kabupaten Blitar diantaranya adalah gula kelapa, minyak atsiri (kenanga dan nilam), serta kerajinan batok kelapa yang telah menembus pasar nasional.



Dalam rangka mengembangkan industri minyak atsiri, Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Dimulai pada tahun 2011, pengembangan atsiri dilaksanakan melalui Program Hibah Kompetensi Berbasis Institusi berupa program pemberdayaan petani nilam, cengkeh, dan kenanga. Pada akhir tahun 2013 dimulai rintisan Pengembangan Agrowisata Atsiri Nilam di Kecamatan Kesamben.

Dalam Rencana Pengembangan Koridor Wisata RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, wilayah Kabupaten Blitar juga termasuk dalam Jalur Pengembangan Koridor C untuk konservasi kompleks Candi Penataran. Bersama dengan Monumen Trisula, Candi Simping dan Candi Penataran masuk dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Potensi alam yang bervariasi bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar di sepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata.

Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir di setiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih-lebih jika dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat.

Di sisi lain, kondisi geografis Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti di wilayah barat, kebudayaan masyarakatnya condong ke mentaraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan di bagian timur, cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Heterogenitas penduduk ini harus selalu dikelola dengan baik agar stabilitas wilayah dapat selalu terjaga.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis yang bervariasi, antara lain sepanjang sisi selatan berada ditepi pantai, serta sisi utara yang bergunung-gunung bahkan terletak dilereng gunung Kelud yang masih aktif, selain memiliki potensi yang menjanjikan, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain :

- a. Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan

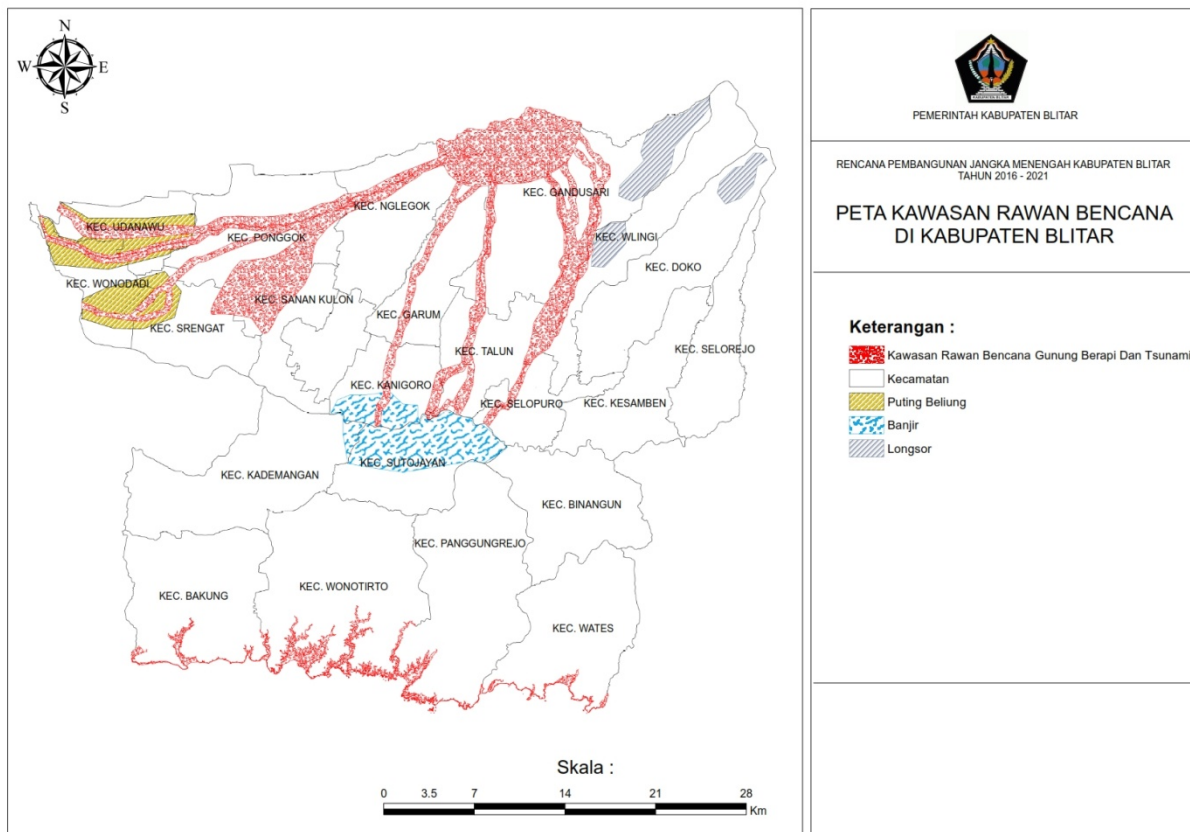


Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung.

- b. Daerah rawan bencana Gunung Berapi, utamanya meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Garum.
- c. Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
- d. Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.
- e. Daerah Rawan longsor meliputi kecamatan Gandusari, Wlingi, dan Doko.

Gambar 2.2

Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Blitar



Sumber: Bappeda, 2016 (diolah)

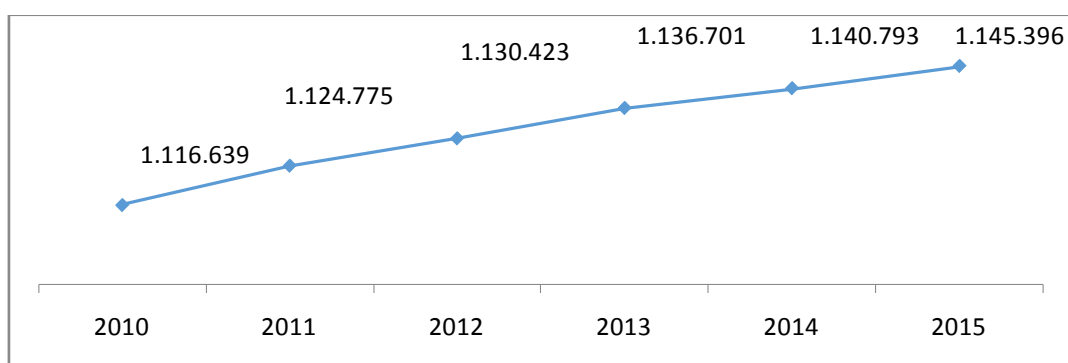
2.1.4 Demografi

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (*input*) produksi sekaligus menciptakan *demand* barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km² maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 721 jiwa per km².

Gambar 2.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa)



Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Dilihat dari persebaran penduduk Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 101.058 jiwa, sementara Kecamatan Bakung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sejumlah 25.542 jiwa. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Sanankulon dengan jumlah penduduk sebesar 1.672 jiwa per km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah Wonotirto dengan jumlah penduduk 216 jiwa per km².



Tabel 2.3

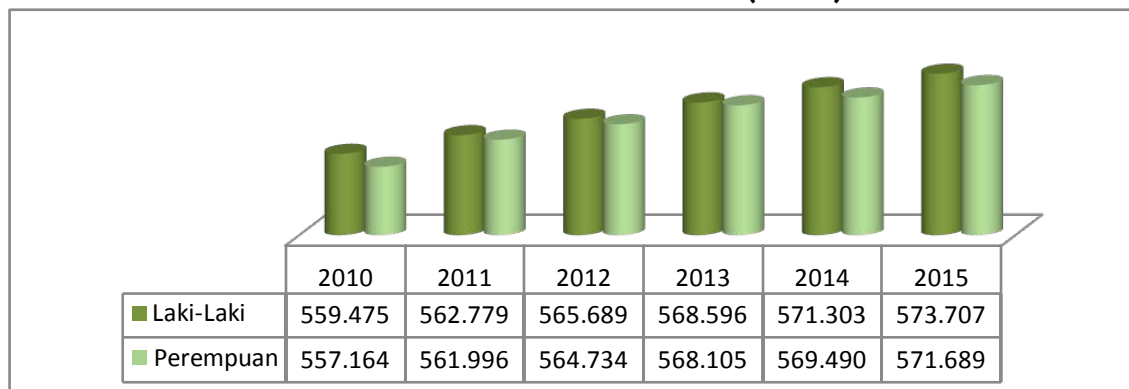
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
				L	P	Total		
1.	Bakung	111,24	7,00	12.504	13.038	25.542	95,90	230
2.	Wonotirto	164,54	10,36	17.873	17.707	35.580	100,94	216
3.	Panggunrejo	119,04	7,49	20.617	20.711	41.328	99,55	347
4.	Wates	68,76	4,33	14.124	14.094	28.218	100,21	410
5.	Binangun	76,79	4,83	21.355	21.330	42.685	100,12	556
6.	Sutojayan	44,2	2,78	23.626	24.192	47.818	97,66	1.082
7.	Kademangan	105,28	6,63	32.598	32.639	65.237	99,87	620
8.	Kanigoro	55,55	3,50	38.719	38.096	76.815	101,64	1.383
9.	Talun	49,78	3,13	30.209	30.455	60.664	99,19	1.219
10.	Selopuro	39,29	2,47	20.213	19.605	39.818	103,10	1.013
11.	Kesamben	56,96	3,59	23.879	24.509	48.388	97,43	850
12.	Selorejo	52,23	3,29	17.248	17.666	34.914	97,63	668
13.	Doko	70,95	4,47	18.840	18.885	37.725	99,76	532
14.	Wlingi	66,36	4,18	25.162	25.009	50.171	100,61	756
15.	Gandusari	88,23	5,55	33.528	32.949	66.477	101,76	753
16.	Garum	54,56	3,43	32.697	32.139	64.836	101,74	1.188
17.	Nglegok	92,56	5,83	35.082	34.692	69.774	101,12	754
18.	Sanankulon	33,33	2,10	27.869	27.855	55.724	100,05	1.672
19.	Ponggok	103,83	6,54	51.159	49.899	101.058	102,53	973
20.	Srengat	53,98	3,40	32.362	32.592	64.954	99,29	1.203
21.	Wonodadi	40,35	2,54	23.419	23.494	46.913	99,68	1.163
22.	Udanawu	40,98	2,58	20.624	20.133	40.757	102,44	995
Kab. Blitar		1.588,79	100	573.707	571.689	1.145.396	100,35	721

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Komposisi penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin selama lima tahun terakhir sejak SP 2010 disajikan dalam Gambar 2.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut populasi penduduk laki-laki lebih besar dibanding populasi perempuan.

Gambar 2.4
Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2010 – 2015 (Jiwa)



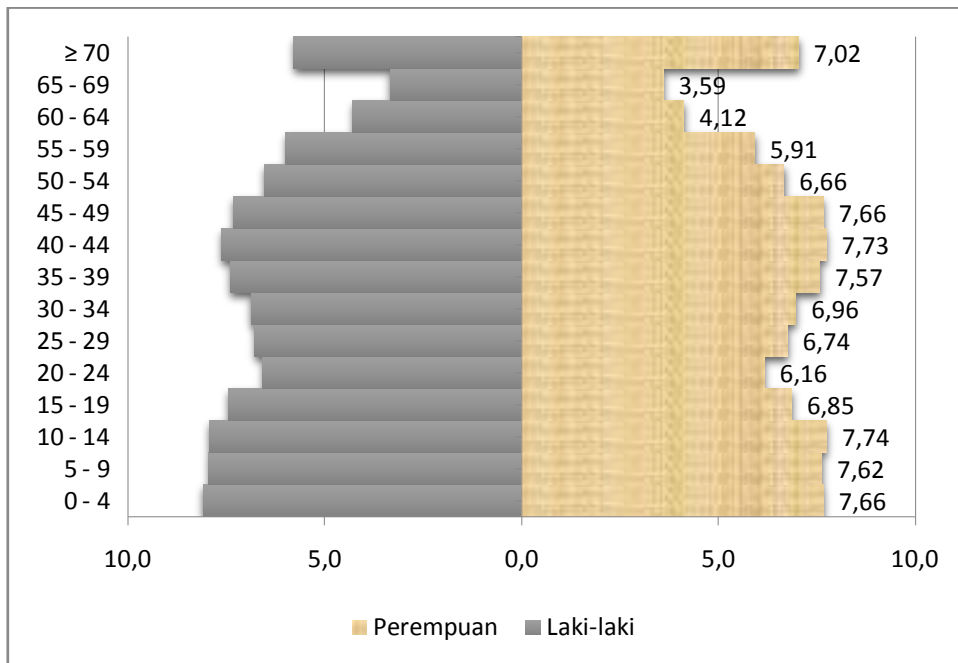
Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berpengaruh pada nilai *sex ratio*. Nilai *sex ratio* Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015, *sex ratio* Kabupaten Blitar sebesar 100,35. Artinya, dalam 10.000 jiwa penduduk perempuan terdapat 10.035 jiwa penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berwawasan kesetaraan gender maupun sebagai informasi untuk kepentingan mengakomodir tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Sementara itu, untuk mengetahui penduduk menurut kelompok usia, dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut mampu menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur sekaligus menurut jenis kelamin.

Gambar 2.5

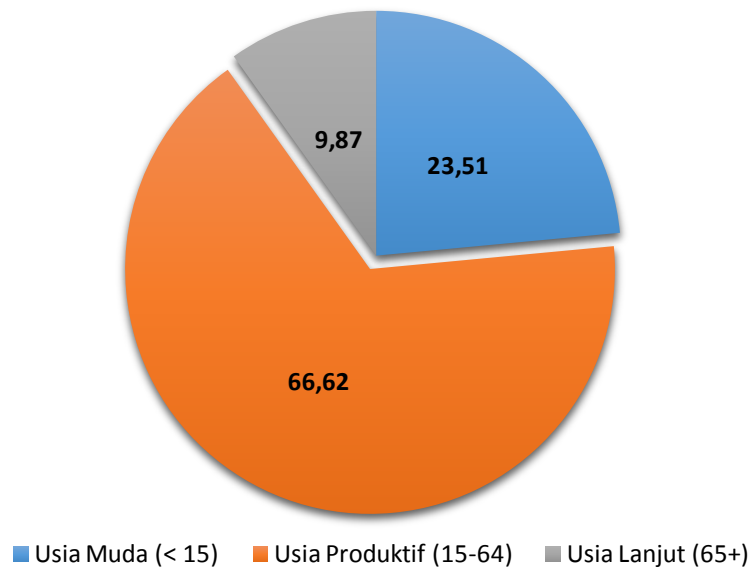
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015



Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Blitar berada pada rentang usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase sebesar 66,62% (763.093 jiwa). Sisanya merupakan usia non produktif (382.303 jiwa) yang terdiri dari penduduk usia muda dibawah 15 tahun sebesar 23,51% dan penduduk usia lanjut 65 tahun keatas sebesar 9,87%.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015
Menurut Golongan Usia



Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa *dependency ratio* atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,50. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya.

Suatu daerah akan memperoleh “bonus demografi” saat nilai *dependency ratio*-nya kurang dari 0,5 atau saat 100 orang usia kerja menanggung tidak lebih dari 50 orang usia nonproduktif. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah berapa persen dari jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja) tersebut yang benar-benar aktif bekerja pada usia produktifnya.



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek ini menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Pertumbuhan PDRB

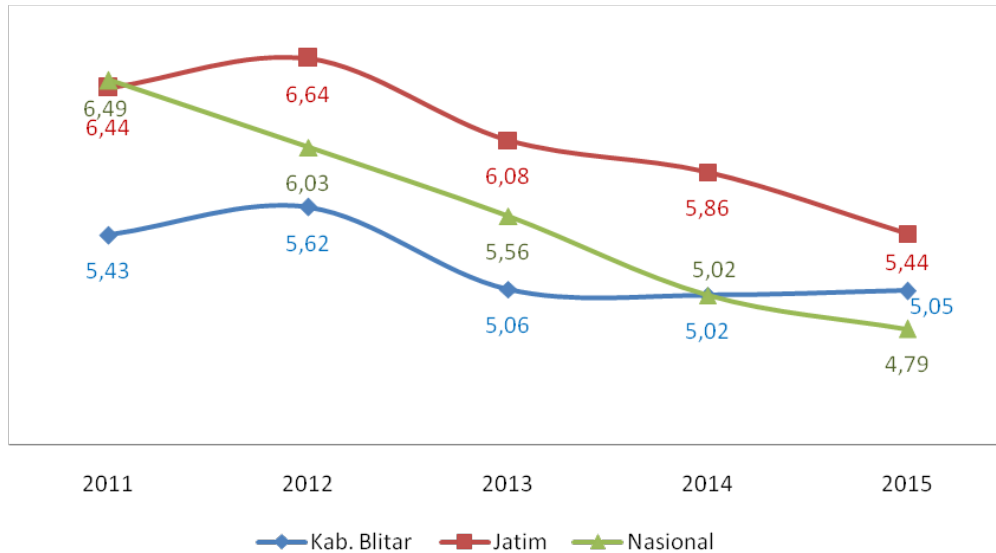
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga (inflasi), sedangkan PDRB ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Blitar sangat tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia.

Selama periode 2010-2015 nilai PDRB Kabupaten Blitar terus mengalami perkembangan, baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010. Dalam rentang waktu tersebut, pertambahan PDRB ADHB Kabupaten Blitar rata-rata berkisar 2,1 milyar rupiah per tahun. Angka ini masih kasar dan belum dapat digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi karena didalamnya mengandung pengaruh perubahan/kenaikan harga (inflasi) seperti dijelaskan sebelumnya. Artinya, bisa saja pertambahan tersebut mayoritas justru disumbang oleh perubahan harga, bukan kuantitas. Perkembangan ekonomi secara riil, bisa dilihat dari perubahan PDRB ADHK Kabupaten Blitar yang kemudian lazim disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.7

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2016 (diolah)

BPS RI mencatat, pada tahun 2015 perekonomian nasional hanya bergerak 4,74 persen, sedikit lebih lambat dibanding tahun 2014 yang mampu tumbuh sebesar 5,02 persen. Setali tiga uang, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pun hanya mampu mencapai level 5,4 persen, setelah sebelumnya sukses bertengger di angka 5,9 persen. Dari semua kategori, Industri Pengolahan tampaknya menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi di Jawa Timur, mengingat kontribusi kategori ini cukup besar.

Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Blitar. Sempat melemah di tahun 2014, perekonomian Kabupaten Blitar tumbuh lebih cepat pada tahun 2015, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Dari Gambar 2.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Blitar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4

**Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar ADHK 2010
Tahun 2011-2015 (%)**

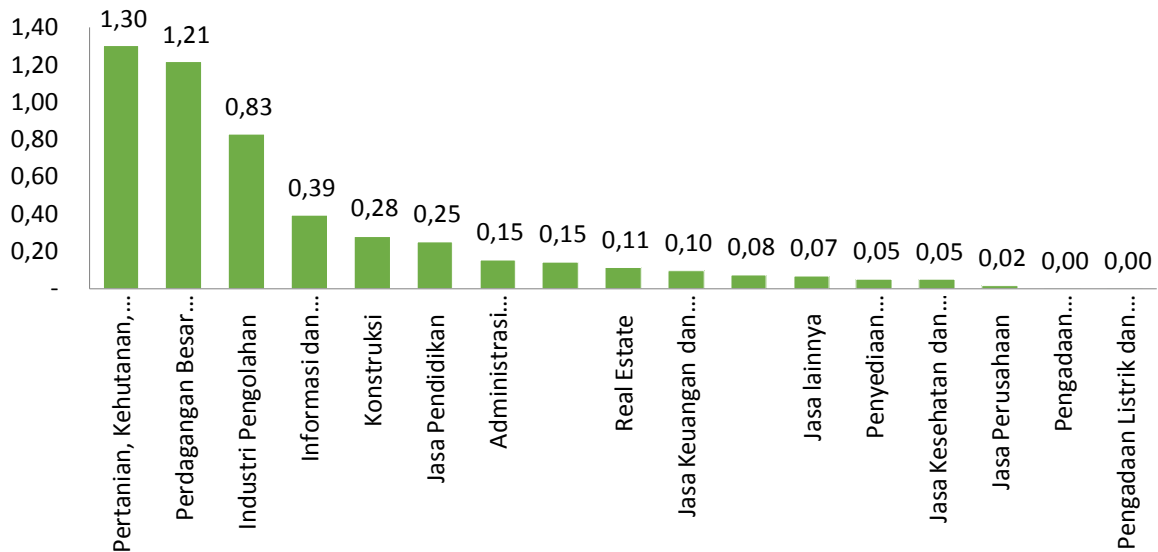
Kategori	Lapangan Usaha / Industri	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	5,18	2,42	3,00	4,67
B	Pertambangan dan Penggalian	7,54	1,28	3,93	3,51	2,98
C	Industri Pengolahan	3,44	1,57	4,89	6,90	6,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,27	10,00	2,08	1,64	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0,32)	2,25	2,33	2,56	2,94
F	Konstruksi	5,07	6,48	8,42	6,21	1,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,83	9,33	7,29	6,22	6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	5,05	4,31	5,74	7,36	6,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,05	12,09	4,19	5,96	5,95
J	Informasi dan Komunikasi	8,69	8,17	10,82	6,21	6,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,26	13,83	9,12	5,73	4,34
L	Real Estat	6,83	4,80	5,27	6,76	5,83
M, N	Jasa Perusahaan	4,70	4,56	3,80	4,27	4,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88	2,83	1,14	0,37	4,43
P	Jasa Pendidikan	4,96	5,04	5,85	8,51	6,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,16	8,56	7,44	13,62	1,46
R, S, T, U	Jasa lainnya	7,03	4,88	4,01	5,05	4,51
Produk Domestik Regional Bruto		5,43	5,62	5,06	5,02	5,05

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016

Sekilas tampak bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun apabila ditelisik lebih seksama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar sebesar 5,05 persen di tahun 2015, utamanya justru bersumber dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu berkisar 1,30 persen, baru kategori Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi terhadap pertumbuhan total sebesar 1,21 persen. Sumber pertumbuhan diperoleh dari pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori, yang dibobot oleh peran dari kategori-kategori itu sendiri.

Gambar 2.8

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2015



Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 (diolah)

Sementara itu, secara nominal PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2015 yaitu sebesar 26,8 triliun rupiah (ADHB). Angka tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2015 seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar bernilai 26,8 triliun rupiah. Sementara jika ditinjau dari harga konstan 2010, PDRB yang dihasilkan berkisar 20,9 triliun rupiah. Berikut adalah tabel PDRB ADHB dan ADHK menurut lapangan usaha tahun 2011 – 2015.



Tabel 2.5

**PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015
(Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha / Industri	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.304.230,5	6.969.377,6	7.668.035,5	8.659.948,2	9.740.390,1
B	Pertambangan dan Penggalian	828.117,3	847.648,5	892.862,8	1.066.491,6	1.144.203,3
C	Industri Pengolahan	2.447.617,2	2.572.152,7	2.788.041,9	3.077.688,0	3.435.355,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.010,2	13.634,5	12.194,3	12.414,1	13.160,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.894,7	7.103,5	7.513,9	7.896,1	8.454,2
F	Konstruksi	1.561.740,7	1.766.689,9	1.949.968,5	2.204.852,4	2.323.152,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.967.315,3	3.389.639,3	3.740.904,9	4.037.874,2	4.519.150,3
H	Transportasi dan Pergudangan	212.347,5	228.739,5	253.321,4	288.034,3	321.760,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	147.716,9	172.156,4	185.796,2	207.124,3	233.710,3
J	Informasi dan Komunikasi	956.129,6	1.023.241,2	1.134.448,6	1.190.790,0	1.311.129,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	360.198,2	449.873,8	503.050,7	561.260,5	615.326,7
L	Real Estat	339.683,0	363.139,5	393.965,5	420.645,1	479.775,2
M, N	Jasa Perusahaan	65.433,2	70.248,6	76.596,1	80.749,0	88.987,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	692.742,1	762.000,9	791.296,2	802.126,5	869.857,0
P	Jasa Pendidikan	714.040,8	804.457,0	896.920,4	1.007.306,9	1.102.067,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.848,2	146.258,8	163.029,8	184.909,6	202.812,0
R, S, T, U	Jasa lainnya	268.336,8	282.153,1	297.220,8	330.508,9	366.900,5
PDRB		18.013.402,5	19.868.514,7	21.755.167,9	24.140.619,6	26.776.192,9

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016



Tabel 2.6

**PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha
Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha / Industri	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.899.263,2	6.204.675,3	6.355.112,8	6.546.046,2	6.851.513,9
B	Pertambangan dan Penggalian	800.767,8	811.034,9	842.883,5	872.503,6	898.494,9
C	Industri Pengolahan	2.282.471,3	2.318.192,3	2.431.580,1	2.599.399,7	2.757.881,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.643,5	15.007,5	15.319,1	15.570,1	15.600,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.869,2	7.023,5	7.187,1	7.371,1	7.587,7
F	Konstruksi	1.480.726,5	1.576.671,3	1.709.440,9	1.815.540,8	1.851.193,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.834.327,8	3.098.759,9	3.324.721,7	3.531.596,4	3.763.947,4
H	Transportasi dan Pergudangan	205.866,5	214.738,5	227.055,2	243.763,1	258.938,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.758,8	162.255,9	169.054,5	179.138,5	189.796,5
J	Informasi dan Komunikasi	954.412,3	1.032.384,7	1.144.096,3	1.215.107,2	1.293.403,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	343.532,9	391.033,2	426.685,4	451.133,7	470.703,2
L	Real Estat	328.765,2	344.557,3	362.708,0	387.235,2	409.798,9
M, N	Jasa Perusahaan	62.366,0	65.211,4	67.686,6	70.575,7	73.910,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666.619,6	685.471,5	693.264,1	695.816,4	726.662,9
P	Jasa Pendidikan	680.930,4	715.282,3	757.134,8	821.570,5	872.218,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.498,9	136.244,3	146.375,8	166.315,4	168.739,0
R, S, T, U	Jasa lainnya	263.082,1	275.911,7	286.973,9	301.472,7	315.083,7
PDRB		17.093.902,3	18.054.455,6	18.967.279,9	19.920.156,5	20.925.474,3

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016

Ditinjau dari struktur perekonomiannya, hingga tahun 2015 Kabupaten Blitar masih bercorak agraris. Hal ini tercermin dari besarnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang 36,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Blitar di tahun



tersebut. Kategori berikutnya yang juga tidak kalah penting dalam membentuk wajah perekonomian Kabupaten Blitar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang memiliki kontribusi sekitar 16,88 persen terhadap total PDRB, selanjutnya Kategori Industri Pengolahan sebesar 12,83 persen; dan Kategori Konstruksi sebesar 8,68 persen. Sedangkan peranan kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut
Kategori Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2015

Kategori	Lapangan Usaha / Industri	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,00	35,08	35,25	35,87	36,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,60	4,27	4,10	4,42	4,27
C	Industri Pengolahan	13,59	12,95	12,82	12,75	12,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,67	8,89	8,96	9,13	8,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,47	17,06	17,20	16,73	16,88
H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,15	1,16	1,19	1,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,87	0,85	0,86	0,87
J	Informasi dan Komunikasi	5,31	5,15	5,21	4,93	4,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	2,26	2,31	2,32	2,30
L	Real Estat	1,89	1,83	1,81	1,74	1,79
M, N	Jasa Perusahaan	0,36	0,35	0,35	0,33	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,84	3,64	3,32	3,25
P	Jasa Pendidikan	3,96	4,05	4,12	4,17	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,74	0,75	0,77	0,76
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,49	1,42	1,37	1,37	1,37
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016



Apabila diamati, selama kurun lima tahun terakhir, kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kecenderungan meningkat. Sebaliknya, kategori Industri Pengolahan justru kian menurun. Kedua kategori tersebut, bersama dengan kategori Pertambangan dan Penggalian, sering disebut sebagai sektor *Tradable/Riil*. Peran sektor *Tradable/Riil* ini sangat penting dalam kancah perekonomian regional Kabupaten Blitar, mengingat lebih dari separuh penduduk Kabupaten Blitar bekerja di sektor tersebut, terutama di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah di pertanian lah, masyarakat dengan predikat miskin banyak bernaung. Tahun 2014 misalnya, sebanyak 32,14 persen penduduk miskin di Kabupaten Blitar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (BPS, 2016).

b. Laju Inflasi

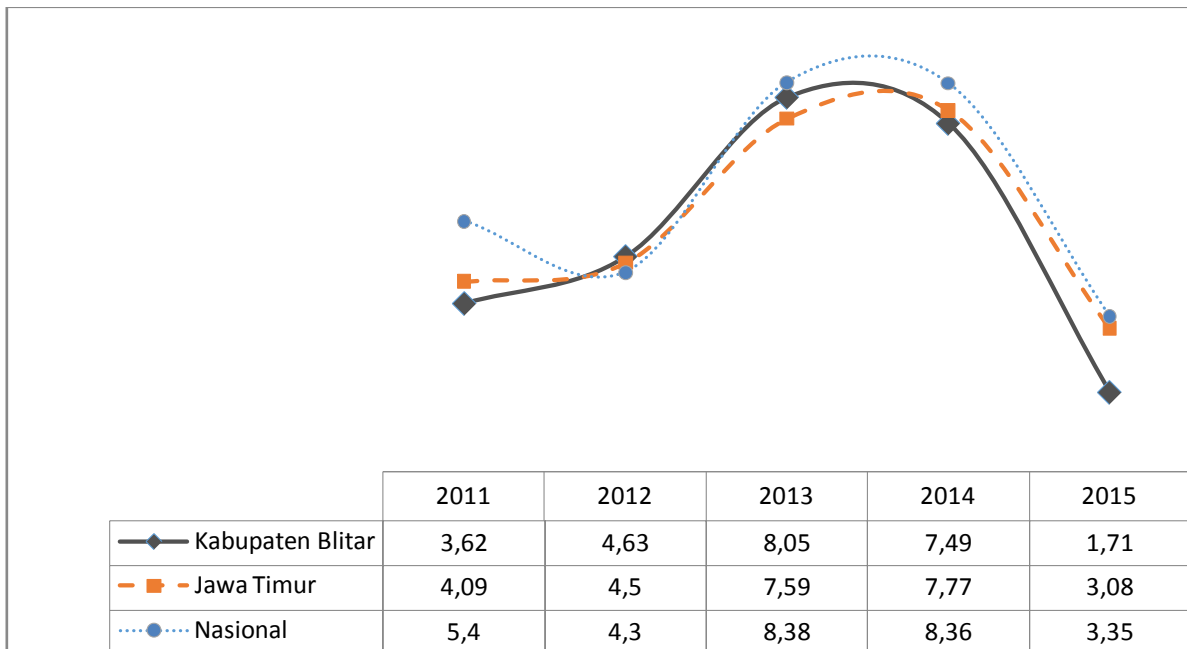
Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30% setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi (>100% setahun). Laju inflasi di Kabupaten Blitar diasumsikan sama dengan angka inflasi Kota Kediri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi tertinggi Kabupaten Blitar terjadi di tahun 2013 sebesar 8,05 persen. Kenaikan inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga BBM subsidi dan perubahan cuaca yang mengakibatkan pergeseran musim panen beberapa komoditi pertanian. Dengan kata lain, inflasi yang terjadi lebih didorong oleh efek kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan pemerintah lain yang kerap memicu inflasi adalah pengumuman kenaikan UMK/UMR serta kenaikan Gaji PNS, TNI dan Polri.

Sementara itu, Tahun 2015 merupakan tahun dengan angka inflasi terendah. Rendahnya angka inflasi, diantaranya dipengaruhi oleh kecilnya kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, contoh cabai dan beras. Melimpahnya pasokan cabai dari sentra produksi, menekan harga cabai mengalami penurunan. Selain itu, harga beras dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan stok dan disisi lain konsumsi cenderung normal. Terlihat bahwa upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja optimal dalam menjaga rantai distribusi bahan makanan. Bagaimanapun ini merupakan cara yang cukup efisien untuk menjaga laju inflasi tetap landai. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah, penurunan harga BBM yang kemudian diikuti oleh penurunan tarif angkutan. Akibatnya, terjadi beberapa kali deflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Gambar 2.9

Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015

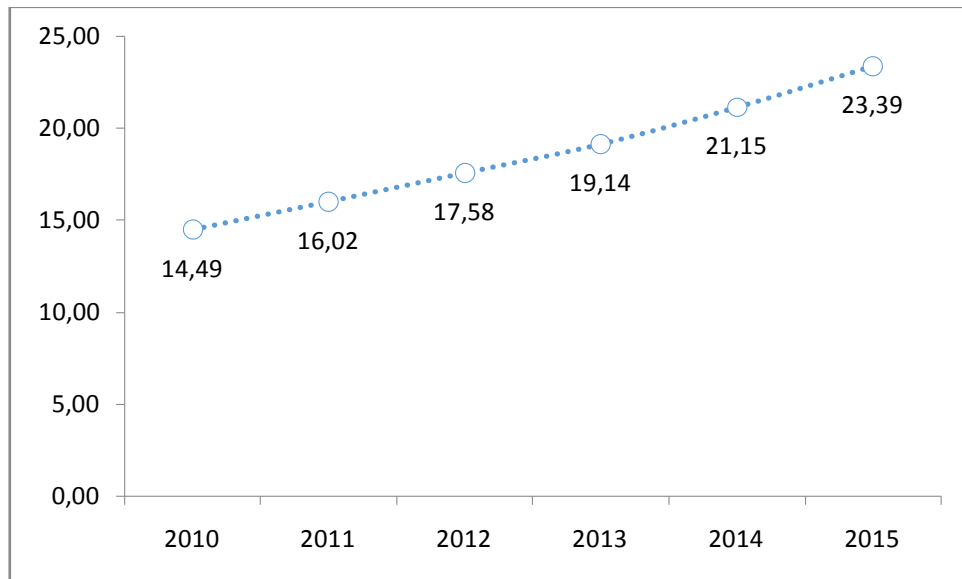


Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2016 (diolah)

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk, meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan daerah lain.

Gambar 2.10
PDRB Perkapita Kabupaten Blitar (Juta Rupiah)
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

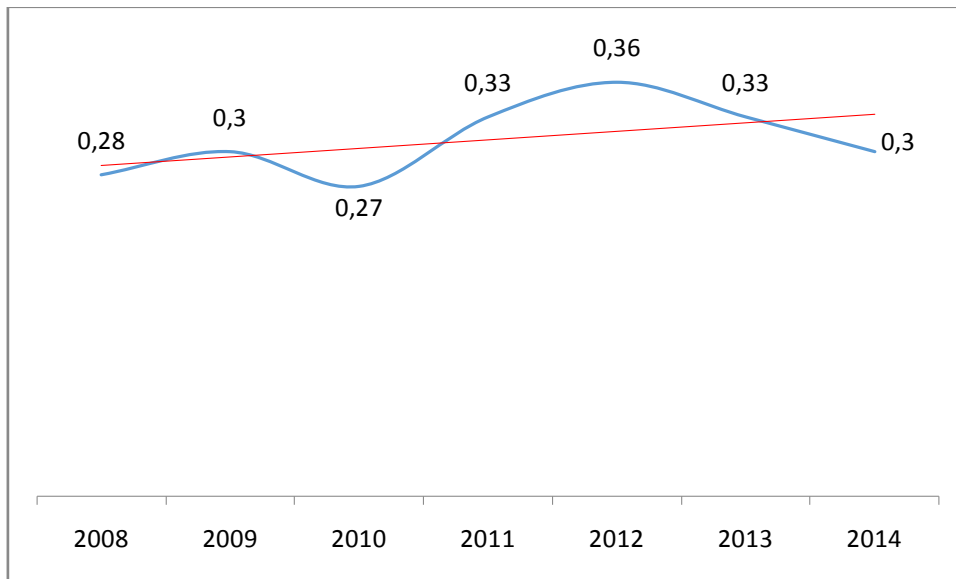
PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2011 mencapai 16 juta rupiah dan meningkat menjadi 23,39 juta rupiah pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10 persen per tahun.

d. Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan menghitung nilai koefisien gini (*Gini Ratio*). Ketimpangan distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai gini ratio ini didasarkan pada kriteria: a) Jika nilai koefisien gini< 0,4, maka dinyatakan tingkat ketimpangan rendah, b) Jika nilai koefisien gini 0,4 < 0,5, maka dinyatakan tingkat ketimpangannya sedang, dan 3) jika nilai koefisien gini>0,5, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi. Posisi terakhir *Gini Ratio* tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar berada di angka 0,30. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Blitar tergolong rendah dikarenakan nilai koefisien gininya di bawah 0,4. Berikut adalah gambar indeks gini Kabupaten Blitar.

Gambar 2.11

Indeks Gini Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah)

e. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data persentase penduduk Kabupaten Blitar di atas garis kemiskinan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.8

**Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Blitar**

Indikator	2011	2012	2013	2014
Persentase Penduduk Miskin	11,29	10,71	10,53	10,22
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	88,71	89,29	89,47	89,78

Sumber: Data Strategis “Titik Nol 2015” untuk Pembangunan Kabupaten Blitar Periode 2016-2021

Dari Tabel di atas diketahui dari tahun 2011 hingga tahun 2014 persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan trend yang terus meningkat. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 permasalahan Pemerintah Daerah yang dialami untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blitar yaitu :

- Program pengentasan kemiskinan dihadapkan pada masalah pengurangan jumlah penduduk miskin yang makin melambat, penduduk miskin yang ada makin sulit dientaskan
- Perubahan Garis Kemiskinan terus terjadi seiring perubahan harga (inflasi) kebutuhan bahan pokok konsumsi rumah tangga di Kabupaten Blitar. Periode 4 tahun terakhir (2011-2014) GK naik rata-rata sebesar 5,14 persen per tahun. Angka ini diperkirakan mendekati inflasi harga konsumen
- Rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati kemiskinan, gap pengeluaran antar penduduk miskin pada periode terakhir 2011-2014 menunjukkan angka yang stagnan.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia



tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini disajikan IPM Kabupaten Blitar sejak tahun 2010 sampai 2015. Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.9

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015

BLITAR	Angka					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	72,31	72,36	72,42	72,47	72,50	72,80
Indeks Kesehatan	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Harapan Lama Sekolah	11,03	11,18	11,34	11,37	11,49	11,98
Rata-rata Lama Sekolah	6,43	6,52	6,59	6,67	6,82	7,24
Indeks Pendidikan	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,57
Pengeluaran	8.423	8.726	9.076	9.217	9.245	9.272
Indeks Daya Beli	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68
IPM Kabupaten Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13
IPM Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

g. Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani

Seluruh tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Blitar sampai tahun 2015 yang dilaporkan/terdeteksi secara keseluruhan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang (100 persen).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1) Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

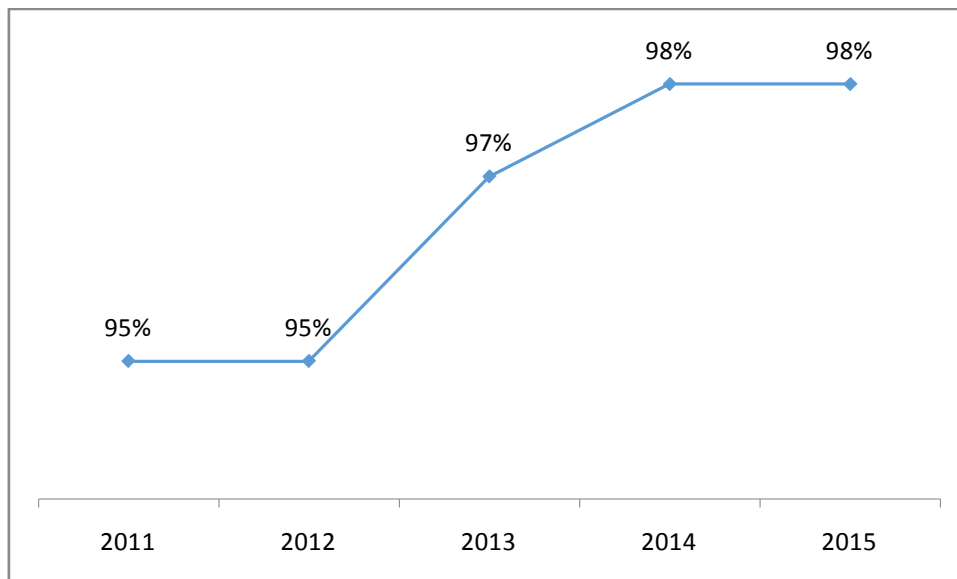
Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:



- (i) Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- (ii) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- (iii) Menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar paket A, B dan C serta melalui keaksaraan fungsional, pelaksanaan beberapa pelatihan kecakapan hidup serta peningkatan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus-kursus yang ada di Kabupaten Blitar. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten Blitar.

Gambar 2.12
Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar (%)
Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

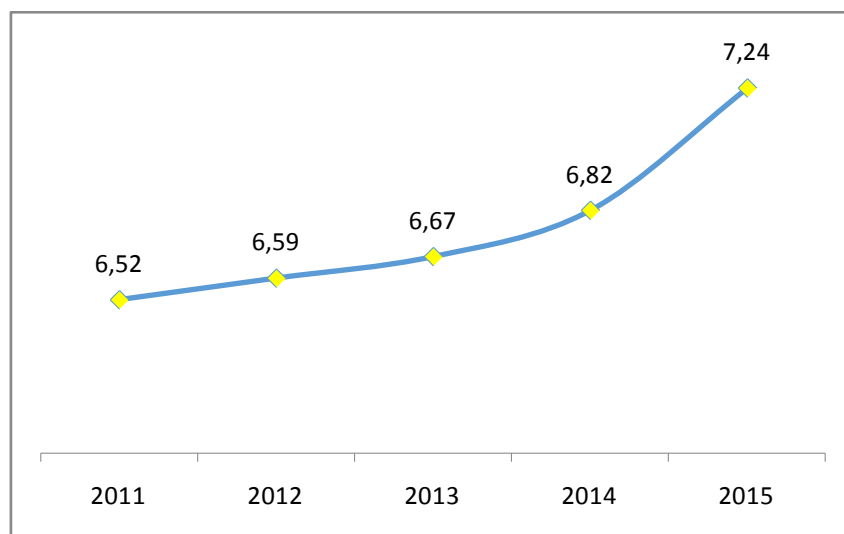
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya metode baru dalam penghitungan angka IPM, angka rata-rata lama sekolah kabupaten Blitar pada awal periode tahun 2011 adalah

6,52 tahun. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 7,24 tahun.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan program seperti pelatihan kecakapan hidup, penyelenggaraan kegiatan kejar paket B dan C, serta rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Blitar.

Gambar 2.13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/MI dan Paket A	99	99	99	99	123
APK SMP/MTs dan Paket B	98	98	99	9999	108
APK SMA/SMK/MA	39	39	42	5242	41

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016



APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda atau mungkin bisa jg akibat adanya sistem akselerasi. Pada kondisi APK ini dapat terlihat semakin tinggi tingkat pendidikan, nilai realisasinya semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang apada khirnya mengalami kesulitan biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

d. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APM SD/MI	92	95	95	97	108
APM SMP/MTs	80	80	81	81	84
APM SMA/SMK/MA	36	36	40	40	40

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016



Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya APM. Capaian APM Kabupaten Blitar tahun 2015 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

- Pola pikir sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar yang beranggapan bahwa kualitas lembaga pendidikan di luar Kabupaten Blitar lebih baik, sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar menyekolahkan putra putrinya di luar Kabupaten Blitar.
- Adanya pola pikir anak-anak usia sekolah yang beranggapan bahwa sekolah di luar Kabupaten Blitar lebih prestise dari pada sekolah di Kabupaten Blitar.
- Adanya kebijakan pendidikan gratis di luar Kabupaten Blitar, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di luar Kabupaten Blitar.

Untuk meningkatkan APM di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar terus membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Blitar serta mensosialisasikan prestasi-prestasi sekolah yang ada di Kabupaten Blitar.

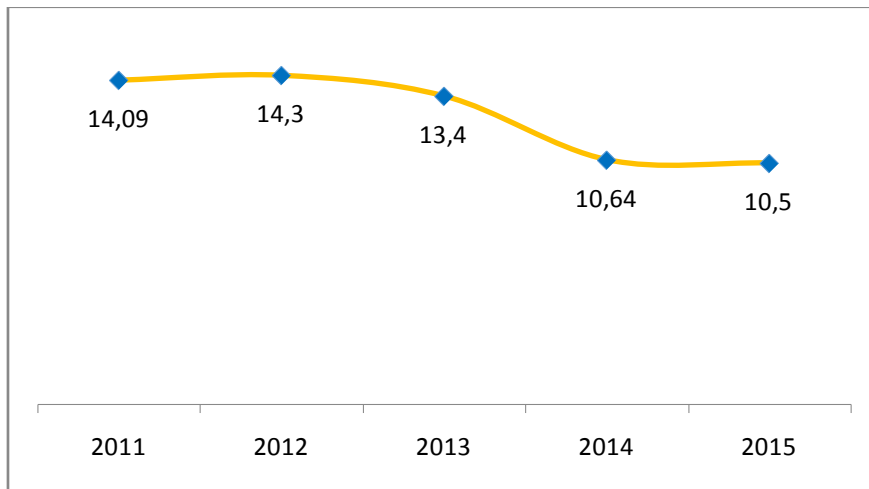
2) Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran

Angka kematian bayi (AKB) ini menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berikut ini disajikan AKB di Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan 2015 yang menunjukkan hal menggembirakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun AKB mengalami penurunan dari 14,09 pada Tahun 2011 menjadi 10,5 pada Tahun 2015.

Gambar 2.14

**Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015**



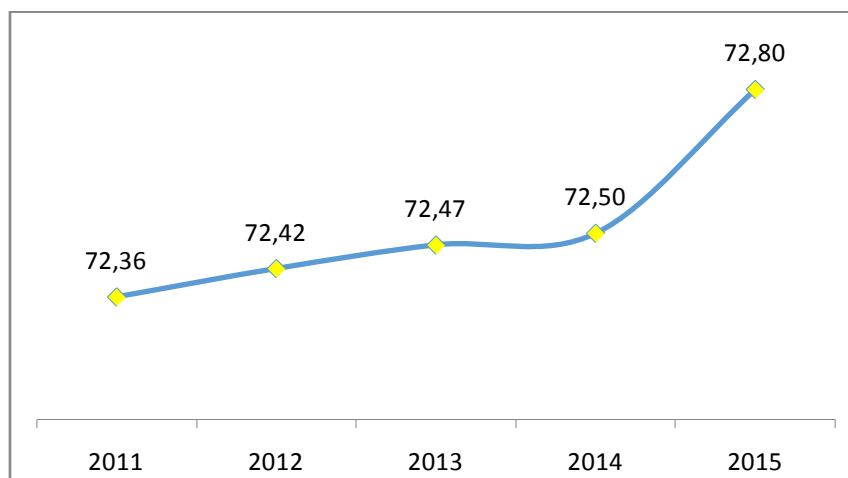
Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

b. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Gambar 2.15

**Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015**



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)



Peningkatan AHH dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

c. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Pada tahun 1999, WHO mengelompokkan wilayah berdasarkan kecamatan untuk level kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk level provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standardisebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada tahun 2011 mencapai 1,6 persen dan terus menurun hingga tahun 2014 (0,9 persen). Akan tetapi angka tersebut mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 1,2 persen. Hal ini dikarenakan sistem pelaporan/surveilans gizi pada tahun 2015 sudah lebih baik dan berbasis online, sehingga pelaporan dan pencatatan penemuan kasus lebih cepat. Namun demikian angka di tahun 2015 tersebut masih berada di bawah capaian angka propinsi (2,2 persen).

Tabel 2.12
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Prevalensi Balita Gizi Buruk	1,6	1,52	1,3	0,9	1,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2016



2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

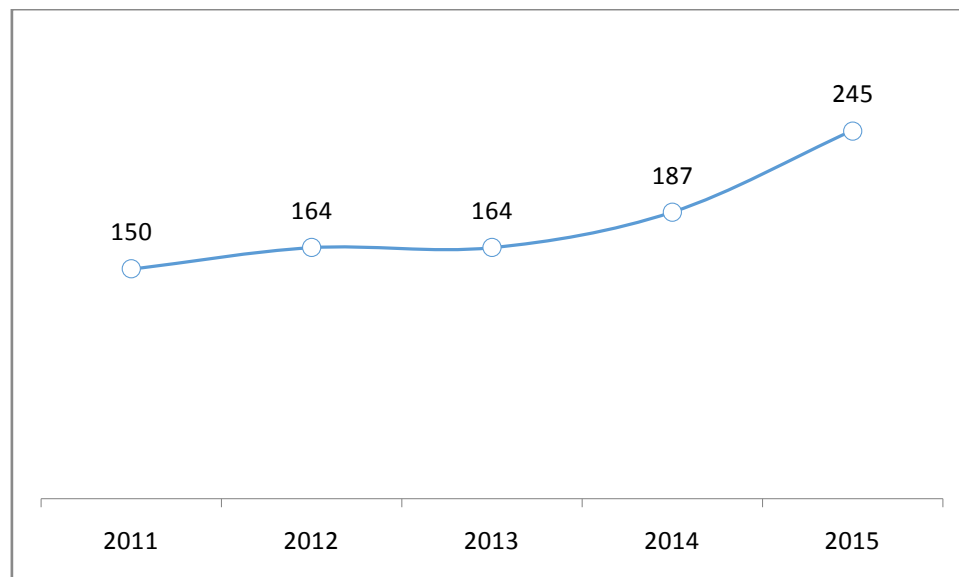
Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosialbudaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

1) Kebudayaan

a. Jumlah Grup Kesenian

Jumlah grup kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 150 grup kesenian yang kemudian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 245 grup kesenian. Berikut adalah tabel jumlah grup kesenian pada Kabupaten Blitar.

Gambar 2.16
Jumlah Grup Kesenian (Grup) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015



Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016 (diolah)

b. Jumlah Gedung Kesenian

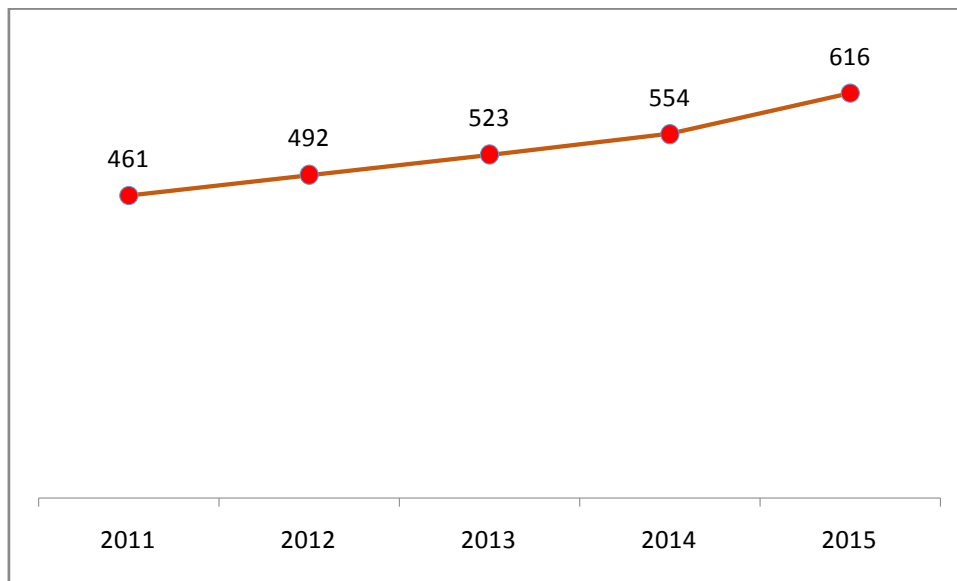
Hingga tahun 2015, di Kabupaten Blitar tercatat baru terdapat sebuah gedung kesenian yang berupa *Ampitheatre* yang berlokasi di Kecamatan Nglegok dan berada di lokasi kawasan Wisata Penataran .

2) Pemuda dan Olahraga

a. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Blitar sejak tahun 2011 mengalami peningkatan dari 461 klub menjadi 616 klub di tahun 2021. Jumlah klub olahraga perlu ditingkatkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa.

Gambar 2.17
Jumlah Klub Olahraga (Klub) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015



Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016

b. Jumlah Sarana/Gedung Olahraga

Hanya terdapat sebuah gedung olah raga di Kabupaten Blitar hingga tahun 2015. Senada dengan indikator sebelumnya, sarana berupa gedung olah raga perlu terus dikembangkan sebagai sarana pengembangan diri pemuda yang merupakan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa.



Tabel 2.13
Jumlah Gedung Olahraga (Unit) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Sarana/Gedung Olahraga	444	444	444	444	444

Sumber: Disporbudpar Kab. Blitar, 2016

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator kinerja kunci yang tercantum pada Permendagri No 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Blitar berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, dan lain sebagainya.

1) Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

a.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. APS SD/MI tahun 2014 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 93,95 persen, dan APS SMP/MTs dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 6,05 persen anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Selanjutnya, anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 23,55 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun dimasa datang. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Blitar untuk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun.



Tabel 2.14

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar

Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APS SD/MI	91	91	93	97	96
APS SMP/MTs	69	69	72	72	75

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar)

Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	1:169	1:172	1:175	1:180	1:180
SMP/MTs	1:267	1:270	1:272	1:275	1:275

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Kabupaten Blitar tercatat perkembangannya cenderung stabil. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk usia SD dan SMP yang terus meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah ruang kelas SD dan SMP di Kabupaten Blitar.

a.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid dihitung melalui perbandingan antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru agar tercapai standar kualitas mutu pengajaran yang baik. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Blitar dengan periode 2011-2015.



Tabel 2.16
Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
- SD/MI	1:16	1:16	1:15	1:11	1:15
- SMP/MTs	1:11	1:11	1:10	1:10	1:15
- SMA/SMK/MA	1:12	1:12	1:10	1:10	1:15

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

b. Pendidikan Menengah

b.1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Kualitas pendidikan juga dapat diketahui dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Dari data yang diperoleh, Kabupaten Blitar memiliki kemampuan untuk menyediakan sekolah pada tingkat menengah lebih baik, dan lebih seimbang, dibandingkan dengan pendidikan dasar. Bahkan realisasi pada tingkat pendidikan menengah sejak tahun 2013 mampu melampaui target.

Tabel 2.17
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah
(Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014
Pendidikan Menengah	0.093056	0.093056	0.097917	0.099306

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

b.2. Rasio Guru Terhadap Murid

Kondisi kecerdasan masyarakat juga ditentukan dengan kualitas guru yang dimiliki. Kualitas guru dapat terlihat dari beban yang ditempuh oleh guru tersebut, sehingga terdapat rasio ideal antara jumlah guru dengan jumlah siswa. Semakin ideal rasio tersebut, maka semakin baiklah pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap masyarakatnya serta semakin berkualitaslah pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Selama 2011-2014, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Blitar belum dapat mencapai target, namun kondisi relatif stabil dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Tabel 2.18
Rasio Guru/Murid (Pendidikan Menengah) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014
SMA/SMK/MA	1:12	1:12	1:10	1:10

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

b.3. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai cara, selain pendidikan formal terdapat beberapa langkah, salah satunya adalah dengan cara pemberantasan buta aksara, sehingga setidaknya masyarakat yang putus sekolah dapat membaca. Tentunya ini akan membantu proses kehidupan masyarakat sehari-hari, dan akan lebih mudah menerima perkembangan.

Tabel 2.19
Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf
(Tidak Buta Aksara) Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
Penduduk >15 tahun melek huruf (buta aksara)	87,68	87,21	85,92	98

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar

Pada tahun 2015, hampir seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas (98%) mampu membaca dan menulis. Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa masih terdapat 14.207 dari 858.986 jiwa yang tidak dapat baca tulis. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya serta melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya program penuntasan buta aksara yang dilakukan secara berkesinambungan bekerjasama dengan mitra organisasi, saling bahu membahu untuk dapat menuntaskan buta aksara di Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan pendukung pencapaian angka melek huruf ini adalah Program pendidikan non formal dilaksanakan antara lain meliputi : (1) Penuntasan Buta Aksara/ Keaksaraan Usaha Mandiri, (2) Sosialisasi Penguatan PKBM selain itu juga disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin tinggi yang didukung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sehingga Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat berjalan dengan optimal dan telah dapat menyelesaikan Program tersebut.



c. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah.

c.1. Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Selain rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru, mutu pendidikan juga dapat dinilai melalui kondisi bangunan yang baik. Di tingkat sekolah dasar, kondisi bangunan baik mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Tabel 2.20
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	83	86	87	87	90

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

c.2. Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Masih diperlukan perhatian ekstra untuk meningkatkan kualitas bangunan sekolah tingkat lanjut meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pilihan masyarakat dalam memilih sekolah di tingkat lanjut.

Tabel 2.21
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
SMP/MTs kondisi bangunan baik	85	85	87	94	92
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	91	90	91	97	93

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

d. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu



pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.22
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96	97	98	98	99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

e. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APS 16-18 = 1% berarti bahwa secara rata-rata dari 10.000 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 100 anak yang putus sekolah.

Tabel 2.23
Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
APS SD/MI	0,005	0,005	0,006	0,001	0
APS SMP/MTs	0,0008	0,0008	0,009	0,001	0
APS SMA/SMK/MA	0,0008	0,0008	0,008	0,001	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang



diselenggarakan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Berikut adalah tabel angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada Kabupaten Blitar

Tabel 2.24
Angka Kelulusan (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kelulusan SD/MI	99	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	88	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95	100	100	100	100

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

Dari tabel tersebut tercatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015, Kabupaten Blitar tercatat bahwa seluruh siswa SD/MI hingga SMA/SMK/MA lulus dengan angka 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Blitar baik siswa dan tenaga pengajar memiliki kualitas yang baik, hal ini diharapkan akan tetap berjalan dengan sangat baik hingga tahun mendatang.

g. Angka Melanjutkan (AM) Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menghitung angka melanjutkan sekolah dilakukan dengan menghitung setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Angka Melanjutkan (AM) Sekolah
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melanjutkan Sekolah Dari SD/MI ke SMP/MTs	90	89	89	90	91
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	55	61	61	60	61

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2014 (90 persen) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10 persen murid yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs.



Sementara itu, angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 tercatat sebesar 60 persen. Hal ini menggambarkan bahwa 40 persen murid tidak melanjutkan bersekolah ke SMA/SMK/MA. Hal ini akan berdampak besar terhadap pembangunan daerah.

h. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi kualitas anak didiknya. Pemerintah pusat menerapkan standar pendidik setara dengan Sarjana atau Diploma IV. Melalui program sertifikasi terhadap tenaga pendidik (guru), pemerintah menginginkan peningkatan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah data tentang guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV pada Kabupaten Blitar hingga tahun 2014.

Tabel 2.26
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Guru SD/SDLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV	54%	54%	60%	80%	82%
Guru SMP/SMPLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV	80%	83%	87%	90%	78%
Guru SMA/SMLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV	88%	88%	92%	99%	99%
Guru SMK yang berkualifikasi akademik S1/D-IV	84%	89%	92%	98%	98%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2016

2) Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari



petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Lokasi posyandu berada tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya, satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita yang berguna untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.27
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
1:70	1:70	1:70	1:61	1:61

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2.28
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
1:38.703	1 : 11.262	1:12.295	1 : 33.563	1:10.908

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan seperti pustu dan dan puskesmas perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk sehingga penduduk di Blitar memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.



c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Nilai rasio rumah sakit menunjukkan perbaikan setiap tahunnya namun angka tersebut masih tercatat relatif kecil sehingga diperlukan penambahan jumlah rumah sakit dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejauh ini, kurangnya jumlah rumah sakit diimbangi dengan jumlah puskesmas beserta jaringannya. Berikut adalah tabel rasio rumah sakit persatuan penduduk.

Tabel 2.29
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Rumah Sakit	1:2.851	1:2.371	1:2.393	1:1.300	1 : 1.517

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter baik umum maupun spesialis per satuan penduduk di Kabupaten Blitar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.30
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio dokter	1:30.410	1:23.966	1:25.260	1:16.750	1 : 10.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2016.

Indikator ini terus menggambarkan trend yang positif dari tahun 2011 hingga tahun 2015 yang menunjukkan bahwa program pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah dokter di Kabupaten Blitar berjalan dengan baik.



e. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk tercatat mengalami peningkatan hingga tahun 2015.

Tabel 2.31
Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio tenaga para Medis	1:1.895	1:1.890	1:1.890	1:1.853	1 : 1.853

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016.

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Menurut definisi operasional dari petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Tabel 2.32
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	79,85	96,6	89,91	80	80

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

Semakin tingginya nilai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan semakin luasnya pelayanan kesehatan yang diberikan.

g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Indikator ini menunjukkan jumlah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



Tabel 2.33
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	98,32	96,6	99	99,89	99,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

Dari seluruh sasaran ibu bersalin di tahun 2015 sejumlah 18.257 orang, hampir seluruhnya melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sisanya ditolong oleh Dukun Bersalin. Angka tersebut tidak memenuhi target, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menargetkan seluruh sasaran ibu bersalin melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan yang berkompeten.

Hal tersebut disebabkan oleh kurang tertibnya administrasi seperti ibu hamil yang mau melahirkan berpindah ke kota lain dan tidak melapor sehingga tidak tercatat. Oleh karenanya, di tahun selanjutnya perlu dilakukan penertiban administrasi, penertiban pendataan bumil, serta pelibatan kader dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan nakes.

h. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, wanita usia subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Data cakupan desa UCI Kabupaten Blitar di bawah ini menunjukkan trend yang positif meskipun masih fluktuatif.

Tabel 2.34
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Desa UCI	63,31	98,39	87,9	93,95	92,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016



i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak usia dibawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Dari data yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2016, sejak 2011 angka cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan telah mencapai 100 persen.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TBC BTA Positif adalah penemuan pasien TBC melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Definisi operasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota, angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TBC BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Berikut adalah tabel cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.35
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	38,95	37,13	30,81	30	32

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun



dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota).

Dari data yang tercatat pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar tahun 2011-2016, angka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD telah mencapai 100 persen sejak tahun 2011.

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pengertian per substansi yang tertulis pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.
- Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.
- Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.
- Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.
- Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.
- Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Tabel 2.36

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar**

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,32	12,08	8,2	8,23	9,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa program pemerintah dalam pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin belum berjalan dengan baik, tetapi sudah membaik sejak tahun 2013.



m. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah persentase bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008). Berikut merupakan angka cakupan kunjungan bayi Kabupaten Blitar sampai 2015.

Tabel 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Kunjungan Bayi	92,73	95,36	89,6	90,02	91,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2016

n. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh puskesmas di Kabupaten Blitar dan jumlah seluruh kecamatan yang ada. Sejak tahun 2011, terdapat 24 puskesmas di 22 kecamatan atau dengan kata lain cakupan puskesmas di Kabupaten Blitar sebesar 109,1%. Dua kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas diantaranya Kecamatan Gandusari yang memiliki Puskesmas Gandusari dan Puskesmas Slumbung serta Kecamatan Ponggok yang memiliki Puskesmas Ponggok dan Puskesmas Bacem.

o. Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Cakupan puskesmas pembantu menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Blitar dan jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada. Sejak tahun 2011, terdapat 68 puskesmas di 248 desa/kelurahan atau dengan kata lain cakupan puskesmas di Kabupaten Blitar sebesar 27,42%.

3) Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota.



Hingga tahun 2015, panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik hanyasebesar 34,4 persen. Dengan melihat data tersebut, program pemerintah daerah yang akan datang perlu difokuskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian Kabupaten Blitar.

Tabel 2.38
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik (%)	43,54	46,65	49,76	47,14	34,4
Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik	62	63	71	73	66

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Disamping itu, melalui program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang berada di bawah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, di tahun 2015, 66% atau 2.891 km jalan lingkungan berada pada kondisi baik dari total 4.400 km jalan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

b. Jaringan Irigasi

Data panjang jaringan irigasi di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015 ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Jaringan Irigasi (Km)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jaringan Irigasi	14.7 Km	20 km	43 Km	65 km	65 km

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan masing-masing tempat ibadah yang ada di Kabupaten Blitar, dibagi dengan jumlah penduduk sesuai agama yang dianut dikali dengan 1000. Angka tersebut di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa penambahan tempat ibadah berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan angka yang berada di kisaran 1.



Tabel 2.40
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	1,01	0,93	1,16	1,19

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015 (Data Diolah)

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan penanganan terhadap sampah domestik. Kegiatan penanganan sampah tersebut dilakukan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 4 lokasi yaitu; Tegalasri, Kesamben, Sutojayan dan Srengat. Dari empat lokasi tersebut TPA Tegalasri menggunakan sistem *control landfill*, sedangkan lokasi yang lain masih menggunakan sistem open dumping. Hingga saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 21 lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan 3 lokasi TPS 3R. Volume sampah domestik yang dapat ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya berkisar 30,61% atau 156,259 m³ per hari sedangkan sisanya sebesar 354,279 m³ belum dapat ditangani.

e. Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan pada tahun 2012 diketahui terdapat 11.408 unit RTLH di Kabupaten Blitar dengan jumlah terbesar berlokasi di Kecamatan Bakung sebanyak 1.032 unit. Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya menindaklanjuti pengentasan RTLH yang dilakukan melalui beberapa cara dengan mengacu pada ketentuan rehab RTLH dari Kemenpera, diantaranya penganggaran melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah yang dilaksanakan Bank Jatim dalam program CSR, serta penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikerjakan oleh Kodim 0808.

f. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat 4.528 km. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tercatat sebesar 4494,78 km dan tidak mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pemerintah daerah belum menjalankan program penambahan jalan yang dilalui roda empat.



Tabel 2.41
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (Km)
Tahun 2011-2014 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat	4528	4494,78	4494,78	4494,78

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2015 (Data Diolah)

g. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada point a, panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik tercatat berkisar antara 40-50% hingga tahun 2015. Capaian ini perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Tabel 2.42
Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik	43,54	46,65	49,76	47,14	45,9

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

h. Drainase Dalam Kondisi Baik

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu drainase merupakan salah satu unsur prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam kondisi baik dihitung dengan melihat panjang drainase yang baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat) dibagi dengan panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten Blitar dikali dengan 100%.

Tabel 2.43
Drainase Dalam Keadaan Baik (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%)	73	77	84	86	52,08

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Di tahun 2015, persentase saluran drainase di jalan kabupaten yang berfungsi baik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang ekstra di tahun selanjutnya karena



pentingnya fungsi dari drainase terutama di jalan kabupaten. Pada tahun 2015 saluran drainase yang berfungsi baik hanya sepanjang 50 Km dari total 96 Km. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar agar saluran drainase berfungsi baik adalah:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan saluran drainase melalui 5 (lima) UPTD yang ada di Kabupaten Blitar (Srengat, Wlingi, Sutojayan, Kesamben, Garum)
- Berusaha menambah anggaran untuk perawatan saluran drainase yang ada

4) Perumahan

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengemban urusan wajib perumahan di Kabupaten Blitar, sekitar 88% rumah tangga di Kabupaten Blitar dapat mengakses air bersih, yaitu 326.337 dari 372.213 rumah tangga. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	51	53	55	57	88

Sumber: Laporan Kinerja Kabupten Blitar, 2015

Dari data di atas tercatat bahwa persentase rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat hingga tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah daerah untuk menambah jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah berjalan dengan baik.

b. Rumah Tangga Bersanitasi

Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Blitar yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar dicatat oleh Dinas Kesehatan sebesar 233.856 dari 333.176 rumah tangga. Sanitasi dasar yang dimaksud berupa sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah



serta sarana pembuangan sampah secara sehat. Secara umum, hal yang paling sulit adalah mengupayakan hidup sehat melalui kepemilikan jamban sehat di rumah tangga. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membuat jamban sendiri menyebabkan masyarakat masih enggan untuk membuat jamban sehat sendiri. Untuk itu melalui event Kabupaten Sehat, Dinas Kesehatan dan jajarannya terus berupaya melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya BAB di Jamban sehat. Berikut adalah tabel rumah tangga bersanitasi

Tabel 2.45
Rumah Tangga Bersanitasi (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Bersanitasi	70	75	70	84,53	70,1

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2015

c. Rumah Tidak Layak Huni

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan pada tahun 2012 menunjukkan terdapat 11.408 unit RTLH di Kabupaten Blitar dengan jumlah terbesar berlokasi di Kecamatan Bakung sebanyak 1.032 unit. Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya menindaklanjuti pengentasan RTLH yang dilakukan melalui beberapa cara dengan mengacu pada ketentuan rehab RTLH dari Kemenpera, diantaranya penganggaran melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, bedah rumah yang dilaksanakan Bank Jatim dalam program CSR, serta penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikerjakan oleh Kodim 0808.

5) Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda

Dokumen RPJPD sangat penting sebagai bahan yang dipedomani dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Blitar saat ini memiliki periode 2005-2025 yang diundangkan pada tahun 2011.



Tabel 2.46
Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada

Penyusunan dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD sangat penting agar pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah dapat diukur dan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lain. Kabupaten Blitar telah menyusun dokumen RPJMD tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Perda.

Tabel 2.47
Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2015 (Data diolah)

6) Perhubungan

a. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum Kabupaten Blitar secara detail dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
85.918	83.618	81.118	79.018	77.118

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016



b. Rasio Ijin Trayek

Rumusan operasional rasio ijin trayek adalah jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
	0,0105	0,0048	0,0032	0,003

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.50
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
3.895	4.145	4.420	4.670	4.910

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

d. Jumlah Terminal

Jumlah terminal Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 tetap, yaitu berjumlah 4 terminal.

Tabel 2.51
Jumlah Terminal di Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
4	4	4	4	4

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

e. Jumlah Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkutan darat tersebut dapat disajikan secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52
Jumlah Angkutan Darat
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
12.509	12.519	13.069	13.744	14.494

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016



f. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum pada Kabupaten Blitar dari Tahun 2011-2015 selalu bertambah. Peningkatan jumlah kepemilikan KIR angkutan umum secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
2.535	2.705	2.874	3.045	3.210

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 tetap. Berikut adalah tabel lama proses pengujian kelayakan angkutan umum (KIR):

Tabel 2.54
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

h. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum setiap tahunnya tidak mengalami perubahan. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.55
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg	45.000 utk >3.500 kg dan 35.000 utk < 3.500 kg

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

i. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu sangat penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi karena rambu-rambu berfungsi memberikan informasi terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi pengendara. Persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Persentase pemasangan



rambu-rambu di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.56
Pemasangan Rambu-rambu
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
20,67%	23,68%	28,54%	32,20%	36,18%

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

7) Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai saat ini penanganan yang dilakukan terhadap sampah masih sebatas sampah domestik. Hingga saat ini volume sampah domestik yang dapat ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang berkisar 30,61 % atau 156,259 m³ per hari sedangkan sisanya sebesar 354,279 m³ belum dapat ditangani.

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator ini dihitung dengan dari jumlah penduduk berakses air minum dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar dikali 100%. Air minum yang dimaksud, menurut Kementerian Kesehatan, merupakan air yang aman untuk dikonsumsi yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, namun terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya lainnya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Secara lengkap persentase penduduk berakses air minum ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk berakses air minum	52	52	100	57	72

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016



c. Pencemaran Status Mutu Air

Persentase Pencemaran status mutu air di Kabupaten Blitar tahun 2015 tercatat 3,70 persen, Oleh karenanya perlu dilakukan program tambahan dari Pemerintah Daerah terkait status mutu air di Kabupaten Blitar di tahun selanjutnya.

Tabel 2.58
Pencemaran Status Mutu Air (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015

Indikator	2014	2015
Pencemaran Status Mutu Air	5%	3,70%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk mengupayakan pembangunan berkelanjutan maka penegakan hukum lingkungan perlu menjadi fokus di tahun tahun mendatang.

Tabel 2.59
Penegakan Hukum Lingkungan (Tindakan)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016

e. Indeks Kualitas Air

Realisasi Indeks Kualitas Air di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Indeks Kualitas Air Kabupaten Blitar
Tahun 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Indek Kualitas Air	-	-	-	-	70

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016

f. Indeks Kualitas Udara

Realisasi Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 2.61
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar
Tahun 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Indek Kualitas Udara	-	-	-	-	94,99

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016

g. Indeks Tutupan Lahan

Realisasi Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar
Tahun 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Tutupan Lahan	-	-	-	-	42,02

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2016

8) Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Persentase Kepemilikan KTP

Salah satu indikator tertib administrasi kependudukan suatu daerah adalah kepemilikan KTP. Adapun kepemilikan KTP oleh penduduk Kabupaten Blitar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun di tahun 2015 mengalami penurunan, yang mungkin disebabkan karena adanya transisi dari KTP konvensional menjadi e-KTP.

Tabel 2.63
Kepemilikan KTP Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Kepemilikan KTP (%)	71%	75%	82%	81%	81%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016



b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran yang diselesaikan 1 tahun di Kabupaten Blitar tercatat menurun dibanding tahun 2011. Oleh karenanya pemerintah daerah harus membuat program agar seluruh masyarakat Kabupaten Blitar memiliki akta kelahiran.

Tabel 2.64
Kepemilikan Akta Kelahiran Yang Diselesaikan 1 Tahun
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	31%	40%	43%	44%	48%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016

c. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kabupaten Blitar telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK untuk mendukung gerakan pemerintah terkait program 1 penduduk hanya wajib 1 NIK.

Tabel 2.65
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2016

9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dilihat untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan telah berprespektif gender. Hingga tahun 2015 partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 85,64% kecil.

Tabel 2.66
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	0	0	0	85	85,64

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016



b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Melihat data di tahun 2015, terlihat bahwa minat perempuan untuk bekerja di lembaga swasta di Kabupaten Blitar cukup tinggi. Oleh karenanya tantangan ini harus disambut positif oleh pemerintah daerah melalui perluasan lapangan usaha guna mengakomodir minat perempuan di dunia kerja.

Tabel 2.67
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	0	0	0	13,55	14,36

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016

c. Persentase KDRT

Persentase KDRT di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 dapat dikatakan cukup tinggi. Namun di tahun 2015, angka ini turun signifikan yaitu 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan berumah tangga dan toleransi dalam rumah tangga masyarakat Kabupaten Blitar semakin membaik. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih sangat perlu untuk meniadakan kasus KDRT di masa yang akan datang.

Tabel 2.68
Persentase KDRT Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase KDRT	20	11	21	18	14

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini memperlihatkan besarnya angkatan kerja perempuan di Kabupaten Blitar. Dengan besarnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2015, menunjukkan besarnya penduduk perempuan Kabupaten Blitar yang bekerja.



Tabel 2.69
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	16.000	17.280	17.728	288.277	329.482

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Kabupaten Blitar menunjukkan penurunan di tahun 2015 meskipun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.70
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	100%	100%	100%	100%	90%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Peserta KB Aktif

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. KB dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Secara *series*, jumlah peserta KB aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menurun kembali di tahun 2015.



Tabel 2.71
Cakupan Peserta KB Aktif
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan peserta KB aktif (%)	72	73	74	75	74

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016

b. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Adapun jumlah rata-rata anak per keluarga di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah 2 anak sesuai dengan moto KB 2 anak lebih baik.

c. Rasio Akseptor KB

Sedangkan rasio Akseptor KB mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Blitar dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.72
Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio akseptor KB	17	17	14	13	11

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016

d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	43%	42%	40%	35%	35%

Sumber: Badan PPKB Kabupaten Blitar Tahun 2016



11) Sosial

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial di Kabupaten Blitar ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.74
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2012-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2012	2013	2014	2015
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	20 Panti Asuhan	21 Panti Asuhan	24 Panti Asuhan	24 Panti Asuhan

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016

b. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Blitar sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 secara detail disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.75
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015

Indikator	2013	2014	2015
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	12,43%	12,02%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016

c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Senada dengan indikator yang telah dibahas pada poin b, penanganan PMKS mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Tabel 2.76
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2014-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2014	2015
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10,58%	21,59%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016

12) Ketenagakerjaan

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Banyaknya masalah ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Sejak tahun 2011 terdapat beberapa kasus sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang dilaporkan dan dapat diselesaikan seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2011-2015
Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
0	8	16	14	22

Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016

Meskipun masih terdapat kegiatan yang tidak dapat teridentifikasi seperti pembinaan syarat kerja, dan pembentukan serikat pekerja di pabrik rokok. Berikut adalah data upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.

Tabel 2.78
Kegiatan Ketenagakerjaan di Lingkup Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
kecelakaan nihil di perusahaan (perusahaan)	6	12	50	68	21
perusahaan yang diawasi (perusahaan)	200	200	200	200	330
perusahaan yang difasilitasi pengembangan kelembagaan (perusahaan)	20	25	30	40	57
perusahaan pengguna perlindungan pekerja perempuan dan anak (perusahaan)	50	40		40	40
penyalur tenaga kerja yang di pantau (perusahaan)	6	12	12	12	100
fasilitasi penetapan UMK (frekuensi)		4		4	4



Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
peningkatan kesejahteraan di industri rokok (perusahaan undangan)				20	0
pembinaan syarat kerja (perusahaan diundang)		10		32	0
pembentukan serikat pekerja di pabrik rokok					0

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Blitar, 2015

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*) tenaga kerja atau disebut juga dengan penduduk usia kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Tabel 2.79
Informasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	847.970	853.260	855.357	876.818	884.420
2	Angkatan Kerja	Orang	590.838	628.120	616.259	606.076	597.639
	a. Bekerja	Orang	569.483	610.130	593.213	587.403	580.982
	b. Pengangguran Terbuka	Orang	21.355	17.990	23.046	18.673	16.657
3	Pencari Kerja Terdaftar	Orang	20.349	21.231	21.688	12.233	4.630
4	Penempatan	Orang	4.511	4.223	4.124	4.106	3.363
5	Penghapusan Pencari kerja	Orang	1.814	3.878	10.796	5.611	1.572
6	Belum ditempatkan	Orang	14.025	13.130	6.768	2.516	3.167
7	Permintaan lowongan	Lowongan	4.676	6.099	5.454	5.101	3.167
8	Dipenuhi	Lowongan	4.511	4.223	4.124	4.106	2.437
9	Penghapusan lowongan	Lowongan	93	1.549	1.287	908	638
10	Sisa Lowongan	Lowongan	72	327	43	87	92
11	TKI yang bekerja ke luar negeri	Orang		3.373	3.946	3.593	3.236

Sumber: BPS dan Disnakertrans Kab. Blitar, 2016



Tabel 2.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
69,68	73,61	72,05	69,12	67,57

Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016

c. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Berikut adalah tabel pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.81
Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
22,17	19,89	19,02	33,56	72,63

Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pun pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.82
Tingkat Pengguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

2011	2012	2013	2014	2015
3,61	2,86	3,74	3,08	2,79

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016



13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.83
Persentase Koperasi Aktif (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase koperasi aktif	55	60	80	58	40

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016.

Data di atas memperlihatkan minat masyarakat Kabupaten Blitar dalam aktivitas koperasi relatif cukup tinggi, sehingga untuk selanjutnya, pemerintah daerah perlu membuat program guna meningkatkan kembali minat masyarakat untuk menggalakan koperasi.

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat 18.644 unit, sementara tahun 2015 tercatat 254.187 unit.

Tabel 2.84
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	18.644	18.644	254.187	254.187	254.187

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016.

c. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil Kabupaten Blitar pada tahun 2011 tercatat sejumlah 18.644 unit, yang kemudian melonjak sangat drastis pada 2015 mencapai 254.187 unit.



Tabel 2.85
Usaha Mikro dan Kecil (Unit)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	18.644	18.644	254.187	254.187	254.187

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2016.

14) Penanaman Modal

Penanaman modal dapat dilihat melalui dua sumber yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA. Jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah investor maka ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah semakin tinggi. Investasi dan penanaman modal yang dilakukan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Investasi yang dilakukan di Kabupaten Blitar lebih banyak ditanamkan pada sektor Pertanian, Peternakan, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.86
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Investor)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	-	-	1	1

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Blitar tercatat mengalami kenaikan yang sangat tinggi seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.



Tabel 2.87
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	1.507.560	-	-	358.200	7.397.352

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2016

15) Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 terdapat peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.88
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)	39	45	47	52	55

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

b. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 terdapat peningkatan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.89
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	10	12	12	15	16

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Blitar melestarikan beragam benda, situs dan kawasan budaya yang di tahun 2015 berjumlah 36 buah.



Tabel 2.90
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30 buah	32 buah	32 buah	34 buah	36 buah

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

16) Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Dari tahun 2011 sampai dengan 2015 Terdapat 27 organisasi kepemudaan di Kabupaten Blitar.

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olah raga mengalami peningkatan dibanding 5 tahun yang lalu yang secara lengkap ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Jumlah Organisasi Olahraga
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah organisasi olahraga	18 cabor	23 cabor	26 Cabor	26 Cabor	28 Cabor

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Hingga tahun 2015, terdapat 4 kegiatan kepemudaan di Kabupaten Blitar. Berikut merupakan tabel jumlah kegiatan kepemudaan Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015

Tabel 2.92
Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	4	4	4	4

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016



d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Blitar sejak tahun 2011 hingga 2015 tidak mengalami perubahan yang bermakna. Secara lengkap data tersebut disajikan oleh tabel berikut.

Tabel 2.93
Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

e. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga dari tahun 2011 sampai dengan 2015 bertambah 2 lapangan dan secara detail ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.94
Lapangan Olahraga (Lapangan)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Lapangan olahraga	442	442	442	444	444

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

17) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Politik, setiap tahun hingga tahun 2015, di Kabupaten Blitar dilakukan 4 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik.

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan terhadap LSM, Ormas dan OKP, hingga tahun 2015 pembinaan politik daerah diselenggarakan dalam 4 sampai dengan 5 kegiatan setiap tahun.



Tabel 2.95
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Kegiatan)
Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	4	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blitar, 2016

18) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Berikut adalah tabel Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.96
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,04 (55 org)	0,62 (70 org)	0,62 (71 org)	0,61 (70 org)	0,6 (69 org)

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

Interpretasi sederhananya adalah, selama kurun 2011-2015, 1 orang Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blitar rata-rata mengawal 20.000 penduduk.

b. Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Berikut adalah tabel jumlah linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar.



Tabel 2.97
Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	15,51 (1.744 org)	15,84 (1.791 org)	59,03 (6.710 org)	65,32 (7.452 org)	71,23 (8.159 org)

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

Berbeda dengan satuan polisi pamong praja, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk relatif mencukupi.

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan bahwa rasio jumlah pos siskamling per desa/kelurahan idealnya adalah 9:1. Dari data yang dihimpun, diketahui bahwa selama tahun 2011 hingga 2015, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blitar selalu mengalami perubahan, sebagaimana tertera dalam Tabel 2.98 berikut:

Tabel 2.98
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

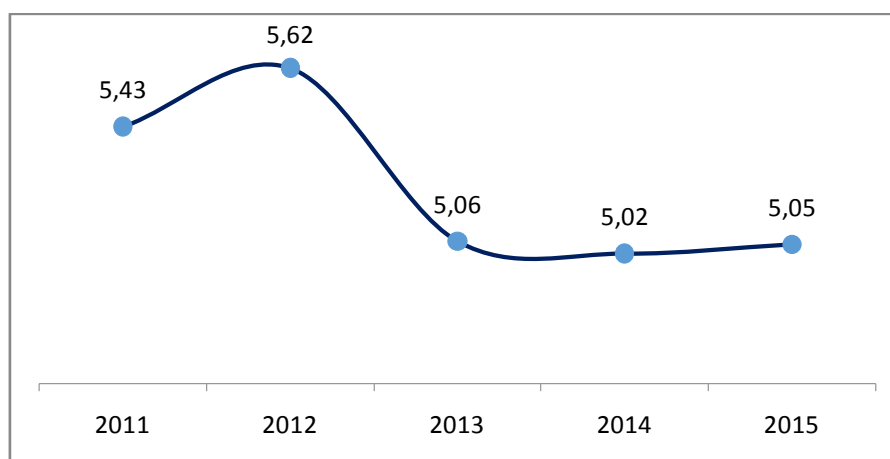
Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,2	0,2	0,2	0,31	0,31

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

d. Pertumbuhan Ekonomi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya secara detail pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, PDRB dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK sudah tidak dipengaruhi perubahan harga, sehingga perubahan PDRB ADHK dari tahun ke tahun, mencerminkan perubahan produksi barang dan jasa, yang lazim disebut pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.18
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

Pada Tahun 2015, perekonomian Kabupaten Blitar tumbuh sekitar 5,05 persen, sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,58 persen. Disusul kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,44 persen serta kategori transportasi dan pergudangan sebesar 6,23 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pergerakan paling lambat adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya tumbuh 0,2 persen.

e. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Garis kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah dari nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori ditambah kebutuhan minimum non makanan untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul Konsumsi.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2006-2014, secara konsisten menunjukkan penurunan. Jika pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 190,4 ribu jiwa, pada tahun 2011 menurun menjadi 126.950 jiwa dan pada tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 116.720 jiwa. Hal yang sama juga tampak pada persentase penduduk miskin menurun secara konsisten selama periode



2006-2014. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin sebesar 17,91 persen, pada tahun 2011 menurun menjadi 11,29 persen dan pada tahun terakhir 2014 menurun lagi menjadi 10,22 persen. Jika dibandingkan, pada periode 8 tahun terakhir (2006-2014) rata-rata penurunan persentase penduduk miskin cukup tinggi sebesar 1.10 persen poin, sedangkan periode 5 tahun terakhir 2009-2014 rata-rata penurunannya menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 0,86 persen poin, dan dalam 3 tahun terakhir periode 2011-2014 penurunannya lebih mengecil lagi rata-rata hanya sebesar 0,36 persen poin. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun secara konsisten tetapi jumlah penurunannya semakin kecil, atau dengan kata lain bahwa penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun makin melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin yang ada mulai semakin sulit dientaskan, atau Kabupaten Blitar mengalami situasi ini apa yang disebut sebagai “*hard core poverty*”.

Dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur tampak bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten lebih berhasil, hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin Kabupaten Blitar sebesar 10,22 persen, sedangkan di Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 Persen.

Selama periode 2011-2014 Garis Kemiskinan (GK) terus naik dari Rp. 210.254,- per kapita per bulan menjadi Rp. 244.382,- per kapita per bulan atau naik rata-rata per tahun sekitar Rp. 11.376,- per kapita per bulan (atau naik sekitar 16,23 persen dalam 3 tahun terakhir). Angka ini berarti kenaikan GK periode 2011-2014 naik rata-rata per tahun sebesar 5.14 persen. Perubahan garis GK terus terjadi seiring perubahan harga (inflasi) kebutuhan bahan pokok konsumsi rumah tangga.

Komoditi yang penting bagi penduduk miskin adalah beras. Berdasarkan komoditas makanan, selain beras, ada 4 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu rokok filter, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan untuk komoditi non makanan di wilayah perdesaan meliputi biaya perumahan, biaya listrik, kayu bakar dan pendidikan. Di daerah perkotaan 5 kontributor terbesar terhadap garis kemiskinan non makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, No.47/07/35/Th.XII, 1 Juli 2014). (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, No.47/07/35/Th.XII, 1 Juli 2014).



f. Penegakan Perda

Pada tahun 2015, terdapat 88 kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani dan diselesaikan dari total 90 kasus. Dua kasus yang belum tersentuh di tahun 2015 ditargetkan dapat diselesaikan di tahun 2016. Berikut adalah tabel penegakan PERDA pada Kabupaten Blitar tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel 2.99
Penegakan Perda (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Penegakan PERDA	80	80	85	100	97,78

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

g. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016. Tercapainya target tersebut, salah satunya didorong oleh semakin intensnya pengamanan dan patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Blitar.

Tabel 2.100
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	1x	2x	2x	2x	2x

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

h. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar

Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.101
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten Blitar (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80	80	85	100	97,78

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016



i. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Berikut merupakan tabel persentase petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015:

Tabel 2.102
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten (%)	0,16	0,16	0,59	0,65	0,71

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016

j. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks kepuasan layanan masyarakat Kabupaten Blitarselama empat tahun terakhir rata-rata mencapai 79,05%. Dengan demikian, masyarakat yang puas akan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mencapai 79,05%. Berikut adalah tabel indeks kepuasan layanan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2011 hingga tahun 2014.

Tabel 2.103
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	73.80%	73.40%	92.40%	76.60%

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Blitar Tahun 2016

k. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Blitar dari tahun 2011-2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.104
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016



1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Berikut disajikan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) dari tahun 2011-2015 :

Tabel 2.105
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	120	90	75	60	45

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016

19) Ketahanan Pangan

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Sejak tahun 2011, Kabupaten Blitar belum memiliki regulasi terkait ketahanan pangan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar di lima tahun kedepan dapat disusun regulasi bidang terkait.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Dari waktu ke waktu ketersediaan pangan utama di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Pada tahun 2015, jumlah ketersediaan bahan pangan utama mencapai 11.910.303 ton. Apabila kebutuhan konsumsi riil pangan utama di Kabupaten Blitar sebesar 482.748,07 ton, maka masih ada surplus yang begitu besar. Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri. Keberhasilan dalam memenuhi ketersediaan pangan utama tersebut dipengaruhi oleh:

- ✚ Keterbukaan petani, terutama yang tergabung dalam kelompok tani, untuk menerima teknologi sehingga pengelolaan pertanian dapat berjalan efektif dan efisien
- ✚ Perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan sarana dan prasarana produksi pertanian, misalnya dalam bentuk hibah barang pertanian ataupun bantuan sosial.

Sementara itu, program kegiatan yang bersumber dari naskah perjanjian kinerja dalam rangka menunjang ketersediaan bahan pangan, di antaranya adalah :



- ✓ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (BK Prop)
- ✓ Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- ✓ Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)
- ✓ Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian
- ✓ Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten.

Berikut adalah persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.106
Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Blitar (%)
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Ketersediaan Pangan Utama	35,1	32,9	33,3	39,2	50,7

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. blitar, 2016

20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2015, jumlah LPM yang ada di Kabupaten Blitar rata-rata sebanyak 248. Data ini dicatat pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016.

Tabel 2.107
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	248	248	248	248	248

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016



b. Posyandu

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pada tahun 2014, jumlah Posyandu aktif yang ada di Kabupaten Blitar mencapai 1462 unit, atau bertambah 3 unit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan balita.

21) Statistik

a. Buku “Blitar Dalam Angka” dan Buku “PDRB Blitar”

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Blitar, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

22) Kearsipan

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan, 70% arsip dikelola secara baku. Target tersebut dipenuhi di tahun 2013 dan 2014, dengan capaian masing-masing sebesar 73% dan 70%. Sementara di tahun yang lain, termasuk tahun 2015, baru mampu menyentuh angka 60-an%. Berikut adalah tabel pengelolaan arsip secara baku

Tabel 2.108
Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)
Tahun 2011-2015 Kabupaten Blitar

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pengelolaan Arsip Secara bAKU	65	68	73	70	60

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016



23) Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Berikut adalah tabel jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.109
Jumlah Jaringan Komunikasi di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	4	4

Sumber: Dishubkominfo, 2016

b. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk adalah perbandingan antara jumlah wartel/warnet dengan jumlah penduduk. Rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,030	0,032	0,034	0,035	0,38

Sumber: Dishubkominfo, 2016

c. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah surat kabar nasional/lokal	8	8	9	10	10

Sumber: Dishubkominfo, 2016

d. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/tv lokal yang masuk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 secara detail disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.112
Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal di Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penyiaran radio/tv lokal	28	28	28	28	28

Sumber: Dishubkominfo, 2016

e. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik pemerintah daerah di Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel jumlah website milik pemerintah daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015:

Tabel 2.113
Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Website milik pemerintah daerah	21	25	40	49	59

Sumber: Dishubkominfo, 2016

f. Pameran atau Expo

Pameran/expo adalah ajang promosi. Melalui pameran, dunia luar akan mengenal suatu daerah berikut produk-produk unggulannya. Hal ini penting untuk mendukung kesuksesan pembangunan daerah. Dari data yang ada, selama kurun 2011 hingga 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah menyelenggarakan pameran rata-rata sebanyak 1 kali.

Tabel 2.114
Pameran/Expo (Kegiatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pameran/expo					1

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.



1) Pertanian

a. Produksi Padi

Produksi padi tahun 2015 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara detail hal tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.115
Produksi Padi Kabupaten Blitar (Ton) Tahun 2012-2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
Produksi Padi	308.256	318.154	329.798	351.348

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan UPSUS padi yang bekerjasama dengan TNI AD dalam Program Swasembada Beras 2017 serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang dilakukan. Beberapa langkah lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi sebagai sumber pangan utama di Kabupaten Blitar yaitu:

1. Indeks penanaman padi dari satu kali panen menjadi dua kali lebih panen dalam setahun;
2. Peningkatan sarana irigasi dari setengah teknis ke teknis penuh, dari sederhana ke teknis dan dari irigasi desa menjadi irigasi teknis PU;
3. Peningkatan mutu intensifikasi lahan sawah.

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan tahun dasar penghitungan PDRB, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, maka capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan. Namun demikian, secara garis besar kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Blitar dapat dijelaskan melalui deskripsi di bawah ini.

Sebagai daerah yang berbasis pertanian, hasil produksi pertanian terutama tanaman pangan, memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar. Sebagai *leading sector* perekonomian Kabupaten Blitar seperti yang telah dibahas pada bab I, pergerakan sektor Pertanian memerlukan perhatian ekstra. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa peranan



sektor tersebut diambil alih oleh sektor yang lain. Di satu sisi hal tersebut cukup menggembirakan karena terdapat suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam.

Di sisi lain, penurunan kontribusi sektor pertanian merupakan sinyal melemahnya kegiatan pertanian yang ada. Hal ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan upaya peningkatan produktivitas baik dari sisi lahan maupun dari sisi petani itu sendiri. Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian bahwa di era pasar bebas (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini, dimana arus barang dan jasa bebas keluar-masuk pada suatu wilayah, selain mempersiapkan *human capital* yang berkualitas, Kabupaten Blitar perlu tetap menjaga kontinuitas kontribusi sektor pertanian sekaligus mendorong kemajuan industri pengolahannya di Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian yang didukung dengan industri pengolahan yang memadai dapat menghasilkan *tradable goods* yang mampu mendatangkan pendapatan/ devisa bagi daerah.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus berupaya mengambil kebijakan yang pro terhadap petani diantaranya:

1. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan Pendamping Anti Poverty Program (APP) pertanian.
2. Program peningkatan ketahanan pangan dengan output berupa terbangunnya prasarana pertanian yaitu jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur pantek dalam, pipanisasi, embung.
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Dalam implementasi program-program tersebut di atas, ditemukan beberapa kendala antara lain :

1. Belum sinkronnya Program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan antar instansi terkait.
2. Belum tertibnya administrasi kelompok tani sehingga pendistribusian benih, pupuk, obat-obatan dan juga pinjaman sering menemui hambatan.
3. Masih adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan teknis pengadaan bantuan peralatan pertanian menyangkut pihak ketiga.
4. Masih kurangnya kesadaran petani untuk ikut memelihara jaringan irigasi sehingga banyak petani di daerah hilir yang kekurangan air.



Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala di atas yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi selaras dan menghasilkan output yang maksimal.
2. Melakukan pendekatan dan dialog serta pendampingan oleh tenaga penyuluh agar dapat terwujud tertib administrasi sehingga kegiatan kelompok tani dapat berjalan dengan lancar.
3. Lebih selektif dalam menunjuk rekanan pelaksana kegiatan dan mengajukan klaim atas kerugian yang terlanjur terjadi.
4. Membentuk kelompok-kelompok petani pemakai air dan meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya menjaga jaringan irigasi.

Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Tabel 2.116
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	45,54	46,94	43,74	43,02	40,12

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

2) Kehutanan

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Lahan kritis yang dimaksud merupakan luas areal lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Kinerja indikator ini berpredikat **Sangat Berhasil** dengan realisasi sebesar 3,66%. Kawasan hutan di Kabupaten Blitar mencapai 36% dari total luas wilayah Kabupaten Blitar atau 57.327,1 ha dari 158.879 ha. Sampai tahun 2015 luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Blitar sebesar 6.579 ha yang secara detail disajikan pada Tabel 3.12. Untuk terus meminimalisir luasan lahan kritis tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar terus berupaya untuk merehabilitasi hutan melalui pembangunan hutan rakyat dan kebun bibit rakyat (KBR).



Tabel 2.117
Luas Lahan Kritis Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Luas lahan kritis	9,95	9,09	9,81	6,72	3,66

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Tabel 2.118
Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)
Menurut Kecamatan Tahun 2015 (%)
Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN KRITIS (2009)	TELAH DITANGGULANGI MELALUI RHL HUTAN RAKYAT DAN KBR						JUMLAH RHL	SISA LAHAN KRITIS
			2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Wates	1.077	103	37	80	184	80	10	494	583
2	Binangun	352	129	216	-	-	140	20	505	-
3	Panggungrejo	3.223	173	312	150	90	160	60	945	2.278
4	Sutojayan	20	-	-	-	-	-	-	-	20
5	Wonotirto	2.018	-	30	60	102	80	10	282	1.736
6	Bakung	2.186	102	254	75	204	100	30	765	1.421
7	Kademangan	1.248	178	142	75	244	110	115	864	384
8	Srengat	69	23	-	10	-	-	10	43	26
9	Ponggok	38	-	20	10	20	-	10	60	-
10	Gandusari	6	-	-	-	15	10	30	55	-
11	Wingi	151	-	-	-	-	10	10	20	131
12	Doko	228	24	-	25	164	10	60	283	-
13	Kesamben	222	82	46	50	35	60	10	283	-
14	Selorejo	156	72	37	25	20	50	30	234	-
JUMLAH		10.994	886	1.094	560	1.078	810	405	4.833	6.579

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

b. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB pada Kabupaten Blitar



Tabel 2.119
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,62	0,63	0,62	0,61	1,11

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Sama seperti halnya indikator yang terkait dengan PDRB (indikator 3), perubahan tahun dasar penghitungan PDRB dari 2000 ke 2010, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, menyebabkan capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan. Berikut ini disajikan perkembangan produksi hutan rakyat Kabupaten Blitar tahun 2014 - 2015 :

Tabel 2.120
Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015 (m³)

No.	Jenis Kayu	2014	2015
		Produksi (m ³)	Produksi (m ³)
1.	Jati	20.060,090	20.375,500
2.	Rimba	89.077,234	94.328,100
Jumlah		109.137,324	114.703,600

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

3) Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Pada tahun 2015, laporan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kab. Blitar menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata dari 1.161.075 kunjungan di tahun 2014 menjadi 1.560.015 kunjungan di tahun 2015.



Tabel 2.121
Kunjungan Wisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Kunjungan)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan wisata	567.582	1.938.118	1.125.025	1.161.075	1.560.015

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar Tahun 2016

Peningkatan jumlah kunjungan wisata tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

- ❖ Animo masyarakat yang meningkat, dengan kata lain masyarakat sudah peduli dengan kebutuhan untuk berwisata,
- ❖ Keberhasilan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Disporbudpar Kab. Blitar. Upaya tersebut antara lain:
 1. Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan wisata, sehingga kebutuhan pengunjung wisata dapat terpenuhi.
 2. Penataan kawasan wisata yang menarik, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman.
 3. Penambahan wahana di tempat wisata, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisata.
 4. Promosi pariwisata baik melalui media massa, kegiatan pementasan seni budaya dan event-event pameran.
 5. Pengembangan dan penambahan destinasi pariwisata, sehingga masyarakat mempunyai banyak alternatif dalam berwisata.

4) Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah produksi perikanan terhadap target daerah dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 2.122
Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan	134	102	93,4	80,9	104,5

Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016



Perikanan berasal dari perikanan tangkap yang bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum darat (PUD) serta perikanan budidaya yang keduanya memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel perbandingan produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.123
Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan Tangkap	12,92	14,98	19,08	11,9	13,8
Produksi Perikanan Budidaya	87,08	85,02	80,92	88,1	86,2

Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016

Secara umum, hasil produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam mulai dari cuaca, besarnya gelombang, overfishing, rusaknya habitat terumbu karang sampai pada naiknya harga BBM. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang mendukung keberlanjutan lingkungan, antara lain :

- ✓ Memberikan pembinaan peningkatan kesadaran perundang-undangan yang berlaku tentang penangkapan ikan antara lain larangan penggunaan kompresor dan potas untuk menangkap ikan.
- ✓ Memasang papan peringatan penggunaan alat bantu yang dilarang untuk menangkap ikan.
- ✓ Memberikan bantuan alat tangkap dan perahu kepada nelayan.

Upaya di atas dilaksanakan melalui kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, yaitu :

- Pengembangan Sarana dan Perasarana Pendukung Perikanan Tangkap
- Pendataan dan Pelaporan Produksi Perikanan Tangkap dan Potensi Pesisir dan PUD

Tentang produksi perikanan budidaya, pemerintah daerah terus mendongkrak produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar seperti



ditunjukkan oleh tabel di atas, dilaksanakan program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan beberapa kegiatan diantaranya:

- a) Pembangunan Balai Benih Ikan (DAK dan Pendampingan DAK)
- b) Pendampingan Sertifikasi hak atas Tanah pembudidaya ikan
- c) Pengadaan Sarana Perbenihan Untuk Balai Benih Ikan (Silpa DAK 2014)
- d) Pendampingan Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP)
- e) Pemantauan dan Temu Teknis Pengendalian Serangan Penyakit Ikan
- f) Optimalisasi Balai Benih Ikan.

Berikut adalah tabel produksi ikan budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014-2015.

Tabel 2.124
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Blitar Tahun 2014 dan 2015

No	Media	Jenis Ikan	2014	2015
			Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
1	Kolam	Mas	14,4	15,5
		Nila	2.916,0	76,1
		Mujair	3,9	0,4
		Gurami	2.501,5	6.188,0
		Tawes	4,4	0,3
		Lele	3.767,0	7.839,0
2	Sawah (Mina Padi)	Nila	4,7	4,1
		Mas	-	0,2
3	Karamba	Nila	0,4	0,4
4	Jaring Apung	Mas	6,4	3,2
		Nila	20,3	17,6
5	Tambak	Udang Vaname	494	497,7
Jumlah			9.733,0	14.642,4

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015



b. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Melalui program pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan bantuan kepada kelompok nelayan. Secara umum, proporsi nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.125
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

2011	2012	2013	2014	2015
71,43	3,12	0	13,51	0

Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016

c. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan sama artinya dengan produksi perikanan kelompok nelayan.

Tabel 2.126
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

2011	2012	2013	2014	2015
12,92	14,98	19,08	11,9	13,08

Sumber: DKP Kab. Blitar, 2016

5) Perdagangan

a. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Blitar. Capaian cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Pada tahun 2011 Kabupaten Blitar tercatat 5 persen lalu hingga tahun 2015 tercatat 6%, hal ini masih jauh dari target pada Tahun 2015 yaitu 11%. Maka dengan ini pemerintah daerah perlu membuat program agar kelompok pedagang atau usaha informal dapat lebih maju lagi di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.127
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	5	7	9	9	6

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

6) Perindustrian

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 2.128
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2,44	2,40	2,40	2,39	12,86

Sumber: Laporan Kinerja Kabupaten Blitar 2015

Serupa dengan indikator sebelumnya (indikator 3 dan 8), perubahan tahun dasar penghitungan PDRB dari 2000 ke 2010, serta belum dilakukannya penyesuaian terhadap angka yang ditargetkan yang masih menggunakan tahun dasar 2000, menyebabkan capaian dari indikator yang berhubungan dengan PDRB tidak dapat diperbandingkan.

Namun dapat dilaporkan bahwa untuk meningkatkan geliat perekonomian Kabupaten Blitar melalui sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program antara lain:

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 3) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- 4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial.



7) Ketransmigrasian

a. Transmigran yang diberangkatkan

Berikut disajikan jumlah keluarga di Kabupaten Blitar yang diberangkatkan dalam program transmigrasi sejak tahun 2011-2015.

Tabel 2.129
Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (KK)

2011	2012	2013	2014	2015
18	14	19	5	14

Sumber: Disnakertrans Kab. Blitar, 2016

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang. Data yang tersedia untuk menjelaskan sub bab ini tidak cukup banyak, serta data untuk mengetahui capaian sumber daya manusia tidak tersedia sehingga tidak dapat diketahui capaiannya. Capaian dari aspek daya saing daerah dapat diketahui dari ketiga fokus berikut ini.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator ini merupakan fokus pertama yang dinilai untuk melihat capaian daya saing daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu



rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2011 tercatat Rp 646.740 lalu hingga tahun 2015 tercatat Rp. 660.250. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada Kabupaten Blitar.

Tabel 2.130
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribuan Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	646,74	657,23	659,12	660,03	660,25

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita

Capaian kinerja Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita pada tahun 2011 tercatat Rp. 310.110, lalu tahun 2012 tercatat Rp. 316.460, lalu pada tahun 2015 tercatat Rp. 323.790. Berikut adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per Kapita dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 2.131
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (Ribuan Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan (Ribuan Rupiah)	310,11	316,46	321,32	322,42	323,79

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

2) Pertanian

a. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir walaupun peningkatannya tidak terlalu pesat. NTP pada Tahun 2013 sebesar 104,59 sedangkan Tahun 2014 mencapai 104,75.



Tabel 2.132
Nilai Tukar Petani Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Indikator	2012	2013	2014
Nilai Tukar Petani	103,83	104,59	104,75

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Blitar mencatat bahwa perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.133
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
3,11	2,98	2,89	2,74	2,63

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

b. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Berikut merupakan data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum yang tercatat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Blitar sejak tahun 2011.

Tabel 2.134
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2015 di Kabupaten Blitar

2011	2012	2013	2014	2015
88.268	85.268	82.618	79.818	77.118

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016



c. Jumlah Orang/Barang melalui Terminal

Data jumlah orang/barang melalui terminal tercatat sama dengan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Artinya, seluruh orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dipastikan melalui terminal.

Tabel 2.135
Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
88.268	85.268	82.618	79.818	77.118

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

2) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Capaian jenis, kelas dan jumlah restoran pada Kabupaten Blitar tahun 2011 tercatat sejumlah 4, tetapi baru tercatat datanya kembali yaitu pada tahun 2014 dengan tercatat hanya terdapat 1 buah restoran di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.136
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014
Restoran/Rumah Makan & Bar/Café	4	-	-	1

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

b. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/losmen/hotel di Kabupaten Blitar tercatat pada tahun 2011 sejumlah 5 unit, lalu tahun 2012 tercatat 2, kemudian tahun 2014 kembali naik menjadi 5 unit, tetapi pada tahun 2015 hanya berjumlah 2 unit saja. Berikut adalah tabel jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Blitar.



Tabel 2.137
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Perhotelan/Losmen/Penginapan	5	2	3	5	2

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

3) Lingkungan Hidup

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga.

Tabel 2.138
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	28.081	21.181	40.357	24.882	51.263

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016

Dari data di atas tercatat bahwa rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dengan tahun 2011 tercatat 28.081 rumah tangga pengguna air bersih, lalu naik pada tahun 2013 menjadi 40.387 rumah tangga yang menggunakan air bersih. Lalu tahun 2015 mencapai 51.263 rumah tangga yang menggunakan air bersih. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah daerah untuk menambah jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah berjalan dengan baik.

4) Komunikasi dan Informatika

a. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Penduduk pengguna HP/Telepon semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.



Tabel 2.139
Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Pengguna HP/Telepon
Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015
40	45	50	67	70

Sumber: Dishubkominfo Kab. Blitar, 2016

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Blitar, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Blitar semakin tidak aman, dan demikian sebaliknya. Seluruh tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Blitar sampai tahun 2015 yang dilaporkan secara keseluruhan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang (100 persen).

b. Jumlah Demo

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mencatat terjadinya demo di kabupaten Blitar yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.140
Jumlah Demo di Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015

2013	2014	2015
15	13	16

Sumber: Satpol PP Kab. Blitar, 2016



c. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Indikator ini digunakan untuk melihat persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Indikator ini tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Blitar Tahun 2011-2016 bahwa capaian dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah 1 persen.

d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Berikut disajikan jumlah dan macam pajak dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2015 :

Tabel 2.141
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

Indikator	Ket	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak	9	9	9	10	10
	Retribusi	26	22	22	21	34

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1) Ketenagakerjaan

a. Rasio Ketergantungan

Secara konseptual rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tingginya *persentase dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Dependency ratio Kabupaten Blitar pada Tahun 2014 adalah 50,10. Nilai ini menunjukkan bahwa dari 100 orang usia kerja (dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50 orang yang belum atau dianggap sudah tidak produktif lagi.

Tabel 2.142
***Dependency Ratio* di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014**

Indikator	Tahun		
	2012	2013	2014
Dependency Ratio	51,82	50,09	50,10

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016



BAB GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pasal 36 ayat 1, yang menjadi salah satu parameter kapasitas daerah yaitu terletak pada keuangan daerahnya. Perkembangan regulasi maupun teori terkait keuangan daerah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut terjadi agar daerah mampu lebih baik lagi *manage* keuangan yang dimiliki melalui perencanaan yang matang.

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah adalah



dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta.

Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

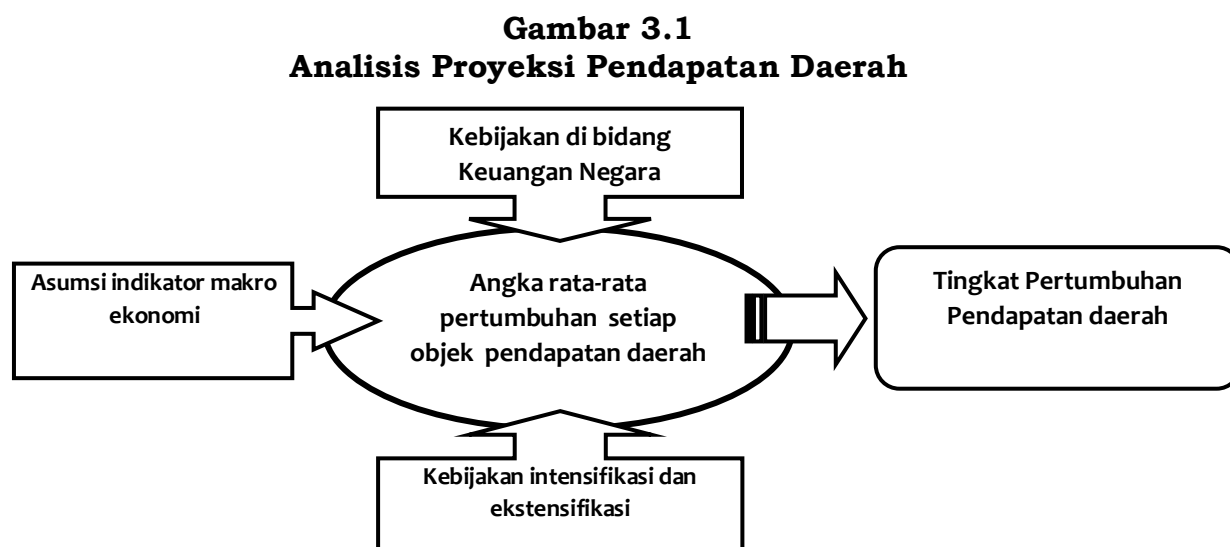
Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan Kerangka Kebijakan Menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 harus meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan terpadu (*Unified Budgeting*) serta penyusunan anggaran yang berbasis data.

Pada kerangka keuangan ini analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat.



3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Secara umum realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Adapaun peningkatan pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan komponen belanja daerah terdiri kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk Belanja Pegawai juga dialokasikan untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2011-2015 rata-rata meningkat sebesar 13,08% setiap tahunnya. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2011-2015 rata-rata mencapai 87,4% sehingga masih terdapat penghematan rata-rata 11,6% setiap tahunnya dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran (SILPA).

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:



a) Pendapatan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar periode 2011-2015, jika dilihat melalui aspek pendapatan daerah, Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor peningkatan tersebut disebabkan oleh kemampuan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir ini rata-rata yaitu sebesar 24,51%, kemudian disusul oleh lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 19,31%, dan yang terakhir adalah dana transfer sebesar 9,95%. Kondisi pertumbuhan PAD dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain berdasarkan tabel 3.1 adalah sumber pendapatan yang peningkatan persentasenya paling tinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki kemampuan dalam membangun kemandirian daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

(dalam jutaan)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan(%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN DAERAH	1,237,994	1,381,016	1,604,230	1,927,307	2,002,534	12.9
Pendapatan Asli Daerah	76,191	96,266	115,671	188,422	176,939	25.8
Pajak daerah	17,455	18,817	21,857	47,935	43,783	33.7
Retribusi daerah	13,417	17,482	20,565	23,965	19,207	11.2
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1,249	1,413	1,573	1,608	2,488	20.3
Lain-lain PAD yang sah	44,069	58,554	71,676	114,915	111,461	28.1
Dana Perimbangan	851,193	972,235	1,088,238	1,161,110	1,231,046	9.7
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	63,571	76,053	73,618	62,441	119,487	23.2
Dana alokasi umum	697,650	845,118	944,298	1,027,252	1,037,911	10.7
Dana alokasi khusus	89,972	51,064	70,323	71,417	73,648	-0.2
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	310,610	312,515	400,321	577,775	594,549	19.0
Hibah	-	-	-	-	-	-
Dana darurat	-	-	-	-	-	-



Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan(%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	59,254	58,616	71,873	122,311	103,349	19.1
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	215,928	204,003	276,728	341,877	395,114	17.3
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	35,427	49,896	51,720	113,588	96,086	37.2

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir ini berdasarkan sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun ada kecenderungan mengalami peningkatan, tetapi masih ada beberapa wajib pajak/retribusi daerah yang masih perlu diintensifkan.
- b. Kinerja dan tanggung jawab unit-unit Pengelola Pendapatan Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang belum memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun.
- c. Masih adanya subyek pajak/retribusi daerah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang terkait dengan pembayaran pajak atau retribusi daerah, sehingga pengendalian dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih ada beberapa Perkada mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat.
- e. Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan.
- f. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi.



2. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah.
- b. Keterlambatan penetapan penetapan Pagu Dana Perimbangan, Dana Bagi hasil dari propinsi menyulitkan penyusunan APBD atau Perubahan APBD.

Berdasarkan uraian diatas dalam pelaksanaan APBD untuk ke depannya memiliki beberapa potensi dan tantangan baik secara nasional maupun regional. Adapun Potensi dan tantangan itu adalah sebagai berikut:

Nasional

a. Potensi

1. Hadirnya MEA di tahun 2015 akan menjadi potensi bagi Indonesia dalam peningkatan perekonomian
2. Konektivitas untuk menyatukan Indonesia memerlukan 2.000 Km tol, 3.258 Km rel kereta api, 15 bandara dan 24 pelabuhan baru.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan bahwa proyeksi potensi investasi 'hijau' untuk investor asing dan investor dalam negeri akan tumbuh dengan rata-rata 20 persen per tahun hingga tahun 2019.

b. Tantangan

1. Pertumbuhan perekonomian tidak sesuai harapan.
2. Kebakaran hutan menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
3. Kondisi APBN yang cenderung defisit.
4. Laju pertumbuhan inflasi yang masih tinggi.

Regional

a. Potensi

1. Revisi berbagai regulasi yang akan lebih sesuai dengan kondisi daerah.
2. Potensi peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor, baik melalui PAD maupun lain-lain pendapatan yang sah cukup tinggi.



3. Peningkatan data kualitas PDRB melalui perubahan tahun dasar PDRB menjadi tahun 2010.

b. Tantangan

1. Pertumbuhan perekonomian yang melambat.
2. Laju inflasi yang terus meningkat.
3. Belum optimalnya kinerja keuangan unit-unit pengelolaan Pendapatan daerah.
4. Kesadaran wajib pajak yang perlu diintensifkan lagi.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Komponen Belanja terdiri dari : Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pada tabel berikut disajikan Realisasi Belanja Daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

(dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
	BELANJA DAERAH	1,158,439	1,372,247	1,637,252	1,803,201	2,072,629	15.71
2,1	Belanja Tidak Langsung	796,070	901,987	997,070	1,087,688	1,262,648	12.26
2,1,1	Belanja Pegawai	711,484	828,516	919,879	1,000,407	1,014,179	9.40
2,1,2	Belanja Bunga	-	-	-	10	-	-
2,1,2	Belanja Hibah	15,513	21,044	20,876	28,192	56,263	42.37
2,1,3	Belanja Bantuan Sosial	17,166	6,757	3,721	3,348	675	-48.86
2,1,4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,402	1,115	5,726	7,834	10,207	115.07
2,1,5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provisnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47,787	43,940	46,450	45,331	181,324	73.81
2,1,6	Belanja Tidak Terduga	2,719	615	417	2,567	-	76.58
2,2	Belanja Langsung	362,369	470,260	640,183	715,513	809,981	22.72
2,2,1	Belanja Pegawai	45,577	47,219	39,487	15,893	18,587	-13.89



No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
2,2,2	Belanja Barang dan Jasa	156,403	198,620	269,882	314,360	283,062	17.35
2,2,3	Belanja Modal	160,389	224,421	330,813	385,260	508,332	33.93

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015

Berdasarkan tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011 -2015 realisasi Belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,71%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,26%. Belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,40%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 22,72%. Komponen Belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,93%.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Blitar
Tahun 2011-2015

(dalam jutaan)

Uraian	Realisasi (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
PEMBIAYAAN DAERAH	61,443	134,383	141,596	100,652	235,553	57.30
Penerimaan Pembiayaan	62,523	141,985	143,596	108,826	235,555	55.12
Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	59,807	140,998	142,669	108,574	225,163	55.11
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,716	503	435	252	218	-37.69



Uraian	Realisasi (Rp)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	484	492	-	-	-49.11
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	10,174	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,080	7,601	2,000	8,174	1	184.74
Pembayaran Pokok Utang	1,080	976	-	-	1	-54.81
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	6,625	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	2,000	8,174	-	104.34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	140,998	142,669	108,574	225,163	284,513	27.76

Sumber: Ringkasan Realisasi APBD 2011-2015

Memperhatikan tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 57,30%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 55,12%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan sebesar 184%.

3.1.2. Neraca Daerah

Selain melihat progress pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa lampau juga dapat dilihat melalui neraca daerah. Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait dengan harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kabupaten Blitar mengalami hal yang positif dikarenakan bnyak aspek yang mengalami peningkatan, namun disisi lain terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali karena mengalami penurunan, seperti persediaan, investasi non permanen, penyesihan dana bergulir tak tertagih, tanah, pendapatan yang ditangguhkan. Terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan sebuah kebijakan untuk menanggulangnya agar tidak menjadi persoalan di periode selanjutnya.



Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2015

No.	Uraian	Pertumbuhan
1	ASET	15.43
1.1.	ASET LANCAR	24.67
1.1.1.	Kas	41.5
1.1.2.	Piutang	1,524.24
1.1.3.	Persediaan	-6.59
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	0.52
1.2.1.	Investasi Non Pemanen	-45.39
1.2.2.	Investasi Pemanen	0.54
1.2.3.	Penyisihan Dana Bergulir tak Tertagih	-45.39
1.3.	ASET TETAP	15
1.3.1.	Tanah	-0.06
1.3.2.	Peralatan dan mesin	20.68
1.3.3.	Gedung dan bangunan	9.9
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	24.41
1.3.5.	Aset tetap lainnya	8.02
1.3.5.	Konstruksi dalam pengerjaan	272.24
1.3.6.	dst.....	-
1.4	ASET LAINNYA	2.37
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	50
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-
1.4.4.	Aset tak berwujud	60.01
1.4.5.	Aset lain-lain	0.37
	JUMLAH ASET DAERAH	15.43
2	KEWAJIBAN	61.86
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	61.86
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-98.41
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4.	Utang jangka pendek lainnya	66.79
3	EKUITAS DANA	14.44
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	15.44
3.1.1.	SILPA	41.75
3.1.2.	Cadangan piutang	0.17
3.1.3.	Cadangan persediaan	-6.59
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	66.79
3.1.5.	Pendapatan ditangguhkan	-11.69
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	14.6
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	15



No.	Uraian	Pertumbuhan
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	2.37
3.2.3.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0.52
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	14.41

*Data diolah dari LKD 2012-2014

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa Aset yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi terletak pada aset lancar yaitu sebesar 24,67%, sementara kondisi pertumbuhan untuk investasi jangka panjang hanya sebesar 0,52% dan aset tetap sebesar 15%. Kemudian untuk menjalankan kehidupan pemerintahan Kabupaten Blitar juga ditopang oleh dana cadangan dan SILPA. Sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah. Pertumbuhan kewajiban tersebut tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 61,86%, lebih dari 50%, yang sangat tidak berimbang dan sebanding dengan pertumbuhan kekayaan yang dimiliki oleh kabupaten Blitar yaitu sebesar 15.43%. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi pelaksanaan APBD ke depannya.

Dari analisis kekayaan daerah Kabupaten Blitar tersebut, maka untuk lebih jelasnya, dapat dilihat rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2012-2015

NO	Uraian	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)	25,41	18,40	26,14	25,05
2.	Rasio quick (quick ratio)	23,89	17,14	24,86	22,03
3.	Rasio total hutang` terhadap total asset	0,19	0,27	0,21	0,38
4.	Rasio`hutang` terhadap modal	0,19	0,27	0,21	0,38
5	Rata-rata umur piutang	3,43	4,21	4,73	9,01
6	Rata-rata umur persediaan	1,97	3,31	3,88	3,44

*Data diolah dari berbagai sumber tahun 2015



Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2012-2015 mempunyai nilai lebih dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 25,41% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Blitar adalah 25 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.3) namun mengalami penurunan menjadi 18,40% pada tahun 2013. Meskipun mengalami penurunan, namun untuk rasio lancar dengan persentase sejumlah 18an persen tersebut masih berada pada titik yang tinggi dan baik dan pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk kembali meningkatkan rasio lancar. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio *quick* (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Blitar juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 23,89% di tahun 2012. Rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,19%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten Blitar.



3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2011-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada (intensifikasi) maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi). Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan upaya memperluas subyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan meningkat pada tahun berikutnya.



Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 2011-2015, beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Blitar antara lain:

1. Berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.
2. Pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat ada beberapa regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun jumlah cakupan.
3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
4. Penyempurnaan administrasi dan pengelolaan pajak/retribusi.
5. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan retribusi.
6. Penyempurnaan dan penataan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Perluasan wajib pajak dan retribusi daerah serta perluasan obyek pajak dan retribusi daerah.
9. Penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah.
10. Perluasan obyek pajak/retribusi.
11. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi.
12. Pengembangan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi informasi.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, melalui sosialisasi kepada masyarakat akan arti penting pajak untuk pembangunan daerah.
14. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab.

Di samping strategi di atas, dalam periode tahun anggaran 2011-2015 pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.



Sedangkan khusus untuk Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, strategi peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar antara lain adalah:

1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta melaksanakan Rekonsiliasi melalui dukungan Data Asumsi Dasar, Celah Fiskal, Data umum, Data Teknis dan Data Khusus sebagai dasar penetapan alokasi dana perimbangan.
2. Updating data dan tertib pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari *spesifik grant* (Dana Alokasi Khusus).

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka detail kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
2. Belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten.
6. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.



8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakian dan Pajak Rokok) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blitar diarahkan penggunaannya untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyeimbangkan (*balancing*) antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
2. pencairan dana cadangan,
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. penerimaan pinjaman daerah,
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
6. penerimaan piutang daerah.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD atau penyertaan Modal
3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Suatu kinerja pemerintah yang baik, dapat dilihat juga melalui proporsi penggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain kebutuhan belanja aparatur harus dibawah 50% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten



Blitar setiap tahunnya berupaya untuk menekan pengeluaran tersebut, dan pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Blitar sudah mampu menekan menjadi 56,97%, dengan harapan setiap tahunnya dapat terus menurun, sehingga belanja aparatur dapat dibawah 50%.

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Blitar

(dalam jutaan)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2012	875,734	1,379,847	63.47
2	Tahun anggaran 2013	959,366	639,252	58.52
3	Tahun anggaran 2014	1,016,299	1,811,191	56.11
4	Tahun anggaran 2015	1,195,822	2,099,147	56.97

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi belanja daerah kabupaten Blitar masih di dominasi oleh belanja aparatur. Selama 5 tahun terakhir ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, untuk perbaikan kebijakan belanja daerah ke depannya. Permasalahan terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah, baik belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok:

A. Permasalahan Internal, meliputi:

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam menyerap dan mengadopsi berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan, terutama tentang mekanisme dan tatalaksana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Rendahnya potensi dan kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.
3. Masih ditemukan pengadaan barang dan jasa yang kurang tepat dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaannya.
4. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan akuntansi yang ada pada SKPD.



5. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu menangani proses pengadaan barang dan jasa yang ada pada SKPD.
6. Terbatasnya jumlah dan kualifikasi sumber daya aparatur yang mampu mengelola proses pelaksanaan kegiatan baik di lingkup SKPD maupun Pemerintah Daerah pada umumnya.

B. Permasalahan Ekternal meliputi:

1. Penetapan Perda APBD dan Dokumen Pelaksana Anggaran yang terlambat.
2. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sehingga mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan program dan kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan anggaran.
3. Dinamisnya peraturan perundangan sehingga kegiatan yang semula diprediksi dapat dilaksanakan tepat waktu menjadi terhambat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Melihat kondisi Kabupaten Blitar terhadap pembiayaan selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5, dimana pemerintah Kabupaten Blitar mengalami ketidakstabilan pembiayaan, hal tersebut dilihat dengan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2015

(dalam jutaan)

No.	Uraian	Tahun (Rp)			
		2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,322,045	1,604,229	1,927,307	2,002,534
	Dikurangi				
2	Belanja Daerah	875,734	1,637,252	1,803,191	2,099,147
3	Pembiayaan Daerah	133,899	141,596	101,230	235,935
	Surplus/(defisit) riil	312,411	(174,618)	22,884	-332,548



Pada Tabel 3.7 di atas terlihat pembiayaan Kabupaten Blitar bersifat sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2012 Kabupaten Blitar mampu untuk menekan pembiayaan sehingga kas daerah dapat menyimpan sisa anggaran (SILPA) sampai sebesar Rp. 312,411, namun pada tahun 2013 justru mengalami defisit anggaran Rp. (174,618), pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 22,88, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan serta defisit anggaran sebesar Rp. (332,548). Untuk menutupi pembiayaan tersebut, maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2015

(dalam jutaan)

No.	Uraian	Tahun			
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,322,045	1,604,229	1,927,307	2,002,534
	Dikurangi				
2	Belanja Daerah	875,734	1,637,252	1,803,191	2,099,147
3	Pembiayaan Daerah	133,899	141,596	101,230	235,935
	Surplus/(defisit) riil	312,411	(174,618)	22,884	(332,548)

Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blitar adalah Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini:



Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2015

(dalam jutaan)

No.	Uraian	2012 (Rp)	% dari SILPA	2013 (Rp)	% dari SILPA	2014 (Rp)	% dari SILPA	2015 (Rp)	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	140,997	100	142,669	100	108,573	100	225,345	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	10,404	7.38	13,948	9.78	21,153	19.48	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-5,741	-55.19	2,146	15.39	-2,710	-12.81	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-522	9.1	9,401	4.38	30,604	-11.29	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	446,311	-854.04	-33,022	-3.51	124,115	4.06	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	446,311	1	-33,022	1	124,115	1	-96,613	100
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil analisis



3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015

(dalam jutaan)

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
I.	BELANJA	786,317	1,044,032	1,056,037	17
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	784,874	1,043,023	997,037	14
1	Gaji Dan Tunjangan	485,522	670,073	507,032	7
2	Tambahan Penghasilan PNS	248,767	323,080	284,463	9
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,134	4,538	2,418	-18
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	777	836	932	9
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	45,673	44,495	202,191	176
B.	BELANJA LANGSUNG	1,443	1,010	59,000	2,856
1	Honorarium PNS	320	371	19,497	2,583
2	Honorarium Non PNS	0	0	0	
3	Belanja Jasa Kantor	562	319	19,751	30,555
	Belanja telepon	76	84	998	551
	Belanja air	8	12	204	823



No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	Belanja listrik	124	155	9,479	3,024
	Belanja kawat/faksimili/internet	33	33	231	304
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6	23	6,304	13,533
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	25	5	707	7,720
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	991	
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	215	8	769	4,650
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74	0	68	-50
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000	8,000	950	106
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	950	
2	Pembentukan dana cadangan	2,000	8,000	-	100
3	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
JUMLAH (I + II)		788,317	1,052,032	1,056,987	17

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 yaitu proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar
Periode Tahun 2010-2016

(dalam jutaan)

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rp)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pendapatan Asli Daerah	63,377	66,516	71,793	7,860	122,607	135,065	151,765
1	Pajak Daerah	13,599	13,150	14,071	15,197	51,669	54,252	58,321



No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rp)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Retribusi Daerah	13,200	14,795	15,979	17,417	19,159	21,266	23,818
3	Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	885	1,246	1,433	1,648	1,895	2,179	2,506
4	lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35,692	37,325	40,311	44,242	49,884	57,367	67,120
B	Dana Perimbangan	767,818	840,113	921,518	1,011,481	1,070,566	1,176,753	1,293,506
1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	64,177	52,127	54,733	58,017	21,756	23,062	24,445
2	Dana Alokasi Umum	639,739	698,002	767,802	844,582	929,041	1,021,945	1,124,139
3	Dana Alokasi Khusus	63,902	89,985	98,983	108,881	119,769	131,746	144,921
C	Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah	257,531	211,951	221,955	233,511	246,969	257,165	269,354

Sumber: RPJMD Kab. Blitar 2011-2016

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 16,81% per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 6% sampai dengan 7%. Diharapkan dapat dikembangkan (d disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan naik rata-rata 9,09% seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh positif terhadap APBN sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi dana perimbangan.

Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru melalui pemekaran menjadi point penting atas tambahan kue dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata naik 1,14% per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian khususnya tunjangan serifikasi guru PNSD serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi sifatnya Add Hoc sehingga sulit untuk diproyeksikan.



Secara Umum Pendapatan Daerah diproyeksikan naik rata-rata 7,89% per tahun yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1) Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan APBD pendapatan kurun waktu 2013-2015. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 yaitu data APBD Tahun 2016 maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12 berikut ini:



Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan)

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4					PENDAPATAN	2,312,045	2,488,619	2,691,719	2,917,920	3,168,596	3,446,279	8.3
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	195,222	210,135	236,788	270,177	309,912	356,547	12.8
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah	52,292	58,006	64,349	71,392	79,212	87,896	10.9
4	1	1	01		Pajak Hotel	55	61	67	74	81	89	10.0
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	36	-	-	-	-	-	-
4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	19	-	-	-	-	-	-
4	1	1	02		Pajak Restoran	781	859	945	1,040	1,144	1,258	10.0
4	1	1	02	02	Rumah Makan	28	30	33	37	40	44	10.0
4	1	1	02	03	Café	6	7	8	8	9	10	10.0
4	1	1	02	04	Kantin	11	12	14	15	17	18	10.0
4	1	1	02	05	Katering	736	810	891	980	1,078	1,185	10.0
4	1	1	03		Pajak Hiburan	68	75	83	91	100	110	10.0
4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	45	49	54	59	65	72	10.0
4	1	1	03	13	Pacuan Kuda	7	7	8	9	10	10	10.0
4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor	10	11	12	13	14	16	10.0
4	1	1	03	19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	8	8	9	10	11	12	10.0
4	1	1	04		Pajak Reklame	457	503	553	608	669	736	10.0
4	1	1	04	01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	322	354	390	429	471	519	10.0
4	1	1	04	02	Reklame Kain	90	99	109	120	132	145	10.0
4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker	45	50	54	60	66	72	10.0
4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan	23,000	25,300	27,830	30,613	33,674	37,042	10.0
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	23,000	25,300	27,830	30,613	33,674	37,042	10.0
4	1	1	07		Pajak Parkir	27	29	32	35	39	43	10.0
4	1	1	07	01	Pajak Parkir	27	29	32	35	39	43	10.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	93	102	113	124	136	150	10.0
4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah	93	102	113	124	136	150	10.0
4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	159	183	210	242	278	320	15.0
4	1	1	11	04	Batu Kapur	18	19	21	23	26	28	10.0
4	1	1	11	06	Granit/Andesit	15	16	18	19	21	23	10.0
4	1	1	11	07	Sirtu	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	11	13	Felspart	74	81	90	98	108	119	10.0
4	1	1	11	14	Ball Clay	53	58	64	71	78	85	10.0
4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23,810	26,668	29,868	33,452	37,466	41,962	12.0
4	1	1	12	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23,810	26,191	28,811	31,692	34,861	38,347	10.0
4	1	1	13		Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,842	4,226	4,648	5,113	5,624	6,187	10.0
4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,842	-	-	-	-	-	-
4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	19,251	22,771	27,018	32,152	38,364	45,894	19.0
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	13,312	15,665	18,489	21,877	25,944	30,823	18.3
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1,455	1,746	2,095	2,514	3,017	3,621	20.0
4	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	168	202	242	291	349	419	20.0
4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	6,383	7,660	9,192	11,030	13,237	15,884	20.0
4	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Fasilitas Umum	515	618	742	890	1,068	1,281	20.0
4	1	2	01	21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	1,391	1,669	2,003	2,403	2,884	3,461	20.0
4	1	2	01	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	974	1,168	1,402	1,682	2,019	2,422	20.0
4	1	2	01	34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	21	26	31	37	44	53	20.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	1	2	01	46	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	0.0
4	1	2	01	48	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	859	1,031	1,237	1,484	1,781	2,137	20.0
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	4,824	5,823	7,054	8,577	10,469	12,826	21.6
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah, Bangunan dan Pemakaian RPU	303	349	401	462	531	610	15.0
					* Sewa stadion srengat (BPKAD)	-	-	-	-	-	-	-
					* Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Sewa Kios Pasar, Retribusi Kios MCK)	258	297	341	393	452	519	15.0
					* Retribusi Rumah Potong Unggas (Disnak)	5	6	7	8	9	10	15.0
					* Tanah Asset Lainnya (PU)	29	33	38	43	50	58	15.0
					* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan (BLH)	-	-	-	-	-	-	-
					* Retribusi pemakaian kekayaan daerah (DKP)	12	13	16	18	21	24	15.0
4	1	2	02	02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	50	57	66	76	87	100	15.0
4	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	256	294	339	389	448	515	15.0
4	1	2	02	08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	15	17	19	22	25	29	15.0
4	1	2	02	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	135	155	178	205	235	271	15.0
4	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	15	17	19	22	25	29	15.0
4	1	2	02	15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	3	4	4	5	5	6	15.0
4	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	12	14	16	18	21	24	15.0
4	1	2	02	17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	9	10	12	14	16	18	15.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	1	2	02	18	Retribusi Rumah Potong Hewan	94	108	125	143	165	189	15.0
4	1	2	02	19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemeriksaan Strow	123	142	163	188	216	248	15.0
4	1	2	02	22	Retribusi Tempat Pariwisata	1,836	2,386	3,102	4,033	5,243	6,816	30.0
4	1	2	02	26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45	52	60	68	79	91	15.0
4	1	2	02	32	Retribusi Rumah Dinas	47	54	62	71	82	94	15.0
4	1	2	02	33	Retribusi Gedung seba guna	29	34	39	45	51	59	15.0
4	1	2	02	34	Retribusi Tanah dan Bangunan	65	75	86	99	114	132	15.0
4	1	2	02	35	Retribusi Tanah bekas Eks bengkok	1,786	2,054	2,363	2,717	3,125	3,593	15.0
4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	1,116	1,283	1,476	1,697	1,952	2,244	15.0
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	788	906	1,042	1,198	1,377	1,584	15.0
4	1	2	03	03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	322	371	426	490	564	648	15.0
4	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2	3	3	3	4	4	15.0
4	1	2	03	08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	4	4	5	6	7	8	15.0
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,953	2,246	2,582	2,970	3,415	3,928	15.0
4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1,953	2,246	2,582	2,970	3,415	3,928	15.0
4	1	3	01	03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Savitri Indah	25	29	33	38	44	50	15.0
4	1	3	01	03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jawa Timur	1,604	1,845	2,121	2,439	2,805	3,226	15.0
4	1	3	01	04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR Jawa Timur	4	4	5	6	7	8	15.0
4	1	3	01	05	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR HAS	320	368	423	487	560	644	15.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121,726	127,113	142,838	163,664	188,921	218,830	12.5
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	532	612	704	809	931	1,070	15.0
4	1	4	01	05	Penjualan kendaraan dinas roda dua	86	99	113	130	150	172	15.0
4	1	4	01	06	Penjualan kendaraan dinas roda empat	354	407	468	538	618	711	15.0
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas	25	29	33	38	44	50	15.0
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	1	1	1	1	1	1	15.0
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan	67	77	89	102	117	135	15.0
4	1	4	02		Penerimaan Jasa Giro	2,576	2,705	2,840	2,982	3,131	3,288	5.0
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	1,923	2,020	2,121	2,227	2,338	2,455	5.0
4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas	653	685	720	756	793	833	5.0
4	1	4	03		Penerimaan Bunga Deposito	19,371	8,180	4,601	2,945	2,017	1,424	-39.7
4	1	4	03	01	Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim	7,180	5,180	3,737	2,696	1,945	1,403	-27.9
4	1	4	03	03	Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI	-	-	-	-	-	-	-
4	1	4	03	04	Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI	5,270	1,500	427	122	35	10	-71.5
4	1	4	03	05	Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri	5,153	1,500	437	127	37	11	-70.9
4	1	4	03	07	Penerimaan Bunga Deposito Bank BTN	1,768	-	-	-	-	-	-
4	1	4	04		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	26	27	28	30	31	33	5.0
4	1	4	04	01	Kerugian Uang	26	27	28	30	31	33	5.0
4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi	104	119	137	157	181	208	15.0
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	104	119	137	157	181	208	15.0
4	1	4	10		Pendapatan Dari Pengembalian	2,422	2,786	3,204	3,684	4,237	4,872	15.0
4	1	4	10	11	Pendapatan Kapitasi dari Puskesmas	2,422	2,786	3,204	3,684	4,237	4,872	15.0
4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	34	39	45	52	60	68	15.0
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum	34	39	45	52	60	68	15.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	1	4	16		Pendapatan BLUD	74,250	86,873	101,641	118,920	139,136	162,789	17.0
4	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	74,250	86,873	101,641	118,920	139,136	162,789	17.0
4	1	4	17		Hasil dari pengelolaan dana bergulir	3	3	3	4	4	5	15.0
4	1	4	17	01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	3	3	3	4	4	5	15.0
4	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	22,409	25,770	29,635	34,081	39,193	45,072	15.0
4	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	22,409	25,770	29,635	34,081	39,193	45,072	15.0
4	2				DANA PERIMBANGAN	1,730,384	1,850,657	1,980,685	2,121,385	2,273,771	2,438,964	7.1
4	2	1			Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73,206	84,187	96,815	111,337	128,038	147,243	15.0
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak	29,270	33,661	38,710	44,516	51,194	58,873	15.0
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	13,627	15,672	18,022	20,726	23,834	27,410	15.0
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15,643	17,989	20,688	23,791	27,359	31,463	15.0
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	43,936	50,526	58,105	66,821	76,844	88,370	15.0
4	2	1	02	02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	271	312	358	412	474	545	15.0
4	2	1	02	07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089	1,253	1,440	1,657	1,905	2,191	15.0
4	2	1	02	08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	29,323	33,721	38,779	44,596	51,286	58,979	15.0
4	2	1	02	09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	654	752	865	994	1,143	1,315	15.0
4	2	1	02	10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	23	26	30	35	40	46	15.0
4	2	1	02	11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	12,534	14,414	16,576	19,063	21,922	25,211	15.0
4	2	1	02	14	Bagi Hasil Pertambangan Umum	42	49	56	64	74	85	15.0
4	2	2			Dana Alokasi Umum	1,128,511	1,184,937	1,244,184	1,306,393	1,371,713	1,440,298	5.0
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	1,128,511	1,184,937	1,244,184	1,306,393	1,371,713	1,440,298	5.0
4	2	3			Dana Alokasi Khusus	528,666	581,533	639,686	703,655	774,021	851,423	10.0
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus (DAK)	528,666	581,533	639,686	703,655	774,021	851,423	10.0
4	2	3	01	01	DAK Bidang Pendidikan	8,932	9,826	10,808	11,889	13,078	14,386	10.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	2	3	01	02	DAK Bidang Kesehatan	25,494	28,044	30,848	33,933	37,326	41,059	10.0
4	2	3	01	03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	59,860	65,846	72,430	79,673	87,640	96,405	10.0
4	2	3	01	05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2,124	2,336	2,570	2,826	3,109	3,420	10.0
4	2	3	01	06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1,737	1,911	2,102	2,313	2,544	2,798	10.0
4	2	3	01	08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	5,448	5,993	6,592	7,251	7,976	8,774	10.0
4	2	3	01	09	DAK Bidang Pertanian	16,681	18,349	20,184	22,202	24,423	26,865	10.0
4	2	3	01	10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	3,567	3,924	4,316	4,747	5,222	5,744	10.0
4	2	3	01	11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,877	2,065	2,272	2,499	2,749	3,024	10.0
4	2	3	01	12	DAK Bidang Kehutanan	4,110	4,521	4,973	5,470	6,017	6,619	10.0
4	2	3	01	14	DAK Bidang Perdagangan	6,692	7,361	8,097	8,907	9,797	10,777	10.0
4	2	3	01	15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	1,012	1,113	1,224	1,347	1,482	1,630	10.0
4	2	3	01	23	DAK Bidang IKM	3,401	3,741	4,115	4,527	4,980	5,478	10.0
4	2	3	01	24	DAK Infrastruktur Publik Daerah	38,317	42,149	46,364	51,000	56,100	61,710	10.0
4	2	3	01	25	DAK Non Fisik / Tunjangan Sertifikasi Guru PNS	325,438	357,982	393,780	433,158	476,474	524,121	10.0
4	2	3	01	26	DAK Non Fisik Bantuan Opeasional Penyelenggaraan PAUD	11,916	13,108	14,418	15,860	17,446	19,191	10.0
4	2	3	01	27	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	5,760	6,336	6,970	7,667	8,433	9,277	10.0
4	2	3	01	28	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	5,355	5,890	6,479	7,127	7,840	8,624	10.0
4	2	3	01	29	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	945	1,040	1,144	1,258	1,384	1,522	10.0
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386,439	427,827	474,247	526,358	584,913	650,768	11.0
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114,419	131,582	151,319	174,017	200,120	230,138	15.0
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	114,419	131,582	151,319	174,017	200,120	230,138	15.0
4	3	3	01	01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	32,519	37,397	43,007	49,458	56,877	65,408	15.0



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode Rekening					Jenis Pendapatan Daerah	APBD	Proyeksi					Rata - rata pertumbuhan
						(Rp)	(Rp)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	3	3	01	03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28,992	33,341	38,342	44,094	50,708	58,314	15.0
4	3	3	01	05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27,237	31,323	36,022	41,425	47,638	54,784	15.0
4	3	3	01	07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	471	541	623	716	823	947	15.0
4	3	3	01	08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	25,091	28,855	33,183	38,161	43,885	50,468	15.0
4	3	3	01	09	Dana Bagi Hasil Bantuan Dari Pihak Ketiga (SP 3)	78	90	103	119	136	157	15.0
4	3	3	01	10	Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang	10	12	13	15	17	20	15.0
4	3	3	01	11	Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak	20	23	26	30	35	40	15.0
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	175,934	195,355	216,992	241,109	268,000	297,997	11.1
4	3	4	01		Dana Penyesuaian	36,558	42,041	48,348	55,600	63,940	73,531	15.0
4	3	4	01	03	Dana Intensif Daerah	36,558	42,041	48,348	55,600	63,940	73,531	15.0
4	3	4	04		Dana Desa	139,376	153,313	168,645	185,509	204,060	224,466	10.0
4	3	4	04	01	Dana Desa	139,376	153,313	168,645	185,509	204,060	224,466	10.0
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	96,086	100,890	105,935	111,231	116,793	122,633	5.0
4	3	5	01		Bantuan Keuangan Dari Provinsi	96,086	100,890	105,935	111,231	116,793	122,633	5.0
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur	96,086	100,890	105,935	111,231	116,793	122,633	5.0
					Bidang Pendidikan	7,300	7,666	8,049	8,451	8,874	9,317	5.0
					Bidang Kesehatan	785	825	866	909	955	1,002	5.0
					Bidang Infrastruktur	87,800	92,190	96,800	101,639	106,721	112,058	5.0
					Hari Jadi Prop Jatim	50	53	55	58	61	64	5.0
					Bidang Keluarga Berencana	50	53	55	58	61	64	5.0
					Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100	105	110	116	122	128	5.0

Sumber: Dinas Pendapatan



Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

2) Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA pada periode tahun 2016 dan 2021 menggunakan data SiLPA pada periode sebelumnya dimana diketahui nilai dan tingkat SiLPA dari periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 mengalami penurunan yaitu -11% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa periode tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan lebih baik, maka diperoleh proyeksi SiLPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan)

Uraian	APBD	Proyeksi (Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	225,000	199,448	176,797	156,719	138,922	123,145

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Blitar

Berdasarkan data-data historis sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah kabupaten Blitar untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan)

Uraian	APBD	Proyeksi				
	(Rp)	(Rp)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	2,312,045	2,488,619	2,691,719	2,917,920	3,168,596	3,446,279
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	225,000	199,448	176,798	156,720	138,922	123,146
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA	2,537,045	2,688,067	2,868,517	3,074,640	3,307,518	3,569,424

Sumber: hasil analisis

3) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2016 dan 2021 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2014-2015, sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	1,467,908	1,524,246	1,582,976	1,644,206	1,685,288	1,727,396
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	786,571	825,900	867,195	910,555	933,319	956,652
2	Tambahan Penghasilan PNS	415,476	425,863	436,510	447,422	458,608	470,073
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4,426	4,536	4,650	4,766	4,885	5,007
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	952.79	952.79	952.79	952.79	952.79	952.79
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	260,482	266,994	273,669	280,510	287,523	294,711



No.	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Belanja Langsung	119,342	122,324	125,382	128,515	131,728	135,020
1	Berlanja Honorarium	26,658	27,325	28,008	28,708	29,426	30,161
2	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	92,652	94,968	97,342	99,776	102,270	104,827
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31	31	31	31	31	31
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA (A+B+C)	1,587,249	1,646,570	1,708,358	1,772,722	1,817,015	1,862,416

Sumber: hasil analisis

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada tabel 3.16 berikut ini:



Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan)

No	Uraian	APBD	Proyeksi				
		(Rp)	(Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2,537,045	2,688,067	2,868,517	3,074,640	3,307,518	3,569,424
1	PENDAPATAN	2,312,045	2,488,619	2,691,719	2,917,920	3,168,596	3,446,279
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	225,000	199,448	176,798	156,720	138,922	123,146
B	BELANJA	2,537,045	2,688,067	2,868,517	3,074,640	3,307,518	3,569,424
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,481,564	1,538,181	1,597,197	1,658,720	1,744,398	1,742,518
	PRIORITAS I	1,467,908	1,524,246	1,582,976	1,644,206	1,685,288	1,727,396
a	Gaji Dan Tunjangan	786,571	825,900	867,195	910,555	933,319	956,652
b	Tambahan Penghasilan PNS	415,476	425,863	436,510	447,422	458,608	470,073
c	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,426	4,536	4,650	4,766	4,885	5,007.27
d	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	953	953	953	953	953	953
e	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	260,482	266,994	273,669	280,510	287,523	294,711
	PRIORITAS III	13,656	13,935	14,221	14,514	59,110	15,122
a	Belanja Hibah	9,805	10,050	10,301	10,559	55,119	11,093
b	Belanja Bantuan Sosial	1,351	1,385	1,419	1,455	1,491	1,528
c	Belanja Tidak Terduga	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2	BELANJA LANGSUNG	1,055,481	1,149,886	1,271,321	1,415,920	1,563,120	1,826,907
	PRIORITAS I	119,342	122,324	125,382	128,515	131,728	135,020
a	Berlanja Honorarium	26,658	27,325	28,008	28,708	29,426	30,161
b	Belanja Jasa Kantor	92,652	94,968	97,342	99,776	102,270	104,827
c	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31	31	31	31	31	31
	PRIORITAS II	936,139	1,027,562	1,145,939	1,287,404	1,431,393	1,691,887



No	Uraian	APBD	Proyeksi				
		(Rp)	(Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
	PRIORITAS I	--	-	-	-	-	-
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	-	-	-
b	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-

Sumber: hasil analisis



Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa Belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*) dan kebutuhan.

Selanjutnya, ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas. Prioritas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.15. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, serta pada tahun 2020 prioritas III didalamnya termasuk dana hibah yang disediakan untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020.



Tabel 3.17
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2016-2021

(dalam jutaan)

Uraian	Alokasi											
	APBD		Proyeksi									
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Prioritas I	62.6	1,587,249	61.3	1,646,570	59.6	1,708,358	57.7	1,772,722	54.9	1,817,015	52.2	1,862,416
Belanja Tidak Langsung	57.9	1,467,908	56.7	1,524,246	55.2	1,582,976	53.5	1,644,206	51.0	1,685,288	48.4	1,727,396
Belanja Langsung	4.7	119,342	4.6	122,324	4.4	125,382	4.2	128,515	4.0	131,728	3.8	135,020
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prioritas II	36.2	919,339	38.2	1,027,562	39.9	1,145,939	41.9	1,287,404	43.3	1,431,393	47.4	1,691,887
Prioritas III	1.2	30,456	0.5	13,935	0.5	14,221	0.5	14,514	1.8	59,110	0.4	15,122
Total	100	2,537,045	100	2,688,067	100	2,868,517	100	3,074,640	100	3,307,518	100	3,569,424

Sumber: hasil analisis



BAB ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Implementasi pembangunan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung keterwujudan visi dan misi pemerintah telah menemui berbagai permasalahan pembangunan. Secara konseptual yang dimaksud dengan permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena beberapa hal yang meliputi:

1. Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal;
2. Kelemahan yang tidak diatasi;
3. Peluang yang tidak dimanfaatkan; dan
4. Ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar meliputi:

4.1.1. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Secara administratif Kabupaten Blitar memiliki wilayah seluas 1.588,79 km², yang terbagi ke dalam 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas yaitu 164,54 km², disusul oleh Kecamatan Panggungrejo dengan luas wilayah 119,04 km², Kecamatan Bakung dengan luas wilayah 111,24 km², Kecamatan Kademangan dengan luas 105,28 km² dan Kecamatan Ponggok dengan luas wilayah 103,83 km². Namun demikian, terdapat pula 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas wilayah administratif paling sempit yaitu Kecamatan Sanankulon dengan luas wilayah 33,33 km², Kecamatan Selopuro dengan luas wilayah 39,29 km² dan Kecamatan Sutojayandengan luas wilayah 44,2 km².

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar telah menunjukkan adanya peningkatan. Secara terperinci jumlah penduduk Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015



adalah 1.118.919 jiwa tahun 2010, 1.124.775 jiwa tahun 2011, 1.130.423 jiwa tahun 2012, 1.136.701 jiwa tahun 2013, 1.140.793 jiwa pada tahun 2014 dan 1.145.396 jiwa pada tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blitar tersebut termasuk dalam kategori ideal karena laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,51 persen.

Secara umum, persebaran penduduk Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di wilayah tengah yaitu Kecamatan Sanankulon, Kanigoro, Talun, Srengat, dan Garum, sehingga kelima kecamatan tersebut menduduki lima besar kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kelima wilayah tersebut secara geografis memiliki kemudahan akses terhadap sarana transportasi, komunikasi maupun sarana lainnya karena keberadaannya di perbatasan Kota Blitar yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar sampai saat ini.

Sedangkan kecamatan yang berkepadatan rendah masih didominasi oleh kecamatan yang berada di wilayah selatan diantaranya Wonotirto, Bakung, Pangungrejo dan Wates. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan terluas yang mencakup 10 persen lebih dari luas wilayah Kabupaten Blitar, hanya memiliki kepadatan penduduk 216 jiwa/km². Sementara, Kecamatan Bakung yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 25.542 jiwa memiliki kepadatan terendah kedua sebesar 230 jiwa/km².

Adapun proporsi penduduk Kabupaten Blitar apabila dilihat berdasarkan perspektif golongan usia masih di dominasi oleh usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,62 persen, sedangkan 33,38 persen sisanya merupakan penduduk usia ≥ 65 tahun dan usia ≤ 15 tahun yang termasuk dalam kategori usia non produktif. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di Kabupaten Blitar sebesar 50%, artinya setiap 100 orang usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 orang non produktif.

Kondisi geografis dan demografis tersebut diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar secara administratif memiliki cakupan wilayah yang luas, dengan angka kepadatan penduduk masuk dalam kategori sangat padat. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, transportasi, dan perkembangan pembangunan. Meskipun demikian, apabila dilihat berdasarkan perspektif peningkatan penduduk setiap tahunnya, Kabupaten Blitar termasuk ke dalam kategori daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk ideal yaitu sebesar 0,49. Maksudnya adalah laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar tidak mengalami ledakan penduduk maupun pertumbuhan penduduk yang lambat. Berbagai



kelebihan diatas menjadi kekuatan bagi Kabupaten Blitar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Dimana era keterbukaan terhadap akses ekonomi, perdagangan, dan ketenagakerjaan serta lainnya dibuka secara bebas antar Negara, sehingga setiap Negara bebas keluar masuk dengan mudah bahkan terkesan tanpa ada hambatan untuk menawarkan produk-produk unggulan. Di sektor ketenagakerjaan dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuka kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data tahun 2014 struktur pendidikan penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari lulusan SD sebesar 33.4%, SMP 24.53%, Tidak Tamat SD 15.27%, SLTA dan SMK masing-masing sebesar 9.41% dan 8.04, Sarjana sebesar 5.56%, tidak sekolah 2.02% dan Diploma sebesar 1.76%. Struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi oleh pendidikan dasar tidak banyak memberikan kesempatan bagi sebagian besar penduduk tersebut untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal. Berdasarkan data BPS tahun 2015 tidak kurang dari 48 persen penduduk Kabupaten Blitar menggantungkan perekonomiannya di kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan mayoritas berstatus buruh/karyawan yang tentunya tidak menuntut SDM berpendidikan tinggi. Penduduk yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi cenderung untuk bekerja atau menerapkan ilmu ke luar wilayah yang lebih menjanjikan kesejahteraannya.

Selain permasalahan struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pula pada permasalahan tentang tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial yang masih tinggi.

Berbagai upaya untuk menekan jumlah kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar salah satunya melalui berbagai macam program dan kegiatan. Namun, hasilnya masih belum memuaskan apabila di lihat berdasarkan indikator keluarga miskin yang menerima bantuan pangan. Berdasarkan data diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan pangan sejak tahun 2012-2014 yaitu sejumlah 46.948 keluarga miskin yang menerima bantuan tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 46.948 keluarga pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2014 terdapat 68.721 keluarga miskin yang menerima bantuan.

Permasalahan yang tidak kalah penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera diselesaikan adalah adanya trend peningkatan jumlah keluarga miskin dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).



Berdasarkan data Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan, hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah PMKS yang menerima bantuan. Terdapat 56.739 PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 56.859 PMKS pada tahun selanjutnya serta pada akhir tahun 2014 jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sebanyak 77.550 PMKS.

Peningkatan jumlah PMKS tersebut disebabkan oleh munculnya PMKS-PMKS baru yang jumlahnya lebih banyak daripada yang tertangani, seperti meningkatnya jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian keluarga pula yang menjadi latar belakang bagi sebagian masyarakat Kabupaten Blitar memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan harapan mampu untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi penyumbang terbesar kedua TKI dari wilayah Jawa Timur setelah Tulungagung.

Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana seperti BLK dan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja khususnya TKI dari Kabupaten Blitar sangat dibutuhkan dalam upaya merubah struktur perekonomian TKI dari sektor non formal ke sektor formal dan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir (*mindset*). Dengan ketersediaan sarana dan prasaran peningkatan kemampuan bagi penduduk diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan laju pengangguran yang sejauh ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan yaitu 23.046 orang tahun 2013, 18.673 orang tahun 2014, dan 16.657 orang tahun 2015.

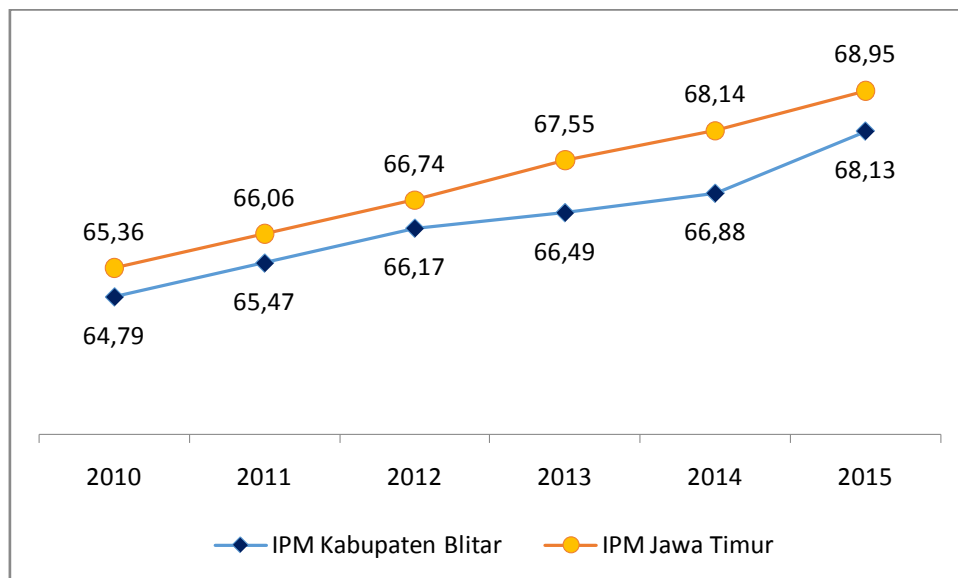
4.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembangunan daerah. Keberadaannya menjadi faktor utama bagi terwujudnya Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu daerah dapat di kategorikan sebagai daerah maju, berkembang atau terbelakang maka dapat di ukur dengan menggunakan pendekatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang

disusun oleh beberapa variabel antara lain angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (*Expected Years School/EYS*) dan angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years School/MYS*) serta standar hidup layak. Angka IPM akan memberikan gambaran secara komprehensif terhadap tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusianya semakin baik begitu pula sebaliknya.

Secara umum capaian IPM Kabupaten Blitar masih berada dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, perkembangan capaian IPM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 telah menunjukkan *trend* yang positif yaitu selalu mengalami peningkatan.

Gambar 4.1
Angka IPM Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015

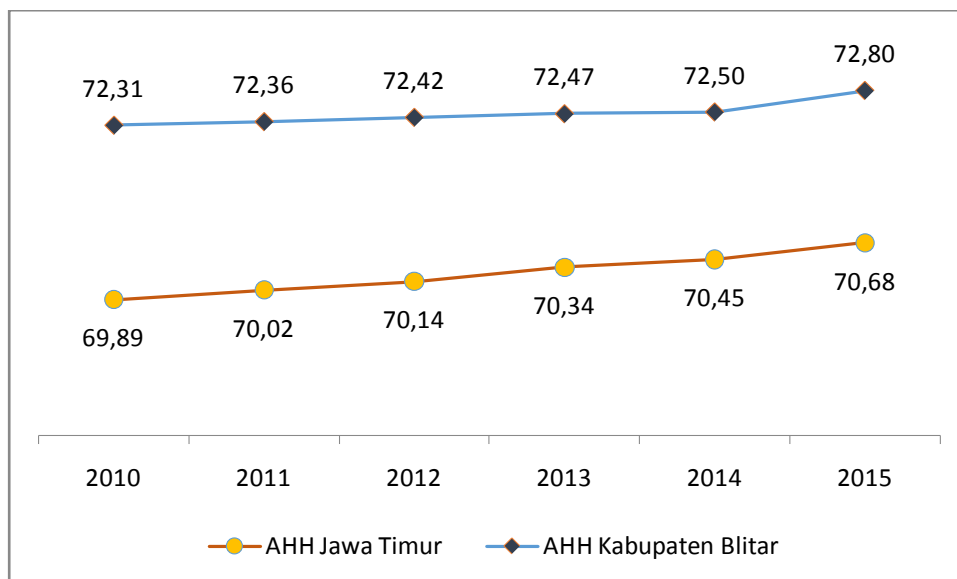


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah)

Dengan capaian tersebut, di tahun 2015 Kabupaten Blitar menempati peringkat ke 22 dari 38 Kabupaten/ Kota se Jawa Timur.

Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar telah menunjukkan capaian yang baik, hal tersebut ditandai dengan capaian angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Blitar yang berada di atas rata-rata capaian AHH Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar sudah baik. Secara terperinci capaian AHH Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2
Angka Harapan Hidup Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016 (diolah)

Capaian pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif dimensi pendidikan ditandai dengan variabel angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang menunjukkan capaian kedua variabel tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci capaian RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah) masyarakat Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Blitar	6,43	6,52	6,59	6,67	6,82	7,24
Prov. Jatim	6,73	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016



Tabel 4.2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Blitar	11,03	11,18	11,34	11,37	11,49	11,98
Prov. Jatim	11,49	11,62	11,74	12,17	12,45	12,66

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

Sedangkan kondisi pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif standar hidup layak yang ditandai oleh variabel pengeluaran per kapita disesuaikan telah menunjukkan capaian yang tidak jauh berbeda dengan capaian IPM berdasarkan dimensi pendidikan. Dimana pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Blitar	8.423	8.726	9.076	9.217	9.245	9.272
Prov. Jatim	9.002	9.396	9.797	9.978	10.012	10.383

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

4.1.3. Perekonomian dan Daya Saing

Dimasa datang tantangan terhadap perekonomian dan persaingan antar daerah akan semakin tinggi. Maka, dibutuhkan kesiapan bagi setiap daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan daya saing daerah melalui upaya peningkatan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong percepatan iklim investasi antar daerah. Sehingga pada akhirnya akan membuat persaingan dalam peluang investasi antar daerah menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap daerah berupaya secara optimal untuk melakukan



promosi terhadap keseluruhan potensi daerah dan berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan masuknya iklim investasi.

Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negara-negara eropa yang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan ekspor. Terlebih bahwa perekonomian daerah dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dimana perekonomian global dan liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (*World Trade Organization*) serta diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diketahui bahwa jumlah industri kecil menengah (IKM) telah menunjukkan capaian yang positif selama kurun waktu 2011-2015 yaitu 8.700 IKM pada tahun 2011, 8.854 IKM tahun 2012, 8.946 IKM tahun 2013, 18.869 IKM tahun 2014 dan 20.000 IKM tahun 2015. Pertumbuhan jumlah IKM tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk mengendalikan penyelenggaraan perekonomian kerakyatan dengan baik dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan cita-cita dari Pemerintah Pusat yang berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. Perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dilakukan oleh Kabupaten Blitar dengan menguatkan potensi desa. Hal tersebut ditandai dengan tingginya sumbangan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar khususnya sektor tanaman pangan dan peternakan serta perikanan. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor industri pengolahan, sektor konstruksi; pertambangan dan penggalian; Informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; *real estate*; jasa keuangan dan asuransi; transportasi dan penggudangan; jasa lainnya; penyediaan akomodasi dan makan minum; pengadaan listrik dan gas; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa perusahaan; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Di Pihak lain, meskipun saat ini sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB Kabupaten Blitar, namun peluang untuk meningkatkan roda perekonomian daerah melalui



optimalisasi potensi wisata masih terbuka lebar. Terlebih dengan banyaknya potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar (40 destinasi wisata tahun 2015) menjadi kekuatan tersendiri bagi Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain jumlah destinasi wisata yang banyak, tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Blitar dimana telah tercatat sebanyak 1.161.075 wisatawan telah berkunjung.

4.1.4. Infrastruktur

Pembangunan infrastuktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud meliputi angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, sarana jalan, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2015 kondisi infrastruktur Kabupaten Blitar khususnya kondisi jalan masih membutuhkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya jalan Kabupaten yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Blitar dalam keadaan Baik. Jika berdasarkan kewenangan panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah, jalan sepanjang 1.383 km berada pada kondisi baik 35%, kondisi sedang 45%, kondisi rusak ringan 15%, dan kondisi rusak berat 5%.

4.1.5. Tata Pemerintahan (*Good governance*)

Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip pelaksanaan *good governance* adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya *good governance* akan mendorong kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada tantangan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Pun demikian dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etika dan



moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap kelembagaan yang efektif dan efisien.

4.1.6. Sosial Budaya, Ketenteraman dan Ketertiban Daerah

Berbicara berkenaan dengan permasalahan sosial erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang beranekaragam menciptakan suatu interaksi dan kebiasaan yang kemudian dikenal dengan budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat harus bersumber dan terbentuk dari nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Beberapa dampak sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Blitar yang dapat mengganggu terwujudnya suasana yang kondusif meliputi:

Lahirnya karakteristik individualis yang mengarah kepada peningkatan penyalahgunaan obat terlarang merupakan salah satu dampak dari adanya arus globalisasi. Di Kabupaten Blitar sendiri telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penyalahgunaan obat terlarang dimana jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014. Jumlah eks psikotik di Kabupaten Blitar meningkat karena maraknya penggunaan narkoba di kalangan siswa usia SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat dilihat dari peserta rehabilitasi yang masih berusia remaja.



Peningkatan angka kriminalitas dimana persentase angka tersebut mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki kecenderungan fluktuasi yaitu 50% tahun 2011, naik menjadi 80% pada tahun 2012, kemudian turun menjadi 40% ditahun 2013 dan naik kembali menjadi 80% tahun 2014. Angka kriminalitas telah menjadi salah satu indikator baik tingkat nasional maupun provinsi dalam mengukur kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Karena angka kriminalitas menjadi salah satu cerminan bagi suatu pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya, kondisi ketenteraman dan ketertiban itu sendiri. Kondusifitas daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, semakin baik perekonomian daerah biasanya memiliki kondisi masyarakat yang kondusif.

Dengan adanya kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proposional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia khususnya bagi Kabupaten Blitar untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di pihak lain Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada sebuah kondisi dimana memiliki wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya informasi tentang masalah bencana alam yang diterima oleh masyarakat. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah informasi tentang bencana yang diterima oleh masyarakat sangat fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah informasi yang diterima sebanyak 44 kali, kemudian tahun tahun 2012 sampai dengan 2014 menurun menjadi 12 kali namun kembali naik secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 33 kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

Disamping bencana alam, ternyata Pemerintah Kabupaten Blitar termasuk dalam kategori rawan bencana kebakaran. Hal ini ditandai dengan banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 dimana secara berurutan jumlah kejadian



kebakaran adalah sebagai berikut 17 kali tahun 2011, 12 kali tahun 2012, 11 kali tahun 2013, 34 kali tahun 2014 dan 9 kali di tahun 2015.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

4.2.1. Dinamika Internasional

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*)

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

b. *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau Millenium Development Goal's (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan



akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicituskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan *Pasca-Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kemajuan pesat telah dibuat demi meraih MDGs. Kemiskinan dunia terus menurun. Semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar. Jumlah kematian anak telah berkurang secara drastis. Akses terhadap air minum yang aman meluas dengan sangat pesat. Pendanaan yang ditujukan untuk memerangi malaria, AIDS, dan TBC telah menyelamatkan jutaan jiwa. Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, Para pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan.

Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 PBB mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antarpemerintah pasca-2015. Sekretaris-Jenderal PBB telah mengajukan 6 kerangka elemen SDGs: Kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia.

SDGs ini merupakan lanjutan dari program yang telah ada dalam MDGs. Tema menarik baru yang dimasukkan dalam SDGs adalah tentang bumi dan manusia serta lingkungan. Tanpa menampik permasalahan paling mengakar sampai hari ini adalah mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, konsep ambisius ini semakin membutuhkan komitmen dari negara-negara untuk saling peduli dan menciptakan sebuah perdamaian.



4.2.2. Dinamika Nasional

Pada bagian ini dibahas beberapa isu di tingkat nasional, antara lain RPJMN 2015-2019 dan beberapa isu kebijakan sektoral.

a. RPJMN 2015-2019

Pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki visi (2015-2019) adalah “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMD juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.

b. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (*public health expenditure*) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persendari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaankesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, dan Myanmar. Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Pada tahun 2014, hanya 15 persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan masyarakat.

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai *universal health coverage* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan penyediaan fasilitas dan ketenagaan.

Sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi



salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok isu kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan.

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung *evidence based planning* yang belum didukung sistem informasi yang kuat; kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; sinkronisasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

2. Pendidikan

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam tes internasional seperti dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and*



Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak mengembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.

Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya.

3. Kebudayaan

Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan



antara lain: (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia diluar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun internasional belum optimal.

4. Agama

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lainlain).

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; meningkatkan kualitas



layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan.

Berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas ibadah haji telah menunjukkan peningkatan antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). Selain itu menurut versi *World Hajj and Umrah Convention* (WHUC) pada tahun 2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai penyelenggara haji terbaik dunia.

5. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

c. Pembangunan Ekonomi

1. Stabilitas moneter

Dalam upaya menjaga stabilitas moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini mengandung dua isu strategis, yaitu : (1) menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, (2) serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jika dilihat tren inflasi selama



lima tahun ke belakang (2010-2014), telah terjadi fluktuasi yang cukup berarti. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa pada tahun 2010, tekanan inflasi yang dilaporkan cukup tinggi mencapai 7,0 persen (yoy), melampaui sasaran inflasi 5 ± 1 persen. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,8 persen. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2 persen, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3 persen).

Akan tetapi, lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013 menjadi 8,4 persen, atau berada jauh di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan $4,5\pm 1$ persen. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkan dampak gejolak harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013 baik dampak langsung maupun dampak lanjutan (*second round effect*), dimana kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga. Inflasi perlahan menurun hingga triwulan III tahun 2014. Memasuki triwulan IV tahun 2014, terjadi peningkatan inflasi pada seluruh komponen-komponennya.

Secara tahunan, pada bulan Desember 2014 terjadi inflasi inti sebesar 4,9 persen (yoy), inflasi bergejolak sebesar 10,9 persen (yoy), dan inflasi diatur pemerintah sebesar 17,6 persen (yoy). Kenaikan inflasi 8,4 persen di bulan Desember 2014 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, cabai merah karena terganggunya pasokan akibat anomali cuaca, dan tarif angkutan dalam kota sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi harga bergejolak di bulan Desember meningkat karena masih terbatasnya pasokan bahan pangan di tengah moment Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, isu utama untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi adalah mendorong terciptanya kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi.

Nilai tukar rupiah menguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiah tersebut didukung oleh faktor fundamental yang solid yang tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatat surplus secara signifikan. Tren nilai tukar rupiah cenderung menguat selama tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 secara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp. 8.771,0 per dolar AS,



menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah pada 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Nilai tukar rupiah melemah 5,9 persen (yoy) selama tahun 2012 ke level Rp. 9.793,0 per dolar AS. Sepanjang tahun 2013, nilai tukar rupiah cukup bergejolak. Tercatat bahwa pada sampai akhir 2013, nilai tukar rupiah mencapai Rp.12.171,0 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipicu sentimen negatif pelaku pasar terhadap rencana pengurangan stimulus moneter AS (*tapering-off*) serta pengaruh defisit transaksi berjalan Indonesia.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah menunjukkan sedikit penguatan pada triwulan I tahun 2014 dan mencapai Rp. 11.361,0 per dolar AS. Namun, memasuki triwulan II, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai Rp. 11.876,0 per dolar AS dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global, serta terjadinya defisit neraca perdagangan. Memasuki triwulan III, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga mencapai Rp 12.188,00. Selanjutnya, memasuki triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi hingga menyentuh level Rp. 12.388,00.

2. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah.



Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah.

Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

3. Peningkatan Pariwisata

Dalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini, yaitu:

- a. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman (*International Tourists Arrivals*), yang selalu meningkat.
- b. Pengeluaran wisman (*International Tourists Receipts*) juga meningkat setiap tahun.
- c. Keterkaitan perjalanan dan pariwisata (*Affinity for Travel and Tourism*) khususnya untuk indikator sikap penduduk terhadap wisatawan asing (*Attitude of Population toward Foreign Visitors*) semakin memburuk.

Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah “Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.”



d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (Total Factor Productivity) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (governance), dan stabilitas politik.

Selama ini sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan sumbangan Modal dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah bagaimana meningkatkannya kepada sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.

2. Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara *megabiodiversity*. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 – 30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dan dari sejumlah itu baru 1,78 juta jenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis. Indonesia memiliki 1,3 persen daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17 persen dari total jumlah jenis *species* terestrial di dunia. Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalah mengupayakan agar iptek dapat



mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga tantangan yang perlu dihadapi secara nasional adalah dengan meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati.

3. Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar jiwa, sehingga seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, *Global Village*. Kehidupan masyarakat di masa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yang seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (*borderless world*).

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global yang demikian? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan / pengelola pembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Dukungan IPTEK tersebut dalam bentuk (1) Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; (2) Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

4.2.3. Dinamika Regional (Provinsi)

Telaahan dinamika provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Jawa Timur.

a. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Kabupaten Blitar merupakan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730). Secara Administratif Kabupaten Blitar berada di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga keberadaannya harus mampu mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh lima misi yang diberi judul: ***Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik***. Kelima misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.
3. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
4. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
5. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan.
6. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.
7. eningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata.
8. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.



9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.
11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.
12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.
16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).
17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.
18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).
19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).
20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.
21. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (*food availability*).
22. Meningkatnya penyerapan pangan (*food utilization*).
23. Meningkatnya akses pangan (*food acces*).
24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.
25. Meningkatnya kontribusi sektor industri.
26. Meningkatnya kunjungan wisata.
27. Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.
28. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.
29. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.
30. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi.



31. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air.
32. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.
33. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.
34. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.
35. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut.
36. Menurunnya emisi GRK.
37. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.
38. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
39. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah.
40. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.
41. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.
42. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
43. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.
44. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
45. Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.
46. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.
47. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.
48. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.
49. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.
50. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.



b. Isu/kondisi Terkini di Jawa Timur

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan". Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor pertumbuhan UMKM dan Koperasi. Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012).

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

Selain UMKM dan Koperasi sebagai penunjang positifnya isu ekonomi adalah pada bidang ketahanan pangan dan pertanian. Sekitar 42,5



persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48 juta ton. Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih di atas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013.



Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

2. Infrastruktur

Beberapa permasalahan infrastruktur di Jawa Timur terdiri dari permasalahan transportasi seperti dibutuhkannya penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa. Permasalahan manajemen di bandara, tol, jalan raya, pelabuhan, stasiun, menjadi perhatian khusus untuk segera masuk dalam perencanaan yang terpadu padamasa yang akan datang.

Permasalahan infrastruktur lain yang ada di Jawa Timur adalah mengenai bencana banjir dan kekeringan, serta ketersediaan air bersih. Selain pembangunan infrastruktur kebutuhan air bersih pengembangan sarana infrastruktur PDAM dan sanitasi lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

3. Lingkungan Hidup

Pembangunan secara berkelanjutan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Timur Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah.



Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.



**Tabel 4.4
Telaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
Visi	Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
Misi	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; Bangsa berdaya saing; Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran Makro: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan manusia dan masyarakat Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> Kependudukan dan keluarga berencana Pendidikan Kesehatan Kesetaraan gender dan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga. eningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
	<p>perempuan</p> <p>e. Perlindungan anak</p> <p>f. Pembangunan masyarakat</p> <p>3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:</p> <p>a. Kedaulatan pangan</p> <p>b. Kedaulatan energi</p> <p>c. Maritim dan kelautan</p> <p>d. Pariwisata dan industri manufaktur</p> <p>e. Ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas</p> <p>4. Sasaran Dimensi Pemerataan:</p> <p>a. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi</p> <p>b. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu</p> <p>5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:</p> <p>a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah</p> <p>6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:</p> <p>a. Politik dan Demokrasi</p> <p>b. Penegakan Hukum</p> <p>c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah</p> <p>e. Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.</p> <p>11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.</p> <p>12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keperawatan Kemiskinan.</p> <p>13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</p> <p>14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</p> <p>15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.</p> <p>16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).</p> <p>17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.</p> <p>18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).</p> <p>19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).</p> <p>20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.</p> <p>21. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability).</p> <p>22. Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization).</p> <p>23. Meningkatnya akses pangan (food acces).</p> <p>24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.</p> <p>25. Meningkatnya kontribusi sektor industri.</p> <p>26. Meningkatnya kunjungan wisata.</p> <p>27. Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.</p> <p>28. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.</p> <p>29. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.</p> <p>30. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi.</p> <p>31. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air,</p>



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<p>peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air.</p> <ol style="list-style-type: none">32. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.33. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.34. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.35. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut.36. Menurunnya emisi GRK.37. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.38. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.39. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.40. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.41. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.42. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.43. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.44. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.45. Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.46. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.47. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.48. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.49. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.50. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
Strategi	1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: a. Membangun untuk meningkatkan	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan. 2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
	<p>kualitas hidup manusia dan masyarakat.</p> <p>b. Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.</p> <p>c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.</p> <p>2. Tiga Dimensi Pembangunan:</p> <p>a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.</p> <p>b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas</p> <p>c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan</p> <p>3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:</p> <p>a. Kepastian dan penegakan hukum;</p> <p>b. Keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. Politik dan demokrasi; dan</p> <p>d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.</p> <p>4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).</p>	<p>keterampilan tenaga kerja.</p> <p>3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi.</p> <p>4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif.</p> <p>5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.</p> <p>6. Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.</p> <p>7. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.</p> <p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>9. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD</p> <p>10. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan</p> <p>11. Meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p>12. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas</p> <p>13. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda</p> <p>14. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event</p> <p>15. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan</p> <p>16. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan</p> <p>17. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan</p> <p>18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita</p> <p>19. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya</p> <p>20. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif</p> <p>21. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu</p> <p>22. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>23. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan</p> <p>24. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-</p>



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<p>fokus")</p> <ol style="list-style-type: none">25. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan26. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)27. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)28. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin29. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS30. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan31. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan32. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi33. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru34. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan35. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)36. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian37. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir38. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat39. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)40. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi41. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu42. Meningkatkan stok pangan masyarakat43. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan44. Meningkatkan penanganan keamanan pangan45. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan46. Menjaga stabilitas harga pangan47. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<ol style="list-style-type: none">48. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional49. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal50. Meningkatkan pengembangan sektor industri51. Mengembangkan bahan baku substitusi impor52. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global53. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal54. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif55. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi56. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu57. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal58. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif59. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi60. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah61. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan62. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat63. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan64. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas65. Meningkatkan pengelolaan air tanah66. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi67. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi68. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan69. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi70. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut71. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<ol style="list-style-type: none">72. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah73. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi74. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur75. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur76. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan77. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional78. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten79. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif80. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD81. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya82. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah83. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal84. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid85. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)86. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana87. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)88. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah89. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi90. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi,



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban 91. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas 92. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkelanjutan 93. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal 94. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM 95. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM 96. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM



4.2.4. Telaahan RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah

Tabel 4.5
Telaahan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Kediri	Sedang menyusun RPJMD 2016-2021	
2	Kabupaten Malang	Sedang menyusun RPJMD 2016-2021	
3	Kabupaten Tulungagung		Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kabupaten Blitar, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.3. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain4. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.5. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.6. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
4	Kota Blitar	Sedang menyusun RPJMD 2016-2021	

Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang menyepakati 7 (tujuh) ruang lingkup kerjasama pembangunan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara kedua daerah dan ditandatangani oleh Bupati Blitar Herry Noegroho dan Bupati Malang Rendra Khresna pada Tahun 2013. Ketujuh ruang lingkup kerjasama



tersebut diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, perhubungan, pendidikan, dan pariwisata. Terkait kerjasama di bidang perhubungan, kedua pemerintah daerah menyepakati pelurusan jalan Blitar arah Malang di kawasan Brongkos Kesamben, di bidang kesehatan, difokuskan pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Blitar Selatan dan Malang Selatan seperti di Kec. Wates. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, diharapkan warga Kab. Blitar mendapatkan kemudahan jika hendak berobat ke puskesmas atau Rumah Sakit milik Pemkab. Malang, begitupun sebaliknya. Sedangkan di bidang pariwisata, terutama di beberapa kawasan Pantai di Blitar Bagian Selatan Selatan, akses dari Kab. Malang akan lebih dimudahkan, sehingga direncanakan jalur masuk ke sejumlah objek wisata pantai tersebut akan ditata kembali. Diharapkan melalui kesepakatan bersama antara kedua daerah, akan tercipta kemajuan pembangunan yang saling menguntungkan.

4.2.5. Dinamika Lokal

a. Telaahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan 20 tahun Kabupaten Blitar. Pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar memiliki visi:

**TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH
DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG
SEJAHTERA, MAKMUR, DAN RELIGIUS.**

Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasimasyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;



5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar saat ini memasuki tahap ketiga atau dapat dikatakan sebagai RPJMD ketiga. Tujuan dari tahap ketiga Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
2. Sejalan dengan keamanan dan ketertiban yang makin mantap yang ditandai dengan peningkatan profesionalisme aparat keamanan yang didukung partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu mendukung pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
4. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap



dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

5. Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
6. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi sebagai bagian dari masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

b. Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Blitar

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, tujuan penataan



ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 4.6
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Kebijakan	Strategi
a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;	(1) Strategi Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang di Kabupaten Blitar, meliputi: a. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya;
b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;	b. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan di luar PKL; dan c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.
c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;	(2) Strategi Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, meliputi:
d. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;	a. membangun kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten; b. meningkatkan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
e. Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;	c. mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; serta d. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di kabupaten.
f. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;	(3) Strategi Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar, meliputi: a. menetapkan pengembangan kawasan agroindustri pada kecamatan potensial;
g. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;	b. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di kabupaten; dan c. meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah.
h. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;	(4) Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial, meliputi: a. mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ;
i. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan,	



Kebijakan	Strategi
<p>dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;</p> <p>j. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;</p> <p>k. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;</p> <p>l. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>m. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan</p> <p>n. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>b. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan pengembangan perikanan ;</p> <p>c. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;</p> <p>d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;</p> <p>e. membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan - kecamatan potensial;</p> <p>f. mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk meningkatkan penjualan; dan</p> <p>g. membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan</p> <p>h. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.</p> <p>(5) Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, meliputi:</p> <p>a. mengembangkan angkutan transportasi lokal, antar kota dan kabupaten beserta sarana dan prasarannya;</p> <p>b. mengembangkan jalan kolektor primer jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang – Blitar – Tulungagung;</p> <p>c. mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;</p> <p>d. mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan kolektor; dan</p> <p>e. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan.</p> <p>(6) Strategi Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, meliputi:</p> <p>a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata;</p> <p>b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang;</p> <p>c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, industri dan</p>



Kebijakan	Strategi
	<p>perdagangan;</p> <ul style="list-style-type: none">d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dane. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif. <p>(7) Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). mengendalikan secara ketat perubahan terhadap kawasan hutan lindung;2). memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;3). meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan4). meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.b. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;2). mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan3). melestarikan kawasan yang termasuk hulu das dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;2). membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;3). mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;4). memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;5). membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan6). menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Blitar.d. Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;



Kebijakan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none">2). memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan3). meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai objek penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. <p>(8) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi terjadinya bencana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; danc. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa. <p>(9) Strategi untuk Pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi unggulan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). membatasi dan mengawasi kegiatan pengembangan pertanian pada kawasan konservasi;2). menjaga kualitas lahan, melalui kegiatan pergiliran budidaya tanaman pertanian ;3). meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui kegiatan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;4). mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya;5). Mengembangkan kegiatan ekstensifikasi melalui peningkatan kelas lahan perkebunan agar menjadi lebih produktif; dan6). menetapkan sentra pengembangan kegiatan pertanian pada masing-masing wilayah.b. Mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok;2). mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas;3). mengembangkan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang;4). meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;5). memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah



Kebijakan	Strategi
	<p>maupun masyarakat secara umum;</p> <ol style="list-style-type: none">6). meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan7). mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan nelayan. <p>c. Mengembangkan kawasan perkebunan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;2). memperluas pangsa pasar untuk penjualan produk hasil perkebunan yang dibantu oleh pemerintah dalam bentuk promosi;3). mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta;4). meningkatkan kegiatan koperasi usaha yang dapat menunjang perkembangan hasil perkebunan; dan5). menyediakan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. <p>d. Mengembangkan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sektor perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kademangan;2). mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di Kabupaten Blitar;3). mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri;4). mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial;5). mengembangkan konsep cluster sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak);6). memperkuat cluster sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi;7). mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global;8). mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber lokal dengan dukungan dari pihak pemerintah;9). mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan;10). menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan; dan11). menggalakan kerja sama antara pemerintah,



Kebijakan	Strategi
	<p>masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan.</p> <p>(10) Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan memperhatikan <i>linkage</i> yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing;b. mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial;c. menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata;d. menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata;e. mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;f. mengembang potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dang. menetapkan kawasan wisata. <p>(11) Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dilaksanakan dengan strategisebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;b. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;d. mengembangkan perumahan terjangkau; dane. mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba). <p>(12) Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;b. menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; danc. mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan. <p>(13) Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakandi Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1). mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau



Kebijakan	Strategi
	<p>Kawasan Industri Peternakan;</p> <ol style="list-style-type: none">2). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya;3). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi;4). meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (<i>ecofarming</i>);5). mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan6). mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas. <p>b. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan infrastruktur untuk mendukung perkembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok;2). mengembangkan pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran; dan3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga. <p>c. mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). meningkatkan kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti agar luas hutan tetap;2). menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)3). mengembangkan kegiatan ekonomi yang menunjang keberadaan PPI; dan4). mengembangkan wisata alam pantai di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto. <p>d. mengembangkan Kawasan Agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p>



Kebijakan	Strategi
	<ol style="list-style-type: none">1). memasarkan produk-produk agribis di tempat-tempat yang khusus menjual produk buah bermutu seperti swalayan, supermarket dan lain-lain);2). memfasilitasi promosi produk agrobis yang bermutu;3). mengembangkan rantai pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran agribis; dan4). menyediakan sarana pemasaran berupa terminal atau sub terminal agribisnis yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen. <p>e. mengembangkan kawasan agropolitan di seluruh Kecamatan Kanigoro, dengan strategi pengembangannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agroindustri;2). memperhatikan manajemen sarana dan prasarana produksi melalui ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan mutu; dan3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga. <p>f. meningkatkan prasarana jalan dari dan menuju pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi;</p> <ol style="list-style-type: none">1). membuka jalur lalu lintas (trayek) kendaraan umum dari pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi;2). mengembangkan terminal agribisnis di kawasan agroindustri;3). memberikan pinjaman modal kepada kelembagaan petani yang sudah terbentuk dan berfungsi; dan4). memberikan kemudahan bagi investor yang ingin membuka usaha di kawasan agroindustri berupa perizinan, pajak dan lain - lain. <p>g. mengembangkan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;2). meningkatkan pemanfaatan bangunan kuno dan peninggalan sejarah untuk penelitian pendidikan dan sebagai wisata budaya yang perlu dilestarikan; dan3). mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar bangunan kuno dan peninggalan sejarah. <p>h. memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, dengan strategi sebagai berikut:</p>



Kebijakan	Strategi
	<ol style="list-style-type: none">1). melindungi dan melestarikan desa-desa dan lokasi-lokasi yang memiliki kemurnian tradisi dari budaya luar;2). mengembangkan kawasan wisata harus ditunjang pula dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan3). mempromosikan obyek-obyek wisata di Kabupaten Blitar. <p>i. Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). meningkatkan pengawasan dan pelarangan fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;2). mengembangkan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;3). mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; dan4). mengembangkan keanekaragaman hayati kawasan lindung. <p>(14) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; danc. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031

Selain kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana diuraikan di atas, RTRW Kabupaten Blitar memuat rencana program yang meliputi program perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Berikut ini disajikan program perwujudan kawasan strategis Kabupaten Blitar sampai 2031. Namun, mengingat kesamaan periodisasi dengan RPJMD, maka program kawasan strategis difokuskan pada Tahap II (2016-2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021.



Tabel 4.7
Program Perwujudan Kawasan Strategis

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi													
	a. Pengamanan kawasan wilayah sungai dan konservasi kawasan hulu sungai	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar, Swasta										
	b. Pelestarian dan pengelolaan DAS brantas secara lintas wilayah	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar										
	c. Pembuatan tanggul pada kawasan DAS brantas, dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata Provinsi, Disporbudpar										
	d. Peningkatan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga										
2.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten													
2.1	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi													
	a. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberadaan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kabupaten Blitar.	Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Peternakan, Swasta										
	b. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang minapolitan di Kecamatan Nglekok	Kecamatan Nglekok.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta										
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agroindustri	Kecamatan Pongkok dan Kecamatan Kanigoro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perikanan, Swasta										



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)						
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th						
	d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, meningkatkan aksesibilitas menuju obyek wisata serta peningkatan promosi wisata bagi wisata Candi Penataran, Candi Kencong, Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, Pantai Jolosutro.	wisata penataran, candi kencong, pantai serang, pantai tambakrejo, pantai jolosutro.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian, Swasta														
	e. Peningkatan dan penyediaan akses serta sarana prasarana penunjang kawasan pariwisata Gunung Kelud dan Candi Penataran melalui paket wisat dan promosi	Gunung Kelud Kecamatan Gandusari dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian, Swasta														
2.2	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																	
	a. Zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi;	kawasan Candi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nglegok; candi Simping di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan; dan candi Sawentar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata, Swasta														
	b. Pelestarian dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kawasan obyek wisata ritual	Gunung Kelud dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata, Swasta														
	c. Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.	Gunung Kelud dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata, Swasta														
3.3	Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																	
	a. Mengadakan kegiatan reboisasi terhadap hutan gundul dengan mengikutsertakan masyarakat.	BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten														



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	b. Membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung.	BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten										
	c. Meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya.	BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten										



c. Telaahan KLHS

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*).

Dengan mempertimbangkan beberapa masukan perbaikan untuk visi-misi, tujuan, arah kebijakan dalam RPJMD, catatan rekomendasi ini yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rumusan-rumusan dalam RPJMD, baik secara konseptual maupun secara praktis dalam program dan kegiatan. Hal ini terutama dalam bidang pemberdayaan aparatur daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemantapan ekonomi demi memberikan definisi yang lebih terarah pada visi-misi membentuk Kabupaten Blitar yang “berdaya saing”.

Berikut ini disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.



Tabel 4.8
Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
1	Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan	<p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;</p> <hr/> <p>Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen RIPPDA yang mengatur pemanfaatan lahan dengan peruntukan pariwisata. • Pengintegrasian antar program dan antar stakeholder • Penyusunan zoning regulation yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan lahan apabila kawasan perdesaan mulai berkembang. • Pengawasan terhadap kesesuaian dokumen tata ruang dengan ijin mendirikan bangunan. • Perencanaan tata kota harus disesuaikan dengan daya tampung dan kemampuan lahan dan harus tetap bisa diandalkan kelestariannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi yang mengatur peruntukan lahan baik peruntukan kawasan lindung maupun budidaya, pengawasan terhadap pembangunan dengan melakukan pengetatan izin administrasi pembangunan misalnya IMB, pajak dan retribusi. • Pembuatan regulasi untuk pembatasan wilayah yang diperbolehkan adanya pembangunan dan tidak diijinkan adanya pembangunan • Pengembangan wisata berbasis budaya lokal yang positif dan sesuai tatanan sosial, hukum negara dan agama 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang yang memberikan jaminan kemudahan akses terhadap kawasan sekitarnya • Penerapan NSPK (Norma Standar Pedoman dan Kriteria) pelaksanaan tata ruang. • Memperkuat interelasi desa-kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi pada pusat perkotaan. • Pengendalian perubahan pemanfaatan lahan (terutama pertanian menjadi



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
2	Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan	<p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;</p> <p>Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen tentang lingkungan pada kawasan pengembangan pariwisata yang mengatur dampak limbah dari kegiatan pariwisata. • Penyusunan masterplan persampahan • Peningkatan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk semua wilayah. • Peningkatan ketrampilan pemanfaatan sampah/limbah yang berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengontrolan terhadap penggunaan lahan pada objek wisata dan disekitar objek wisata dengan mempertegas IMB/AMDAL/RKL/RP L • Perlu menambah sarana pembuangan sampah terutama di lokasi wisata. Selain itu perlu mendirikan unit pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu • Pembuatan regulasi terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari objek wisata • Peningkatan kualitas 	Ya	<p>perumahan-permukiman) serta pengendalian perkembangan sektor pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi secara berkala terkait regulasi penataan ruang dan zoning regulation • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan • Dukungan Pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan limbah dan pengurangan produksi sampah. 	TPA dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan persampahan sejak hulu hingga hilir.		
3	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik	<p>Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pemerintah kabupaten Blitar;</p> <p>Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah melalui penerapan prinsip <i>"the right man on the right place"</i>;</p> <p>Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat teknologi informasi untuk masing-masing SKPD. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi daerah Melakukan kerjasama baik dengan pihak swasta maupun institusi/universitas dalam penerapan teknologi informasi yang tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan budaya lokal dan promosidaerah serta dalam pelayanan publik 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pengetahuan masyarakat luas khususnya generasi muda dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna di beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi informasi



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		profesionalisme;				
		Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah;				
		Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;				
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;				
		Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;				
		Pengembangan iklim usaha secara sehat serta				



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		<p>melindungi konsumen;</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.</p>				
4	Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/management pemerintahan Desa/Kelurahan	Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi • Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan dan pembangunan wilayah sehingga mampu berdaya saing dengan wilayah lain. 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan wilayah • Penguatan program peningkatan kerjasama dalam pembangunan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;		pengembangan ekonomi lokal masyarakat.		wilayah
5	Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola)	Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan regulasi oleh badan penanaman modal sehingga investasi yang dilakukan tepat sasaran. • Peningkatan peran masyarakat/investor lokal dalam partisipasi pembangunan kota. • Pengelolaan budaya lokal agar menjadi lebih bernilai jual • Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi • Program yang tepat sasaran dan merata bagi usaha-usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas produksi lokal dan sosialisasi investasi lokal sehingga perputaran perekonomian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Blitar. • Peningkatkan kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan perekonomian di daerahnya. 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah. • Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> mikro yang berasal dari masyarakat termasuk home industry • Pengaktifan kembali UMKM yang pasif yang terdapat di Kabupaten Blitar. • Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna pengembangan ekonomi lokal masyarakat. • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi dan UMKM. 			<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian jenis aktivitas pengembangan investasi dan mengutamakan potensi ekonomi local. • Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan ekonomi lokal • Penguatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6	Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian.	Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pertanian dan peningkatan penggunaan teknologi pertanian sehingga investasi dilakukan pada sektor pertanian bukan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. • Pengintegrasian serta Implementasi antar program dan kerjasama antar stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi pertanian yang baru dan modern sehingga dapat meningkatkan hasil panen sehingga petani dapat meningkatkan kesejahteraannya dan tidak beralih mata pencahariannya. • Pengembangan kewirausahaan dengan mengolah hasil panen para 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah sekitarnya. • Perbaikan dan perawatan pasar tradisional guna peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian lokal. • Manajemen yang berkualitas



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pertumbuhan ekonomi • Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian • Penyuluhan dari dinas pertanian terkait metode dan teknologi pertanian yang efektif dan efisien. • Penguatan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai lembaga penggerak dalam sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • petani agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. • Penyuluhan dan pembinaan usaha kecil dan menengah terutama terkait dengan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan kualitas produk. • Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kemudahan perijinan pendirian Agroindustri hulu (produksi input usaha tani) dan agroindustri hilir (pengolahan hasil pertanian) • Perlindungan terhadap harga jual hasil panen sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. 		<ul style="list-style-type: none"> • untuk penggunaan lahan-lahan yang akan direncanakan ditetapkan sebagai area LP2B • Memperkuat interelasi desa-kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mewadahi perkembangan aktivitas ekonomi berbasis pertanian di daerah sekitarnya. • Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan desa-kota.
7	Meningkatnya penggunaan	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan pusat dan sub pusat yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi antara pengembangan 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sarana



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	kendaraan pridadi sebagai akibat menurunnya kualitas serta sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan.	<p>semua bidang;</p> <hr/> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;</p> <hr/> <p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam</p> <hr/> <p>Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah</p>	<p>memiliki akses yang baik dan tersedianya angkutan umum yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum • Memperlebar rumaja jalan pada jalan-jalan yang sudah tidak dapat menampung kendaraan dan merencanakan rekayasa lalu lintas • Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi publik • Pengintegrasian dan pembentukan linkage sistem antar wilayah pusat kegiatan dengan lokasi terminal atau sarana transportasi publik. • Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem transportasi publik • Perbaikan sistem transportasi umum dan perbaikan fisik transportasi umum 	<p>kawasan dan pengembangan infrastruktur jalan dengan sarana transportasi publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kembali pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk meratakan kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, serta mengimbangi pemusatan perkembangan pariwisata daerah. 		<p>transportasi berupa terminal dan perbaikan guna peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan manajemen lalu lintas dan jalur kendaraan umum dengan jangkauan akses yang terintegrasi dengan pusat kegiatan. • Pengaturan sistem transportasi umum yang efektif dan efisien.



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			sehingga masyarakat tertarik untuk beralih ke moda transportasi umum.			
8	Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai.	Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga medis/kesehatan dari dinas terkait • Peningkatan pelatihan kepada tenaga medis/kesehatan • Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai • Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dengan jangkauan pelayanan kesehatan semakin diperluas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penambahan sarana prasarana pendukung kesehatan 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga kesehatan pada wilayah terkecil yakni perdesa dengan sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung dan memadai.
9	Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik)	Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang berkompeten • Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga pendidik dari dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan program wajib belajar 12 Tahun. • Penguatan peran lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik yang didukung secara penuh oleh Dinas Pendidikan. • Penambahan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era global;	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelatihan kepada tenaga pendidik• Penyediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang memadai			sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar
		Pengembangan sektor pertanian, koperasi, UMKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing;				
		Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem informasi desa;				
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.				



4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Blitar 2016-2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Blitar, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2016-2021.

a. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi

Dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan kecenderungan melambat. Perlambatan perekonomian yang terjadi di tahun 2013 merupakan dampak dari pergerakan perekonomian nasional yang pada tahun itu juga mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh pencabutan sebagian subsidi harga BBM pada pertengahan tahun. Dari capaian terakhir laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 serta dengan melihat trend capaiannya, dapat diprediksi bahwa target akhir pertumbuhan ekonomi sebesar 6,97 persen sulit untuk diwujudkan.

Secara umum tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negaran-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan daya saing perekonomian adalah daya saing perekonomian akan semakin kuat oleh terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.



b. Ketersediaan infrastruktur yang memadai

Infrastruktur wilayah merupakan tulang punggung sekaligus berfungsi menjadi pendukung pembangunan suatu daerah. Berbagai aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah tentu saja membutuhkan dukungan atau ketersediaan infrastruktur yang memadai, antara lain untuk perekonomian, social, budaya dan pemerintahan.

Pembangunan atau pengembangan infrastuktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Lebih khusus lagi, infrastruktur tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang berhak diperoleh oleh masyarakat. Berbagai pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain meliputi penyediaan jalan dan jembatan, angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, sanitasi termasuk jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan

Keadilan dan kesejahteraan akan menimbulkan masyarakat yang aman dan nyaman. Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Kabupaten Blitar walaupun bukan termasuk dalam kawasan yang dikhawatirkan konflik sosial yang sesuai tertuang pada RPJMD Provinsi Jatim, namun kondisi keamanan dan ketertiban tetap menjadi perhatian. Kondisi keamanan dan kondusifitas dalam berpolitik, mematuhi aspek hukum, dan demokrasi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Indikator yang menitikberatkan pada kemajuan demokrasi, penurunan kriminalitas, dan peningkatan pengamalan pancasila menjadi isu yang paling mempengaruhi isu keamanan dan ketertiban.

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kesejahteraan masyarakat memiliki banyak komponen diantaranya menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tiga komponen tersebut



dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 66,49, sehingga mendudukkan Kabupaten Blitar pada urutan ke-23 dari 38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

1) Pendidikan

Komponen pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan pendidikan diharapkan mampu dalam mencapai pemerataan kesempatan memperolehnya bagi seluruh penduduk.

Isu bidang pendidikan memiliki beberapa ukuran indikator kinerja. Diantaranya adalah indikator APM, APK dan APS. Kabupaten Blitar pada kurun waktu lima tahun terakhir angka indikator APM, APK, dan APS cenderung naik turun karena sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa/mutasi siswa disamping pola pikir orang tua yang lebih senang menyekolahkan anak ke wilayah kota dengan alasan gengsi, meski secara kualitas sekolah kabupaten tidak kalah. Untuk rasio jumlah guru belum sepenuhnya terpenuhi karena untuk jenjang SD masih kekurangan guru kelas sedang jenjang pendidikan menengah kelebihan guru pelajaran. Sehingga dapat disimpulkan secara umum permasalahan terutama pendidikan di Kabupaten Blitar adalah pemerataan guru dan peningkatan angka partisipasi.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar, selaras dengan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk



menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global.

2) Kesehatan

Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang kedua yakni bidang kesehatan. RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai isu kesehatan dan gizi. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Derajat kesehatan di Kabupaten Blitar mempunyai 45 indikator. Derajat kesehatan di Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perbaikan. Terdapat banyak indikator dalam pencapaian derajat kesehatan, seperti yang direncanakan maka terdapat indikator mencapai target yang ditetapkan dan beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satu indikator diantaranya persentase balita gizi buruk dari target maksimal sebesar 0,1% dari jumlah Balita, telah dicapai sebesar 0,08% pada tahun 2014 dan pada pertengahan tahun 2015 sebesar 0,06%, persentasenya menurun dari tahun 2011-2015, hal ini menunjukkan bahwa status gizi Balita semakin meningkat.

Banyaknya indikator isu kesehatan membuat bidang ini menjadi perhatian serius untuk direncanakan secara matang. Isu kesehatan menjadi isu pendukung dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu 45 indikator kesehatan harus dicapai dalam nilai yang baik dengan pemenuhan melebihi target yang telah dibuat.

3) Ekonomi

Indikator dari Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang ketiga adalah bidang Ekonomi. Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir dalam target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan memang tidak pernah tercapai. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blitar hanya berkisar 5% dan tidak pernah mencapai target yang tiap tahun selalu meningkat. Laju inflasi yang terjadi juga cenderung fluktuatif dari angka 3,62% pada tahun 2011 dan merosot pada angka 1,71 di tahun 2015.



Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator bidang ekonomi salah satunya adalah pengaruh ekonomi nasional dan internasional, maka pengamanan dan perhatian terhadap ekonomi daerah menjadi tulang punggung untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu ekonomi dipandang menjadi salah satu indikator yang paling mempengaruhi dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain IPM, salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. AHH merupakan salah satu variabel dari indeks kesehatan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM, indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia. Tingginya AHH merupakan salah satu representasi dari tingginya kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Secara umum, angka yang ditargetkan kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2011-2014 tidak dapat dicapai. Namun, kecenderungan capaian selama pelaksanaan periode RPJMD dapat dikatakan lebih agresif dibanding kecenderungan target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, isu kesejahteraan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial ini menjadi penting untuk diperhatikan. Alat ukur kesejahteraan mengharuskan banyak indikator pendukung demi tercapainya validitas kesejahteraan yang lebih baik. Konsep kesejahteraan menginduk pada bidang yang lain, jadi jika ingin mendapatkan indikator kesejahteraan dengan nilai yang baik dukungan isu strategis yang lain harus baik.

e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ujung tombak pelayanan publik. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan sulit yang membutuhkan paduan intelegensia yang tinggi, pengalaman panjang dan kesahajaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena tugas yang maha berat tersebut, seyogyanya PNS adalah orang-orang terbaik di eranya dan memiliki jiwa pengabdian kepada negara.

Pemerintah Kabupaten Blitar memahami betul bahwa bahan utama pelayanan publik yang prima terletak pada kualitas SDMnya. Sayangnya kondisi kualitas SDM saat ini belum mencerminkan hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi ada beberapa, antara lain belum memadainya



kompetensi aparatur, masih rendahnya disiplin kerja aparatur, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung, koordinasi antar instansi terkait belum terlaksana secara optimal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan masih banyaknya pejabat eselon yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.

Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, diharapandapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

f. Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan kegiatan pariwisata yang baik memerlukan kesiapan setiap elemen dari produk wisata yaitu aksesibilitas, daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas serta amenities wisata. Keterpaduan unsur-unsur pembangunan kegiatan wisata ini akan mengakibatkan semakin tingginya potensi serta peluang terciptanya kegiatan pariwisata sebagai unggulan pembangunan suatu wilayah. Tanpa dukungan yang memadai dari setiap unsur tersebut, keunggulan komparatif dari suatu daya tarik wisata akan menjadi sangat minim dan mengakibatkan terbatasnya peluang daerah tersebut untuk mampu mempertahankan pengembangan pariwisata di daerahnya.

Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi kepariwisataannya. Potensi kepariwisataannya antara lain daya tarik wisata budaya yang meliputi wisata candi, arca kuno, serta event kebudayaan. Potensi yang kedua antara lain adalah daya tarik wisata alam. Dua potensi kepariwisataan ini perlu dikembangkan serta di inovasikan.

Potensi pengembangan wisata budaya yang ada di Kabupaten Blitar, selama ini mempunyai faktor penghambat seperti: akses, infrastruktur, keamanan, dan kelayakan benda cagar budaya itu sendiri. Beberapa permasalahan dari faktor penghambat tersebut harus diselesaikan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan. Event budaya yang merupakan bagian dari wisata budaya yang merupakan potensi kedaerahan harus juga di kembangkan secara inovasi agar daya tarik wisatawan yang hadir dalam event kebudayaan tersebut semakin meningkat.

Salah satu keuntungan letak Kabupaten Blitar yang berbatasan langsung dengan samudera adalah memiliki puluhan pantai yang eksotis dan menantang dengan jumlah lebih dari 26 pantai terhampar di daerah ini.



Namun dari kesemua pantai dan potensi wisata alam yang ada permasalahan utamanya adalah infrastruktur yang tersedia masih minim.

Dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata maka dibutuhkan strategi pengembangan kepariwisataan. Strategi yang pertama adalah pengembangan produk wisata. Pengertian dari produk wisata disini adalah segala fasilitas atau kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya. Produk wisata tersebut, antara lain meliputi objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, amenitas (akomodasi, restoran atau rumah makan), dan aksesibilitas (transportasi). Strategi yang kedua adalah pengembangan prasarana. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Blitar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon dan lainnya.

Strategi yang ketiga adalah pengembangan usaha atau investasi. Hal terpenting dalam pengembangan investasi pariwisata di Kabupaten Blitar, yaitu potensi pasar wisatawan, adanya akses jalan yang baik berupa jalan provinsi, serta sikap masyarakat yang terbuka dan *fairness* dengan investor luar daerah.

g. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah

Kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diciptakan. *Public Private Partnership* merupakan salah satu strategi penguatan sektor perekonomian. Bentuk kerjasama pemerintah dan dunia usaha salah satunya adalah dalam hal investasi. Berdasarkan data realisasi investasi daerah tahun 2010-2012 terlihat bahwa sebagian besar investasi di Kabupaten Blitar adalah dibidang perdagangan yaitu berupa ijin usaha perdagangan, disusul dengan bidang perindustrian dan jasa konstruksi. Target investasi bidang-bidang tersebut harus dinaikkan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Adanya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah bergantung pada tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan karena berkenaan dengan infrastruktur dasar yang berpengaruh pada kegiatan investasi. Selain itu pada level mikro, iklim investasi dipengaruhi oleh fasilitas keamanan, ketertiban wilayah, kemudahan dalam pengurusan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Dunia usaha yang saat ini dikembangkan di daerah, memang harus bersiap untuk menghadapi persaingan global. Peran serta hubungan



kelembagaan antar pemerintah serta pejabat pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, dan kemudahan dalam pengembangan usaha ekonomi daerah harus dilakukan secara bersama. Dukungan akses, infrastruktur, serta kemudahan melakukan perizinan akan menjadi penentu kebijakan pemerintah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah.

Selain pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta/dunia usaha/masyarakat, pembangunan Blitar juga membuka peluang kerjasama pemerintah dengan pemerintah baik lingkup regional, nasional maupun internasional. Peluang kerjasama tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

h. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Menyelenggarakan semangat lahirnya Undang-Undang Desa dalam konteks desa yang lebih implementatif terutama dalam hal pengelolaan dana dan perencanaan mengharuskan pemerintah desa dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan jelas dengan program kerja yang terarah. Namun, penerapan prinsip tersebut membutuhkan kesiapan perangkat desa dan kelembagaan desa serta penetapan *key performance indicator* (KPI). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan KPI wajib diterapkan dalam rangka penyaluran Dana Desa agar seluruh kegiatan pemerintah desa memiliki output dan outcomes yang optimal. Selain hal tersebut juga membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kapasitas pengelola Dana Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan perencanaan. Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan desa



yang lebih akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

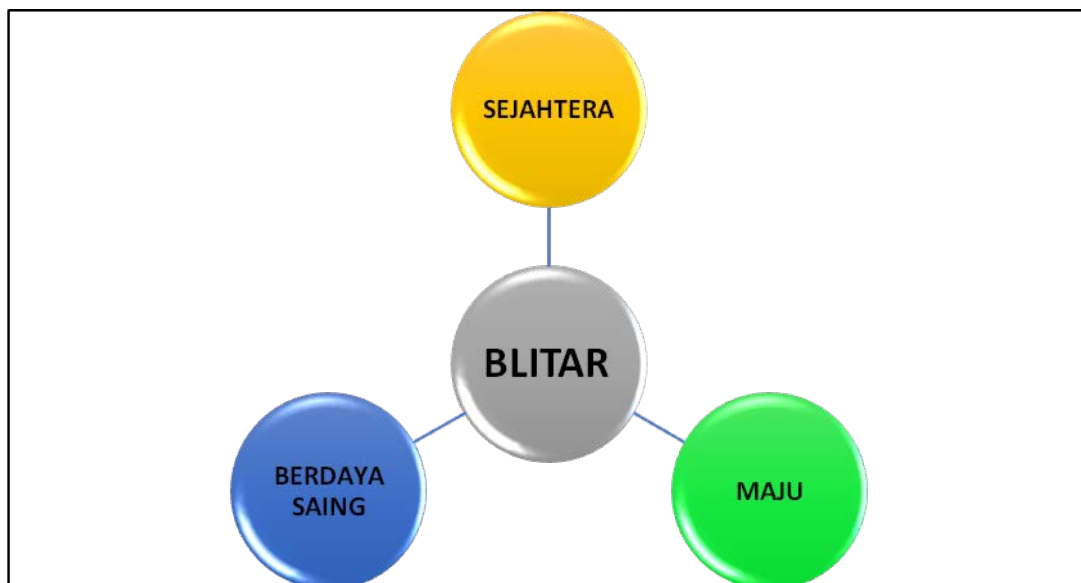
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Gambar 5.1
Visi Kabupaten Blitar 2016-2021





Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI 1:

Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.



MISI 99:

Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

MISI 999:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

MISI 90:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

MISI 90:

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

MISI 90:

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan pembangunan Kabupaten Blitar 2016-2021 disusun untuk menjabarkan masing-masing misi. Dalam mengukur pencapaian tujuan



yang diharapkan di akhir periode pembangunan jangka menengah, maka disusun indikator dan target indikator pernyataan tujuan.

Tabel 5.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan Tahun 2021
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat		
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	a. Pertumbuhan ekonomi (%) b. Indeks Gini	> 5,5 ≤ 0,3
Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum		
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	≥ 70
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	> 80
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing		
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	> 47
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan		
6. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,75

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar berdasarkan misi pembangunan 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%)	1. Menurunnya angka kemiskinan	a. Angka Kemiskinan (%)	10,22	10-10,22	9,9-10	9,8-9,9	9,7-9,8	9,6-9,7	≤ 9,6
			b. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	23,39*)	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
			c. Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
	2. Indeks Gini	2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	a. Persentase penanganan konflik (%)	100	100	100	100	100	100	100
			b. Persentase penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	100	100	100
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	BB	A	A
			b. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	36	30 besar	30 besar	30 besar	20 besar	20 besar	10 besar
			c. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing										
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	8. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,01*)	17,08	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51
			b. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,86*)	13,04	13,36	13,86	14,36	14,86	15,36
			c. Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%P)	35,89*)	35,76	35,63	35,56	35,43	35,32	35,21
			d. Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata (%)	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		9. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		10. Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	a. Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	75	77	79	80	82	84	85
			b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan										
6. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	11. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal (%)	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0

Catatan: *) data sementara bersumber dari BPS Kabupaten Blitar



BAB STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

a. Strategi Kesatu, meningkatkan kesempatan kerja.

Arah Kebijakan: peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha.

b. Strategi Kedua, meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Arah Kebijakan: bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Strategi Ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Arah Kebijakan: pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.

d. Strategi Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Arah Kebijakan: peningkatan perlindungan tenaga kerja.

e. Strategi Kelima, menumbuhkan wirausaha baru.

Arah Kebijakan: peningkatan pelatihan kewirausahaan.

f. Strategi Keenam, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.

Arah Kebijakan: penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

g. Strategi Ketujuh, meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Arah Kebijakan: pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM.

h. Strategi Kedelapan, meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan.

Arah Kebijakan: penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Menurunnya angka kemiskinan	1. Meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
		2. Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah	Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
		3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja
		5. Menumbuhkan wirausaha baru	Peningkatan pelatihan kewirausahaan
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	6. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
		7. Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM
		8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan	Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum.

a. **Strategi Kesatu**, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah Kebijakan: peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

b. **Strategi Kedua**, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

c. **Strategi Ketiga**, meningkatkan mitigasi bencana.

Arah Kebijakan: meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap daerah rawan bencana.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-2

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya stabilitas wilayah	1. Mewujudkan Kamtibmas	Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
		2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
		3. Meningkatkan mitigasi bencana.	Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana

Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. **Strategi Kesatu**, meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.

Arah Kebijakan: jaminan akses terhadap layanan pendidikan.

b. **Strategi Kedua**, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

Arah Kebijakan: peningkatan sertifikasi tenaga pendidik.

c. **Strategi Ketiga**, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Arah Kebijakan: peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan.

d. **Strategi Keempat**, meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.



Arah Kebijakan: peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan.

- e. **Strategi Kelima**, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat.

Arah Kebijakan:

- (1) Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat.
- (2) Pengembangan lingkungan sehat.

Tabel 6.3
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-3

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	Jaminan akses terhadap layanan pendidikan
		2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik
2	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan
		4. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
		5. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat	a. Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat b. Pengembangan lingkungan sehat

Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

- a. **Strategi Kesatu**, melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel.

Arah Kebijakan: peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan.

- b. **Strategi Kedua**, mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal.

Arah kebijakan: peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah.



c. **Strategi Ketiga**, meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Arah Kebijakan: peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. **Strategi Keempat**, menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.

Arah Kebijakan: penataan struktur kelembagaan daerah sesuai kebutuhan daerah.

e. **Strategi Kelima**, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Arah Kebijakan: menerapkan pembinaan kinerja aparatur.

f. **Strategi Keenam**, menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Arah kebijakan: peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD.

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-4

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel	Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
		2. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal	Peningkatan kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		4. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien	Penataan Struktur Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah
		5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Menerapkan pembinaan kinerja aparatur
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6. Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien	Peningkatan standar kualitas pelayanan SKPD



Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing

a. Strategi Kesatu, meningkatkan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Arah kebijakan:

- (1) Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM.
- (2) Peningkatan peran koperasi, UMKM dalam perekonomian masyarakat.

b. Strategi Kedua, mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial.

Arah Kebijakan:

- (1) Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
- (2) Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah.

c. Strategi Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian.

Arah Kebijakan:

- (1) Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas.
- (2) Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.

d. Strategi Keempat, mengembangkan destinasi pariwisata.

Arah Kebijakan:

- (1) Pengembangan destinasi kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata.
- (3) Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata.

e. Strategi Kelima, menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan.

Arah kebijakan: penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan.

f. Strategi Keenam, meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.



Arah Kebijakan: peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan

g. Strategi Ketujuh, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan: peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan daya saing usaha koperasi, UMKM	a. Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM. b. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat
		2. Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial	a. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial b. Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah
		3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian	a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas b. Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.
		4. Mengembangkan destinasi pariwisata	a. Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, sertawisata alam b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata. c. Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya pelayanan perijinan	5. Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan	Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan
3	Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	6. Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.	Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan.
		7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup

Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

a. **Strategi Kesatu**, memperkuat kelembagaan pemerintah desa.

Arah Kebijakan:

- (1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa.

b. **Strategi Kedua**, mengembangkan kawasan perdesaan.

Arah Kebijakan: pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal.

c. **Strategi Ketiga**, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Arah Kebijakan: peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-6

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Memperkuat kelembagaan pemerintah desa	a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa
		2. Mengembangkan kawasan perdesaan	Pemetaan, pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa



6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Arah kebijakan pembangunan merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan upaya menjawab isu strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan yang telah dijabarkan berdasarkan strategi sebagaimana dimuat pada subbab sebelumnya, memberikan gambaran mengenai fokus pembangunan per tahun.

Arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Blitar periode 2016-2021 juga memperhatikan kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Beberapa hal yang menjadi agenda prioritas (AP) Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, yaitu:

1. Penataan perkotaan Kanigoro
2. Penyediaan air minum
3. Pengembangan pariwisata dan desa wisata
4. Pengembangan dan pengolahan produk pertanian
5. Pengembangan daya saing UMKM
6. Pengembangan kawasan perdesaan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dipetakan diatas, selanjutnya dipetakan per tahun untuk memberi kerangka pembangunan tahunan menuju pencapaian sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan tahunan memberikan panduan tentang urutan pelaksanaan masing-masing strategi sehingga membentuk suatu keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap tahapan tahun menunjukkan strategi mana yang menjadi fokus atau prioritas pada tahun tersebut, dengan tetap memperhatikan, mempersiapkan, ataupun memantapkan pelaksanaan strategi yang lain yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 4 dan tahun 5 merupakan tahun lanjutan dan penguatan pelaksanaan strategi-strategi yang telah diawali pada tahun-tahun sebelumnya.

6.2.1. Arah Kebijakan Tahun 2017

Pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran melalui strategi-strategi yang merupakan tumpuan awal dalam pembangunan empat tahun berikutnya dalam pencapaian visi dan misi. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah:



- a. Sasaran 2 (S2) yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dengan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan.
- b. Sasaran 3 (S3) yaitu terwujudnya stabilitas wilayah dengan strategi:
 - Mewujudkan Kamtibmas.
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.
- c. Sasaran 6 (S6) yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan strategi:
 - Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal.
 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
 - Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.
 - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- d. Sasaran 7 (S7) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.
- e. Sasaran 8 (S8) yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata dengan strategi:
 - Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian.
 - Mengembangkan destinasi pariwisata.
- f. Sasaran 9 (S9) yaitu meningkatnya pelayanan perijinan dengan strategi menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan.
- g. Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi memperkuat kelembagaan pemerintah desa.

6.2.2. Arah Kebijakan Tahun 2018

Pembangunan Tahun 2018 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran berikutnya yang telah ditetapkan. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun kedua RPJMD 2016-2021 adalah:

- a. Sasaran 1 (S1) yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan strategi:
 - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
 - Menumbuhkan wirausaha baru.



- b. Sasaran 2 (S2) yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dengan strategi:
 - Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Sasaran 3 (S3) yaitu terwujudnya stabilitas wilayah dengan pelaksanaan strategi ke-3 yaitu peningkatan mitigasi bencana.
- d. Sasaran 4 (S4) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dengan strategi:
 - Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.
 - Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
- e. Sasaran 5 (S5) yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi:
 - Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.
 - Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.
- f. Sasaran 8 (S8) yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata dengan strategi:
 - Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
 - Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah dan sentra industri potensial.
- g. Sasaran 10 (S10) yaitu efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan dengan strategi meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.
- h. Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi mengembangkan kawasan perdesaan.

6.2.3. Arah Kebijakan Tahun 2019

Selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan Tahun 2019 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama dan kedua. Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan pada tahun ketiga RPJMD 2016-2021 adalah:

- a. Sasaran 1 (S1) yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan strategi:
 - Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
 - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
- b. Sasaran 5 (S5) yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat.



- c. Sasaran 10 (S10) yaitu efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan dengan strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.
- d. Sasaran 11 (S11) yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

6.2.4. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 adalah pemantapan dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017-2019 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi pembangunan, sehingga pada tahun 2020 tinggal melaksanakan satu strategi dari sasaran 1 yaitu meningkatkan kesempatan kerja.



6.2.5. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk melanjutkan pencapaian target-target pembangunan yang belum optimal guna mencapai visi dan misi pembangunan. Pembangunan selama beberapa tahun terakhir menyentuh berbagai aspek kehidupan dan sektor yang berdaya ungkit untuk mewujudkan masyarakat Blitar yang sejahtera, maju dan berdaya saing.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tahapan arah kebijakan tahunan, berikut ini disajikan tabel arah kebijakan:



Tabel 6.7
Arah Kebijakan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Menurunnya Angka Kemiskinan		Strategi 1.3 : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Strategi 1.5 : Menumbuhkan wirausaha baru	Strategi 1.2 : Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Strategi 1.4 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja	Strategi 1.1 : Meningkatkan kesempatan kerja	
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Strategi 1.8 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan	Strategi 1.6 : Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman Strategi 1.7 : Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	 		
Terwujudnya stabilitas wilayah	Strategi 2.1 : Mewujudkan Kamtibmas Strategi 2.2 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan	Strategi 2.3 : Meningkatkan mitigasi bencana.			
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat		Strategi 3.1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat Strategi 3.2 : Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik			
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat		Strategi 3.3 : Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Strategi 3.4 :	Strategi 3.5 : Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat		



Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
		Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan			
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<p>Strategi 4.1 : Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel</p> <p>Strategi 4.2 : Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal</p> <p>Strategi 4.3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah</p> <p>Strategi 4.4 : Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien</p> <p>Strategi 4.5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah</p>				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<p>Strategi 4.6 : Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien</p>				
Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	<p>Strategi 5.3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian</p> <p style="text-align: center;">AP 4</p> <p>Strategi 5.4 :</p>	<p>Strategi 5.1 : Meningkatkan daya saing usaha koperasi, UMKM</p> <p>Strategi 5.2 : Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra</p> <p style="text-align: center;">AP 5</p>			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
	Mengembangkan destinasi pariwisata	industri potensial			
Meningkatnya pelayanan perijinan	Strategi 5.5 : Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan				
Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan		Strategi 5.6 : Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan	Strategi 5.7 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup		
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Strategi 6.1 : Memperkuat kelembagaan pemerintah desa	Strategi 6.2 : Mengembangkan kawasan perdesaan	Strategi 6.3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		

AP 3

AP 6



BAB **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM** **PEMBANGUNAN DAERAH**

7

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan 6 misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar. Terdapat 326 program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1 berikut ini:



Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat										
1	Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72.63%	76.34%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing	0.09%	0.22%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINKOP DAN UMKM
					Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal	92.5%	100%	Penanaman Modal	Bagian Perekonomian
			Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah	Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah	Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (fokus sasaran TKI purna/keluarga TKI)	2%	7%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang ditangani	16%	29%	Sosial	Dinas Sosial
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik	100%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	100%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Persentase Pembinaan Keluarga	68%	70%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program transmigrasi regional	Persentase transmigran yang diberangkatkan	20.96%	31.25%	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
										Transmigrasi
					Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan yang dirumuskan	100%	0%	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					Program Fasilitasi & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan yang difasilitasi	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perekonomian Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan perekonomian rakyat	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian
					Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Ekonomi	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan sumberdaya ekonomi	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian
			Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan	0	1.20%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja	Peningkatan perlindungan tenaga kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diberi pembinaan	7.03%	11.70%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Menumbuhkan wirausaha baru	Peningkatan pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan Kewira Usahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	256ribu	0,1%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINKOP DAN UMKM
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	75%	85%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
					Program pengembangan Kinerja Air Limbah	Persentase pengelolaan limbah tinja	60%	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Kawasan Kumuh	15%	0%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		
			Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPAM) dan PDAM	Program pengembangan kinerja Pengeolaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	72%	93%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan	Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang direhab/dipelihara	61%	86.79%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN		
							Persentase jembatan direhab/dipelihara	80%	90.92%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
							Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	68%	85.58%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
							Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	51%	95.10%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
							Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi	Persentase jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitasi	82%	90.48%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
							Program operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi	Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara	60%	86.02%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
									RUANG	MARGA DAN PENGAIRAN
					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	14.0%	86.29%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab	30%	45%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten	53%	67%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	0%	56%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan	Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor	2%	1,5%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir	71%	86%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang berijin	11%	20%	Perhubungan	Dishubkominfo
Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum										
1	Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Mewujudkan stabilitas wilayah	Mewujudkan Kamtibmas	Peningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	98%	95%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase kasus Pekat yang ditangani	98%	95%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik	Persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan	78%	95%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/ mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	33%	60%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM	37%	80%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	56%	85%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	25%	60%	Pertanahan	Bagian Pemerintahan
					Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan & anak	Persentase Penanganan pelayanan KDRT yang melapor	70,50%	78%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Dibina	100%	100%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar
			Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah	98%	95%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			perundang-undangan		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan	65%	90%	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
					Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
					Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	1. Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	70%	95%	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
						2. Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang didokumentasikan	100%	100%		
			Meningkatkan mitigasi bencana.	Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana	Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase terbentuknya desa tangguh	0%	17.5%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
					Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase korban bencana yang terbantu	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase daerah titik bencana yang ter rehabilitasi dan terekonstruksi	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
Misi III: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia										
	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	Jaminan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Persentase APK PAUD	30%	60%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2. Persentase APK jenjang TK						80%	100%			
3. Persentase APM jenjang TK						50%	65%			
Program Pendidikan TK dan Sekolah Dasar					1. Persentase APM jenjang SD	100%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
					2. Persentase APK jenjang SD	100%	100%			
					3. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang TK	60%	75%			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						4. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SD	89%	95%		
					Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase APM jenjang SMP	82%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					2. Persentase APK jenjang SMP	100%	100%			
					3. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SMP	95%	98%			
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	60%	85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program Pengembangan dan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang terlayani tepat waktu	100%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program Pendidikan Non Formal	1. Persentase APM pendidikan non formal	60%	85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						2. Persentase APK pendidikan non formal	65%	90%		
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum	11.000	45%	Perpustakaan	KPAD
			Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik	Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi	80%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	70%	80%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	50%	53%	Kesehatan	RSUD
			Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	75%	86%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas dan Pustu	Persentase Kondisi Bangunan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat	50%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab		
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
					Program Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Baru	Persentase Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Baru	0%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan		
					Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan prasarana RS	Persentase sarana dan prasarana RS	27%	42%	Kesehatan	RSUD		
					Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata BLUD	Persentase pemeliharaan sarana prasarana RS	40%	42.04%	Kesehatan	RSUD		
					Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	96%	100%	Kesehatan	RSUD		
			Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat	Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat	Program Upaya Penurunan AKI/AKB	AKI	98,12% / 100000 KH	97,98% / 100000 KH	Kesehatan	Dinas Kesehatan		
		AKB				10,5% / 1000 KH	10% / 1000 KH					
							Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	1,2%	1,13%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
								Prevalensi shunting	21,29%	21,18%		
							Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (Universal Coverage)	36%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	84%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu karena melahirkan	2,1%	0%	Kesehatan	RSUD
							Program Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	60%	63.06%	Kesehatan	RSUD
							Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta Keluarga Berencana	68%	70%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPPKB



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program pengembangan sistem informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BPPKB
					Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan	Persentase PUS yang mendapatkan KIE	100%	100%	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BPPKB
					Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	42%	55%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarpras OR dalam kondisi baik	40%	65%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar
				Pengembangan lingkungan sehat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular	1,8%	2%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Persentase Desa UCI	92,34%	93,5%		
						Persentase Desa dengan Posbindu PTM	20%	70%		
					Program Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi dasar	75%	81%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase TPM Laik Sehat	27%	70%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	52%	57%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase Pimbinan lingkungan sosial	32,5%	39.97%	Kesehatan	RSUD
					Program Pengembangan lingkungan sehat RS	Persentase lingkungan Sehat di sekitar RS	50%	53%	Kesehatan	RSUD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel	Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan	Program Perencanaan Strategis Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu	-	100%	Perencanaan	Bappeda
					Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah	1. Persentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P	80%	100%	Perencanaan	Bappeda
						2. Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P	-	100%		
						3. Persentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP	70%	95%		
					Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang	Persentase program/kegiatan PD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	90%	Perencanaan	Bappeda
					Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase program/kegiatan PD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	90%	Perencanaan	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Persentase program/kegiatan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	90%	Perencanaan	Bappeda					



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase program/kegiatan PD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistik yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	90%	Perencanaan	Bappeda
						2. Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu	80%	100%		
					Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik	Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu	100%	100%	Perencanaan	Bappeda
					Program Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun	25%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Pembangunan
					Program Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase permasalahan yang diusulkan oleh PD yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kajian	17%	20%	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
						2. Persentase program/kegiatan PD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	90%		
		Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal		Peningkatan kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kdh	Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina	65.61%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		Meningkatkan akuntabilitas, kinerja		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan	Program penyusunan anggaran keuangan daerah	Persentase dokumen penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu	100%	100%	Keuangan	BPKAD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			keuangan daerah	pengelolaan keuangan dan asset daerah	Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	110%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah	Persentase tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	10%	60%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah	Persentase nilai asset daerah yang tercatat	80%	100%	Keuangan	BPKAD
						Persentase asset daerah dalam kondisi baik	100%	100%		
					Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan	25%	75%	Sekretariat Daerah	Bagian Pembangunan
					Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah paket dan nilai pekerjaan pengadaan barang / jasa meningkat	75%	90%	Sekretariat Daerah	Bagian Pembangunan
					Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi yang terfasilitasi	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Pembangunan
					Program Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase jumlah dokumen laporan keuangan PD yang tepat	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Umum



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
						waktu				
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan
					Program Perencanaan dan Pelaporan PD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	50%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	98%	98%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	90%	100%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	60%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	70%	100%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	96.60%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	75%	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	70%	82%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop Dan Umkm
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	99%	100%	Penanaman Modal	KPTSP
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	40%	90%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Perpustakaan	KPAD
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	80%	90.53%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Pertanian	Dinas Peternakan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					dan keuangan	yang tepat waktu				
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	92.5%	100%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Pertanian	BP4K
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	80%	100%	Perencanaan	Bappeda
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD	75%	75%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					dan keuangan	yang tepat waktu					
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat	
					Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	Kecamatan	Kecamatan	
			Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien	Penataan Struktur Kelembagaan Daerah sesuai kebutuhan daerah	Program Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Kelembagaan	Presentase Penataan Kelembagaan menuruturutan Pemerintahan di Kabupaten Blitar	80%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	
						Program Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	60%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
						Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	88.09%	88.79%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
						Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang mencapai sasaran	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan
			Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Menerapkan pembinaan kinerja aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur	62.51%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	
						Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai	Persentase Pentaan Karier sesuai dengan kompetensi	54.48%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan	Badan Kepegawaian Daerah



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
									Dan Pelatihan	
					Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pengembangan data/Informasi Kepegawaian	93%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	85%	92%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	40%	42.04%	Kesehatan	RSUD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	98%	98%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	33%	100%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	60%	90%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	70%	95%	Sosial	BPBD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak	60%	90%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi layak fungsi	96.50%	97%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	100%	100%	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	Dispendukcapil



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
									Sipil	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	90%	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	80%	90%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop Dan UMKM
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	97%	100%	Penanaman Modal	KPTSP
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	60%	95%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Perpustakaan	KPAD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	93%	100%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	92.74%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	93%	98%	Pertanian	Dinas Peternakan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	90%	100%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Pertanian	BP4K
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Perencanaan	Bappeda
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	Kecamatan	Kecamatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	0%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan seragam petugas keamanan	0%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan	98%	98%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin pegawai	40%	60%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	70%	90%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	70%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	50%	75%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Sosial	BPBD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur terbina dengan baik	100%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	85%	100%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	100%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat bimtek / sosialisasi	96.60%	100%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/	100%	100%	Pangan	Kantor Ketahanan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Aparatur	sosialisasi				Pangan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	70%	95%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi	0%	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	86%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	13%	28%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	0%	65%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop Dan UMKM
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Penanaman Modal	KPTSP
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	75%	100%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	75%	100%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Pertanian	BP4K
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	0%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur rencana	10%	90%	Perencanaan	Bappeda
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	90%	95%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	70%	92%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan aparatur yang profesional sesuai bidangnya	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien	Peningkatan standar kualitas pelayanan PD	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Risalah Budaya Kerja, Tata Naskah Dinas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	80%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi	100%	100%	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
					Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan berbasis Teknologi Informasi	Persentase Lembaga pemerintahan daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	0%	100%	Kearsipan	KPAD
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi berbasis teknologi informasi di lembaga pemerintah daerah	0%	66%	Kearsipan	KPAD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Persentase peningkatan dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	3.128 dokumen	332.48%	Kearsipan	KPAD
					Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Cakupan data dan informasi pertanahan	0%	100%	Pertanahan	Bagian Pemerintahan
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol	Persentase jumlah pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dilaksanakan dengan baik dalam 1 tahun	86%	98%	Sekretariat Daerah	Bagian Humas Dan Protokol
					Program Sosialisasi Tentang Ketentuan Dibidang Cukai	Persentase ketentuan dibidang cukai yang disosialisasikan	100%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Humas Dan Protokol
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase layanan publik yang menggunakan teknologi informasi (TI)	60%	75%	Komunikasi Dan Informatika	Dishubkominfo
					Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase desiminasi dan pendistribusian informasi	50%	65%	Komunikasi Dan Informatika	Dishubkominfo
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	50%	52.55%	Kesehatan	RSUD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	98%	98%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	50%	90%	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Sosial	BPBD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Sosial	Dinas Sosial
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	99,8%	100%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan adminitrasi perkantoran	96.6%	100%	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	90%	100%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	80%	90%	Perhubungan	Dishubkominfo
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinkop Dan UMKM
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	97%	100%	Penanaman Modal	KPTSP
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Kepemudaan Dan Olah Raga	Disporbudpar



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Perpustakaan	KPAD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	100%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Pertanian	BP4K
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Perencanaan	Bappeda
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Keuangan	BPKAD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Keuangan	Dinas Pendapatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	70%	100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Inspektorat	Inspektorat
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan	Kecamatan
					Program Pembangunan Gedung Perkantoran	Persentase Peningkatan Prasarana Pemerintah	33%	100%	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing										
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	Meningkatkan daya saing usaha koperasi, dan UMKM	Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM	Program pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet UMKM yang terfasilitasi promosi dan temu bisnis	0%	100%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP DAN UMKM
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan UMKM	Persentase masyarakat yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan kerja dan akses pasar untuk menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing	0%	5.20%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP DAN UMKM



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan	0%	75%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Persentase IKM yang terfasilitasi pemasaran	0.1%	1.07%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan jumlah produk ekspor	0%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
					Program Pengelolaan Pasar Daerah	Persentase sarpras pasar yang layak fungsi	65%	79%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	0%	1,5 %	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP DAN UMKM	
						Persentase koperasi aktif	1%	1.61%			
					Program/Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Usahanya berkembang	0%	50%	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	DINKOP DAN UMKM	
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausahawan muda yang dibina	37%	50%	Kepemudaan Dan Olah Raga	DISPORBUDPAR	
					Prog.Pengembangan dan Pengendalian BUMD	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100%	100%	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
				Meningkatkan pengembangan industri kecil menengah, dan sentra	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang di bina	10%	17.5%	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			industri potensial							
					Program Penataan Struktur Industri	Persentase kelompok industri yang terbina	2.5%	15%	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor industri	Persentase IKM yang terfasilitasi	2.61%	14%	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang dibina dalam peningkatan kemampuan teknologi industri	1.0%	6.2%	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang dilatih dalam pengembangan mutu dan sistim produksi	1.0%	6.2%	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian	Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan utama	9.63%	10.74%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Mutu Produksi Tanaman Pangan	Rasio budidaya tanaman pangan ramah lingkungan	0%	0.21%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama	7.26%	8.09%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Mutu Produksi Tanaman Hortikultura	Rasio budidaya tanaman hortikultura ramah lingkungan	0%	0.21%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Rasio Pemasaran terhadap seluruh komoditas pertanian	0.16%	0.26%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu	0.10%	1.10%	Pertanian	Dinas Peternakan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan	1%	12.50%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan Promosi pemasaran hasil peternakan dan kualitas hasil peternakan	1.00%	11.00%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternakan	Peningkatan pembinaan usaha dan agribisnis peternakan	2%	52.00%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan	Peningkatan ketrampilan di bidang peternakan	0%	100.00%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan	Peningkatan Pengawasan Bahan/Produk Peternakan	1%	14.00%	Pertanian	Dinas Peternakan
					Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan produksi perkebunan	2%	3.0%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sektor Perkebunan	Persentase produk tembakau yang sudah memenuhi standar kualitas	1.5%	2.5%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program pembinaan lingkungan sosial Sektor Perkebunan	Persentase peningkatan kapasitas petani cengkeh	1.75%	2.35%	Pertanian	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program Pengembangan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian	50%	100%	Pertanian	BP4K
					Program Pengembangan Operasional Intensifikasi dan	Persentase pengembangan operasional intensifikasi	70%	95%	Pertanian	BP4K



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					sarana produksi	dan sarana produksi				
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis	Persentase pengembangan kewirausahaan dan agribisnis	15%	65%	Pertanian	BP4K
					Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Sektor Penyuluhan	Persentase Petani Tembakau yang terlatih	0%	100%	Pertanian	BP4K
					Program Pengembangan SDM Pertanian	Persentase pengembangan SDM Pertanian	50%	100%	Pertanian	BP4K
					Program Peningkatan kapasitas SDM non aparaturn kehutanan dan perkebunan	Persentase kelompok petani kehutanan dan perkebunan yang dibina	1.2%	2.20%	Kehutanan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan	Peningkatan jenis komoditi yang di pasarkan	2 Komoditi	250% (7 kmdt)	Kehutanan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
					Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Konsumsi	14.642,26 ton	148.7%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Persentase Peningkatan produksi perikanan non konsumsi	234.342.000 ekor	139.6%		
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	911,95 ton	32.59%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina	400 org	250%	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan budidaya	200 klp	12,5%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan budidaya	50 klp	12,5%		
				Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rasio peningkatan indeks pertanaman	1.69%	1.78%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase pemenuhan teknologi pertanian	42%	53.60%	Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan	75%	100%	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan Mutu produk Pangan	Peningkatan IKM yang telah memperoleh sertifikat BPOM dan MUI	0.39%	2.99%	Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Mengembangkan destinasi pariwisata		Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam	Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya	Persentase Fasilitasi Event seni dan Budaya	46%	56%	Kebudayaan	Disporbudpar
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase tempat wisata yang terpelihara	60%	85%	Pariwisata	Disporbudpar
					Program Pengembangan	Persentase event/tempat	60%	85%	Pariwisata	Disporbudpar



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Pemasaran Pariwisata	wisata yang dipromosikan					
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dipelihara	50%	75%	Kebudayaan	Disporbudpar	
				Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis	30%	41.5%	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang	
				Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata	Program Pengembangan Industri Kepariwisata	Persentase Peningkatan Usaha Wisata	5%	20%	Pariwisata	Disporbudpar	
	Meningkatkan pelayanan perijinan	Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan	Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase pemrosesan ijin sesuai SOP		80%	95%	Penanaman Modal	KPTSP	
	Mengefektifkan pemanfaatan ruang dan lingkungan	Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.	Peningkatan pengawasan tata ruang dan lingkungan	Program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air		70	71	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	
						Indeks kualitas udara	94,99	96			
						Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks tutupan hutan	42,02	44,5	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
						Program Pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik	100 Usaha/ kegiatan/ Perusahaan	12%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan		1%	2.50%	Kehutanan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	persentase Penurunan penanganan permasalahan kawasan hutbun	8 kasus	62.5%	Kehutanan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup	Program Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah	Persentase peningkatan sampah yang dikelola oleh masyarakat	5500 ton	50%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan operasional pengangkutan sampah	8%	12%	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang
Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan										
1	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Memperkuat kelembagaan pemerintah desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimtek	85%	95%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan	Tingkat kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	0%	81.82%	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan
					Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%	100%	Kecamatan	Kecamatan
					Program pelayanan kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	60%	100%	Kecamatan	Kecamatan
				Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase kinerja lembaga ekonomi perdesaan yang sehat	90%	95%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
			Mengembangkan kawasan perdesaan	Pemetaan, Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi perumusan kebijakan pemerintahan desa	50%	70%	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG dan melestarikan SDA	75%	85%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berkembang	80%	95%	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bapemas



BAB **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG** **DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**



Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Blitar periode 2016-2021 yang ditunjukkan oleh Tabel 8.2 berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Sementara itu pada tabel yang sama, Program Kabupaten Blitar yang mendukung program nasional ditunjukkan dengan penulisan miring (*italic*). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan dalam rangka mencapai target indikator yang telah ditetapkan.

Sementara itu, program yang dilaksanakan di tahun 2016 yang disajikan pada Tabel 8.1 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



Tabel 8.1
Program Kabupaten Blitar Tahun 2016

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1				Wajib Kode	965.837.121.429	
1	01			Pendidikan	80.370.290.900	
1	01	1.01.01		Dinas Pendidikan	80.370.290.900	
1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.852.605.500	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.451.030.000	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.481.442.100	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	12.010.997.400	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.065.432.474	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	27.099.463.775	Dinas Pendidikan
						Dinas Pendidikan
						Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	1.065.605.000	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	18			Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.320.365.651	Dinas Pendidikan
1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.936.349.000	Dinas Pendidikan
1	02			Kesehatan	240.430.956.435	
1	02	1.02.01		Dinas Kesehatan	134.930.878.685	
1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.457.692.500	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.852.664.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	14.076.747.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	66.032.018.250	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.562.121.800	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6.302.411.100	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	600.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.468.286.500	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.900.456.000	Dinas Kesehatan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	02	1.02.01	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	21.207.881.035	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	60.600.500	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.01	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	175.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	1.02.02		RSUD	105.500.077.750	
1	02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.943.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.500.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	57.272.077.750	RSUD
1	02	1.02.02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.175.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	31.125.000.000	RSUD
1	02	1.02.02	34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.000.000.000	RSUD
1	03			Pekerjaan Umum	396.382.708.832	
1	03	1.03.01		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN	370.623.166.582	
1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659.050.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	783.295.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	749.107.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.140.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	03	1.03.01	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	172.192.361.150	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	1.850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	23.971.925.461	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	26.481.403.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	26.419.326.266	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	7.222.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	28	Program Pengendalian Banjir	8.390.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7.157.712.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.01	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	79.182.846.705	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
1	03	1.03.02		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	25.759.542.250	
1	03	1.03.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	865.585.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	269.700.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	03	Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	188.485.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.598.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2.376.669.500	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	10.385.932.750	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	03	1.03.02	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	6.295.320.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	03	1.03.02	31	Program Pembangunan Gedung Perkatoran	2.722.350.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1	04			Perumahan	697.434.000	
1	04	1.03.02		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	697.434.000	
1	04	1.03.02	15	Program Pengembangan Perumahan	697.434.000	Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1	05			Penataan Ruang	1.175.000.000	
1	05	1.03.02		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.175.000.000	
1	05	1.03.02	15	Program Perencanaan Tata Ruang	875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1	05	1.03.02	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1	06			Perencanaan Pembangunan	11.411.900.000	
1	06	1.06.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.411.900.000	
1	06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	477.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	15	Program pengembangan data/informasi	670.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	253.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.057.450.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.291.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.630.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	1.06.01	24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.655.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	06	1.06.01	26	Program Penelitian dan Pengembangan	1.490.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	07			Perhubungan	10.321.899.000	
1	07	1.07.01		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.321.899.000	
1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.735.842	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.929.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	56.574.500	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.967.200	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	288.430.400	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.362.859.958	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.485.321.150	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.680.146.600	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1.283.987.050	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	22	Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan	277.100.750	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	1.07.01	24	Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan	722.846.550	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	08			Lingkungan Hidup	12.277.989.150	
1	08	1.03.02		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.644.130.000	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	08	1.03.02	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.644.130.000	Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya dan Tata Ruang
1	08	1.08.01		Badan Lingkungan Hidup	6.633.859.150	
1	08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.517.400	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	547.954.850	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	394.377.650	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.171.641.250	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	291.750.000	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	462.160.000	Badan Lingkungan Hidup
1	08	1.08.01	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	414.458.000	Badan Lingkungan Hidup
1	10			Kependudukan dan Catatan Sipil	2.143.896.600	
1	10	1.10.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.143.896.600	
1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.546.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462.350.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	144.000.000	
1	10	1.10.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.165.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.807.020.681	
1	11	1.11.01		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.807.020.681	
1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	842.839.681	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	195.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	11	1.11.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	11	1.11.01	12	Program pelayanan kontrasepsi	85.690.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	11	1.11.01	13	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	285.627.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	14	Program Keluarga Berencana	4.075.006.500	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	340.605.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	17	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	495.800.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	290.455.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	96.600.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS	21.107.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	24	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	693.553.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	1.11.01	25	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	56.737.500	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	13			Sosial	5.106.170.250	
1	13	1.13.01		Dinas Sosial	5.106.170.250	
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.000.000	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	775.310.000	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.780.000	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), PSKS dan PMKS lainnya	324.400.000	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.247.660.700	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	18	Program pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma	263.071.700	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	19	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	271.611.000	Dinas Sosial



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	13	1.13.01	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	629.767.500	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.216.569.350	Dinas Sosial
1	13	1.13.01	23	Program Kerjasama Informasi dengan Masmadia	50.000.000	Dinas Sosial
1	14			Ketenagakerjaan	2.940.250.000	
1	14	1.14.01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.940.250.000	
1	14	1.14.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.989.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.300.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	229.760.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.445.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	489.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.01	18	Pembinaan Lingkungan Sosial	500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.567.429.186	-
1	15	1.15.01		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	2.567.429.186	
1	15	1.15.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.658.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.604.686	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	80.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	49.500.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	466.805.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	15	1.15.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	356.861.500	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	15	1.15.01	20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1	16			Penanaman Modal	388.000.000	
1	16	1.20.03		Sekretariat Daerah	320.000.000	
1	16	1.20.03	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	320.000.000	Sekretariat Daerah
1	16	2.07.01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	68.000.000	
1	16	2.07.01	15	Pengembangan dan Pengendalian BUMD	68.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	17			Kebudayaan	3.767.700.000	
1	17	1.17.01		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.517.700.000	
1	17	1.17.01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	660.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	1.17.01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.420.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	1.17.01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.236.450.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	1.17.01	19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	201.250.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	1.20.03		SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000	
1	17	1.20.03	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	250.000.000	Sekretariat Daerah
1	18			Pemuda dan Olah Raga	2.495.647.525	
1	18	1.17.01		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.495.647.525	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	18	1.17.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	555.357.525	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	18	1.17.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	580.675.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	18	1.17.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	18	1.17.01	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	182.900.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	18	1.17.01	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	614.375.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	18	1.17.01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	537.340.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	25.186.617.000	
1	19	1.19.01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.914.000.000	
1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186.173.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	690.486.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.01	18	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	1.685.445.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.01	21	Program pendidikan politik masyarakat	1.164.895.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.02		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.949.437.000	
1	19	1.19.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	909.060.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.231.155.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.295.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	23	Program kedaruratan dan logistik	635.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.02	24	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi	13.823.271.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	1.19.03		Satuan Polisi Pamong Praja	3.323.180.000	
1	19	1.19.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	678.185.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.830.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	03	Program peningkatan disiplin aparatur	316.220.000	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	19	1.19.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	460.765.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.000.880.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	307.880.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.03	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	21.420.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20			OTDA, Pem Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian	148.596.141.870	
1	19	1.19.02		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.150.000	
1	19	1.19.02	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	50.150.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20	1.20.03		Sekretariat Daerah	35.768.132.968	
1	20	1.20.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.446.212.500	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.858.802.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	03	Program peningkatan disiplin aparatur	2.933.200.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	557.907.500	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	502.226.700	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2.636.781.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	30.865.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	3.642.094.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	225.150.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.124.219.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	28	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	751.177.768	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	138.420.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	31	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat	163.275.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	31	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	550.000.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	32	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	200.000.000	Sekretariat Daerah



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	20	1.20.03	33	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	600.000.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	36	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1.570.370.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	36	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	285.000.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	43	Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.437.762.000	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.03	44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	114.670.500	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.04		Sekretariat DPRD	22.403.074.000	
1	20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.194.779.270	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.764.852.800	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.04	03	Program peningkatan disiplin aparatur	217.935.500	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.696.102.132	
1	20	1.20.04	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	108.624.756	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.420.779.542	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.05		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.595.124.150	
1	20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.395.415.683	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.087.921.304	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	406.743.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.316.008.633	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	489.422.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.05	32	Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah	1.874.612.830	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	1.20.06		Inspektorat Kabupaten	6.360.941.600	
1	20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	930.236.100	Inspektorat Kabupaten



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	478.994.200	Inspektorat Kabupaten
1	20	1.20.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	261.200.000	Inspektorat Kabupaten
1	20	1.20.06	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.865.000	Inspektorat Kabupaten
1	20	1.20.06	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.217.499.000	Inspektorat Kabupaten
1	20	1.20.06	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	450.147.300	Inspektorat Kabupaten
1	20	1.20.07		Badan Kepegawaian Daerah	8.067.602.750	
1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	291.050.204	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	471.876.006	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	90.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.333.125.040	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.491.712.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.07	33	Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai	364.839.500	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	1.20.08		KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.030.740.100	
1	20	1.20.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294.085.500	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	803.818.300	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1.20.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1.20.08	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.025.000	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1.20.08	07	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	856.811.300	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	20	1.20.09		KECAMATAN	34.062.306.302	
1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.413.215.849	Kecamatan
1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.377.590.265	Kecamatan
1	20	1.20.09	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	172.821.245	Kecamatan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	20	1.20.09	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.254.413.813	Kecamatan
1	20	1.20.09	17	Program Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	139.210.000	Kecamatan
1	20	1.20.09	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	804.776.480	Kecamatan
1	20	1.20.09	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	16.766.739.650	Kecamatan
1	20	1.20.09	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	25.879.000	Kecamatan
1	20	1.20.09	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	47.660.000	Kecamatan
1	20	1.20.09	30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	60.000.000	Kecamatan
1	20	1.20.11		DINAS PENDAPATAN	28.258.070.000	
1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.547.185.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.750.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450.550.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.800.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.300.310.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	465.575.000	Dinas Pendapatan
1	20	1.20.11	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	221.900.000	Dinas Pendapatan
1	21			KETAHANAN PANGAN	4.063.054.000	
1	21	1.21.01		KANTOR KETAHANAN PANGAN	4.063.054.000	
1	21	1.21.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.857.000	Kantor Pertahanan Pangan
1	21	1.21.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.290.000	Kantor Pertahanan Pangan
1	21	1.21.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.945.000	Kantor Pertahanan Pangan
1	21	1.21.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Kantor Pertahanan Pangan
1	21	1.21.01	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	3.745.962.000	Kantor Pertahanan Pangan
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.870.516.000	
1	22	1.20.09		KECAMATAN	103.539.000	
1	22	1.20.09	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	103.539.000	Kecamatan
1	22	1.22.01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.766.977.000	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.253.946.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	875.046.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	1.22.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	827.078.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	1.22.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	588.123.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.109.836.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
			18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.087.948.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
1	24			KEARSIPAN	374.310.000	
1	24	1.26.01		KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	374.310.000	
1	24	1.26.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	157.310.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	1.26.01	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	30.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	1.26.01	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	187.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26			Perpustakaan	462.190.000	
1	26	1.26.01		KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	462.190.000	
1	26	1.26.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.190.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	1.26.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	1.26.01	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	373.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2				Urusan Pilihan	73.203.687.275	
2	01			Pertanian	38.076.797.025	
2	01	1.20.03		SEKRETARIAT DAERAH	62.252.000	
2	01	1.20.03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	62.252.000	Sekretariat Daerah
2	01	2.01.01		Dinas Pertanian	25.403.698.150	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
2	01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456.359.000	Dinas Pertanian
2	02	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.300.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	33.745.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	21.467.734.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	214.698.150	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.244.620.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.629.242.000	Dinas Pertanian
2	01	2.01.02		Dinas Peternakan	3.842.320.000	
2	01	2.01.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475.150.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	444.500.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.000.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	823.750.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	327.177.500	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	62.322.500	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1.134.420.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.02	27	Pembinaan Lingkungan Sosial	450.000.000	Dinas Peternakan
2	01	2.01.03		BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	6.909.186.375	
2	01	2.01.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	381.060.375	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.174.176.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.983.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
2	01	2.01.03	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	405.741.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	343.785.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	753.243.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	271.042.500	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	168.938.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	196.460.000	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.01.03	25	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	2.028.757.500	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	01	2.02.01		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.859.340.500	
2	01	2.02.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	81.555.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	01	2.02.01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	01	2.02.01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	220.785.500	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	01	2.02.01	25	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.457.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02			Kehutanan	5.084.183.000	
2	02	2.02.01		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.084.183.000	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	224.306.100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.908.900	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.550.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	4.382.118.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	24	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	64.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	02	2.02.01	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	120.300.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	03			Energi dan Sumberdaya Mineral	255.430.000	
2	03	1.03.02		DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	255.430.000	
2	03	1.03.02	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	255.430.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2	04			Pariwisata	4.107.350.000	
2	04	1.17.01		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4.107.350.000	
2	04	1.17.01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	499.389.600	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	1.17.01	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.607.960.400	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	05			Kelautan dan Perikanan	9.381.612.250	
2	05	2.05.01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.381.612.250	
2	05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.696.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.021.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	34.070.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	24.530.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	20	Program pengembangan budidaya perikanan	5.830.835.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	21	Program pengembangan perikanan tangkap	1.095.445.000	Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
2	05	2.05.01	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	71.910.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	2.05.01	23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.671.345.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	06			Perdagangan	10.406.330.500	
2	06	1.20.03		SEKRETARIAT DAERAH	1.067.050.500	
2	06	1.20.03	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	205.993.000	Sekretariat daerah
2	06	1.20.03	26	Program Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan	861.057.500	Sekretariat daerah
2	06	2.01.02		Dinas Peternakan	15.000.000	
2	06	2.01.02	26	Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan	15.000.000	Dinas Peternakan
2	06	2.07.01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.324.280.000	
2	06	2.07.01	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	2.07.01	17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	2.07.01	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.941.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	2.07.01	20	Program Pengelolaan Pasar Daerah	7.163.280.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07			Perindustrian	5.711.984.500	
2	07	2.07.01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.711.984.500	
2	07	2.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	408.202.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	65.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	430.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	18	Program penataan struktur industri	3.619.282.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	26	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	41.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	2.07.01	45	Pembinaan Lingkungan Sosial	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	08			Transmigrasi	180.000.000	
2	08	1.14.01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	180.000.000	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Dana (Rp)	PD Penanggung Jawab
2	08	1.14.01	15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	73.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08	1.14.01	17	Program transmigrasi regional	107.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TOTAL					1.039.040.808.704	



**Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01	URUSAN WAJIB															
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				850,616,500,000		804,216,000,000		895,840,000,000		1,014,964,000,000		1,148,424,000,000		4,714,060,500,000.00	
01	PENDIDIKAN				44,850,000,000		53,695,000,000		56,045,000,000		56,720,000,000		61,720,000,000		273,030,000,000.00	
01	Dinas Pendidikan				44,850,000,000		53,695,000,000		56,045,000,000		56,720,000,000		61,720,000,000		273,030,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,000,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,800,000,000	100%	2,800,000,000	100%	2,800,000,000	100%	13,000,000,000.00	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	80%	2,950,000,000	85%	3,900,000,000	90%	4,000,000,000	95%	4,000,000,000	100%	4,000,000,000	100%	18,850,000,000.00	Dinas Pendidikan
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	50%	60%	100,000,000	70%	150,000,000	80%	150,000,000	90%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	700,000,000.00	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Non formal	1. Persentase APM pendidikan non formal	60%	65%	250,000,000	70%	320,000,000	75%	350,000,000	80%	350,000,000	85%	350,000,000	85%	1,620,000,000.00	Dinas Pendidikan
		2. Persentase APK pendidikan non formal	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Persentase APK PAUD	30%	40%	12,000,000,000	45%	14,250,000,000	50%	15,250,000,000	55%	15,250,000,000	60%	15,250,000,000	60%	72,000,000,000.00	Dinas Pendidikan
		2. Persentase APK jenjang TK	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		3. Persentase APM jenjang TK	50%	90%		52%		58%		60%		65%		65%		
	Program Pendidikan TK dan Sekolah Dasar	1. Persentase APM jenjang SD	100%	90%	21,000,000,000	100%	24,650,000,000	100%	25,650,000,000	100%	26,000,000,000	100%	29,000,000,000	100%	126,300,000,000.00	Dinas Pendidikan
		2. Persentase APK jenjang SD	100%	90%		100%		100%		100%		100%				



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		3. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang TK	60%	60%		63%		67%		70%		75%		75%				
		4. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SD	89%	90%		90%		95%		95%		95%		95%				
	<i>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	1. Persentase APM jenjang SMP	82%	82%	4,750,000,000	85%	5,675,000,000	90%	5,675,000,000	95%	6,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	30,100,000,000.00	Dinas Pendidikan		
		2. Persentase APK jenjang SMP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	-	Dinas Pendidikan
		3. Persentase Ruang kelas kondisi baik jenjang SMP	95%	95%		97%		97%		98%		98%		98%	98%	98%	98%	-
	<i>Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kualifikasi	80%	80%	700,000,000	85%	645,000,000	90%	645,000,000	95%	645,000,000	100%	645,000,000	100%	3,280,000,000.00	Dinas Pendidikan		
	<i>Program Pengembangan dan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan</i>	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang terlayani tepat waktu	100%	100%	750,000,000	100%	980,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	4,730,000,000.00	Dinas Pendidikan		
	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	60%	65%	350,000,000	70%	525,000,000	75%	525,000,000	80%	525,000,000	85%	525,000,000	85%	2,450,000,000.00	Dinas Pendidikan		
01	KESEHATAN				306,230,000,000		346,120,000,000		354,216,000,000		414,429,000,000		442,324,000,000		1,863,319,000,000.00			
01	DINAS KESEHATAN				147,895,000,000		182,610,000,000		188,856,000,000		244,581,000,000		249,785,000,000		1,013,727,000,000.00			
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	1,500,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	8,900,000,000.00	Dinas Kesehatan		
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	850,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	5,850,000,000.00	Dinas Kesehatan		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur Dinkes dan Puskesmas yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	0%	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	330,000,000.00	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan seragam petugas keamanan	0%	100%	20,000,000	100%	0	100%	25,000,000	100%	0	100%	25,000,000	100%	70,000,000.00	Dinas Kesehatan	
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pemencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	545,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	100%	4,745,000,000.00	Dinas Kesehatan	
	Program Upaya Penurunan AKI/AKB	AKI	98,12%/100000 KH	98,07%/100000 KH	7,000,000,000	98,04%/100000 KH	8,900,000,000	98,02%/100000 KH	8,900,000,000	98%/100000 KH	8,900,000,000	97,98%/100000 KH	8,900,000,000	97,98%/100000 KH	42,600,000,000.00	Dinas Kesehatan	
		AKB	10,5%/1000 KH	10,4%/1000 KH		10,3%/1000 KH	8,900,000,000	10,2%/1000 KH	8,900,000,000	10,1%/1000 KH	8,900,000,000	10%/1000 KH	8,900,000,000	10%/1000 KH	-	Dinas Kesehatan	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	1,2%	1,17%	6,800,000,000	1,16%	9,000,000,000	1,15%	9,000,000,000	1,14%	9,000,000,000	1,13%	9,000,000,000	1,13%	42,800,000,000.00	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi stunting	21,29%	21,26%		21,24%	9,000,000,000	21,22%	9,000,000,000	21,2%	9,000,000,000	21,18%	9,000,000,000	21,18%	-	Dinas Kesehatan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular	1,8%	2%	2,700,000,000	2%	3,750,000,000	2%	3,750,000,000	2%	3,750,000,000	2%	3,750,000,000	2%	17,700,000,000.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa UCI	92,34%	92,4%		92,5%	3,750,000,000	92,8%	3,750,000,000	93%	3,750,000,000	93,5%	3,750,000,000	93,5%	-	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa dengan Posbindu PTM	20%	30%		40%	3,750,000,000	50%	3,750,000,000	60%	3,750,000,000	70%	3,750,000,000	70%	-	Dinas Kesehatan	
	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (Universal Coverage)	36%	80%	33,500,000,000	90%	41,450,000,000	100%	45,671,000,000	100%	45,671,000,000	100%	50,000,000,000	100%	216,292,000,000.00	Dinas Kesehatan	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	75%	78%	19,000,000,000	80%	24,150,000,000	82%	24,150,000,000	84%	24,150,000,000	86%	25,000,000,000	86%	116,450,000,000.00	Dinas Kesehatan	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	70%	72%	680,000,000	74%	1,050,000,000	76%	1,050,000,000	78%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	80%	4,880,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	12,000,000,000	81%	15,250,000,000	82%	15,250,000,000	83%	15,500,000,000	84%	15,500,000,000	84%	73,500,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peringkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas dan Pustu	Persentase Kondisi Bangunan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat	50%	60%	2,250,000,000	70%	19,750,000,000	80%	21,750,000,000	90%	21,750,000,000	100%	21,750,000,000	100%	87,250,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Baru	Persentase Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Baru	0%	40%	57,000,000,000	50%	47,150,000,000	80%	47,150,000,000	100%	100,000,000,000	100%	100,000,000,000	100%	351,300,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi dasar	75%	77%	2,000,000,000	78%	3,900,000,000	79%	3,900,000,000	80%	5,000,000,000	81%	5,000,000,000	81%	19,800,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase TPM Laik Sehat	27%	40%	350,000,000	55%	590,000,000	60%	590,000,000	65%	590,000,000	70%	590,000,000	70%	2,710,000,000.00	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	52%	53%	1,650,000,000	54%	3,450,000,000	55%	3,450,000,000	56%	5,000,000,000	57%	5,000,000,000	57%	18,550,000,000.00	Dinas Kesehatan
01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				158,335,000,000		163,510,000,000		165,360,000,000		169,848,000,000		192,539,000,000		849,592,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	50%	50.50%	31,650,000,000	51.01%	41,695,000,000	51.52%	42,695,000,000	52.03%	42,695,000,000	52.55%	42,695,000,000	52.55%	201,430,000,000.00	RSUD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	40%	40.40%	785,000,000	40.80%	1,050,000,000	41.21%	1,050,000,000	41.62%	1,050,000,000	42.04%	1,050,000,000	42.04%	4,985,000,000.00	RSUD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	50%	51%	1,450,000,000	51%	1,950,000,000	52%	1,950,000,000	52%	1,950,000,000	53%	1,950,000,000	53%	9,250,000,000.00	RSUD
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu karena melahirkan	2,1%	0%	36,000,000,000	0%	7,770,000,000	0%	7,770,000,000	0%	7,770,000,000	0%	7,770,000,000	0%	67,080,000,000.00	RSUD
	Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan prasarana RS	Persentase sarana dan prasarana RS	27%	38%	40,250,000,000	39%	49,150,000,000	41%	50,000,000,000	42%	50,000,000,000	42%	71,000,000,000	42%	260,400,000,000.00	RSUD
	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata BLUD	Persentase pemeliharaan sarana prasarana RS	40%	40.40%	1,800,000,000	40.80%	2,375,000,000	41.21%	2,375,000,000	41.62%	2,375,000,000	42.04%	2,375,000,000	42.04%	11,300,000,000.00	RSUD
	Program Pengembangan lingkungan sehat RS	Persentase lingkungan Sehat di sekitar RS	50%	51%	1,000,000,000	51%	1,300,000,000	52%	1,300,000,000	52%	1,300,000,000	53%	1,300,000,000	53%	6,200,000,000.00	RSUD
	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	60%	60,60%	34,000,000,000	61.21%	44,700,000,000	61.82%	44,700,000,000	62.44%	49,188,000,000	63.06%	50,879,000,000	63.06%	223,467,000,000.00	RSUD
	Program pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan lingkungan sosial	32,5%	32,83%	11,000,000,000	34,37%	13,000,000,000	36,01%	13,000,000,000	37,75%	13,000,000,000	39,97%	13,000,000,000	39,97%	63,000,000,000.00	RSUD
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	96%	97%	400,000,000	98%	520,000,000	99%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	2,480,000,000.00	RSUD
01	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				418,470,000,000		308,048,000,000		400,173,000,000		457,403,000,000		557,683,000,000		2,141,777,000,000.00	
01	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN				412,690,000,000		300,128,000,000		392,203,000,000		401,133,000,000		500,913,000,000		2,007,067,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	98%	98%	650,000,000	98%	850,000,000	98%	850,000,000	98%	950,000,000	98%	950,000,000	98%	4,250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	98%	98%	750,000,000	98%	1,025,000,000	98%	1,025,000,000	98%	1,100,000,000	98%	1,100,000,000	98%	5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti	98%	98%	750,000,000	98%	975,000,000	98%	975,000,000	98%	975,000,000	98%	930,000,000	98%	4,605,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		diklat/pelatihan														
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	98%	98%	65,000,000	98%	85,000,000	98%	85,000,000	98%	85,000,000	98%	85,000,000	98%	405,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang direhab/dipelihara	61%	4.04%	82,800,000,000	4.48%	69,000,000,000	4.93%	97,625,000,000	5.61%	107,625,000,000	6.73%	137,650,000,000	86.79 %	494,700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
		Persentase jembatan direhab/dipelihara	80%	1.31%	5,140,000,000	1.75%	4,895,000,000	2.18%	5,200,000,000	2.62%	5,200,000,000	3.06%	5,200,000,000	90.92 %	25,635,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun	68%	2.69%	94,200,000,000	3.13%	73,000,000,000	3.36%	100,570,000,000	3.92%	101,375,000,000	4.48%	140,200,000,000	85.58 %	509,345,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	51%	7.23%	45,000,000,000	7.95%	15,000,000,000	8.68%	15,000,000,000	9.40%	15,000,000,000	10.84 %	15,000,000,000	95.10 %	105,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi	Persentase jaringan Irigasi yang dibangun/direhabilitasi	82%	0.97%	47,500,000,000	1.46%	34,000,000,000	1.66%	34,000,000,000	1.95%	32,000,000,000	2.44%	32,000,000,000	90.48 %	179,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi	Persentase jaringan Irigasi yang dipelihara	60%	5.0%	58,000,000,000	5.10%	24,500,000,000	5.20%	24,500,000,000	5.31%	24,500,000,000	5.41%	24,500,000,000	86.02 %	156,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	14.0%	7.23%	77,835,000,000	10.84 %	76,798,000,000	14.46%	112,373,000,000	18.07%	112,323,000,000	21.69 %	143,298,000,000	86.29 %	522,627,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
01	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				5,780,000,000		7,920,000,000		7,970,000,000		56,270,000,000		56,770,000,000		134,710,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	50%	50%	1,600,000,000	60%	1,900,000,000	70%	1,900,000,000	80%	1,900,000,000	90%	1,900,000,000	90%	9,200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	33%	33%	500,000,000	48%	500,000,000	78%	500,000,000	90%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin pegawai	40%	40%	10,000,000	45%	12,000,000	50%	12,000,000	55%	12,000,000	60%	12,000,000	60%	58,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	70%	70%	100,000,000	75%	118,000,000	80%	118,000,000	85%	118,000,000	90%	118,000,000	90%	572,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	90%	90%	20,000,000	93%	240,000,000	96%	240,000,000	98%	240,000,000	100%	240,000,000	100%	980,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	75%	79%	1,300,000,000	80%	1,950,000,000	82%	2,000,000,000	84%	2,000,000,000	85%	2,500,000,000	85%	9,750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembangunan Gedung Perkantoran	Persentase Peningkatan Prasarana Pemerintah	33%	33%	2,250,000,000	48%	3,200,000,000	78%	3,200,000,000	90%	51,500,000,000	100%	51,500,000,000	100%	111,650,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
01	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				54,050,000,000		68,600,000,000		56,700,000,000		58,606,000,000		59,606,000,000		297,562,000,000.00	
01	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				54,050,000,000		68,600,000,000		56,700,000,000		58,606,000,000		59,606,000,000		297,562,000,000.00	
	Program pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	72%	72%	4,500,000,000	78%	5,000,000,000	83%	6,000,000,000	88%	7,000,000,000	93%	8,000,000,000	93%	30,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan operasional pengangkutan sampah	8%	8%	5,250,000,000	9%	18,150,000,000	10%	5,250,000,000	11%	5,250,000,000	12%	5,250,000,000	12%	39,150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program pengembangan Kinerja Air Limbah	Persentase pengelolaan limbah tinja	60%	60%	3,600,000,000	70%	5,450,000,000	80%	5,450,000,000	90%	5,450,000,000	100%	5,450,000,000	100%	25,400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Kawasan Kumuh	15%	15%	33,000,000,000	12%	19,000,000,000	8%	19,000,000,000	4%	19,906,000,000	0%	19,906,000,000	0%	110,812,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis	30%	1%	7,700,000,000	1.5%	21,000,000,000	2%	21,000,000,000	3%	21,000,000,000	4%	21,000,000,000	41.5%	91,700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
01	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20,211,000,000		21,563,000,000		22,516,000,000		21,616,000,000		20,876,000,000		106,782,000,000.00	
01	SATPOL PP				4,231,000,000		4,377,000,000		4,530,000,000		4,530,000,000		4,640,000,000		22,308,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	650,000,000	100%	800,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	950,000,000	100%	4,100,000,000.00	Satpd PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	505,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	3,005,000,000.00	Satpd PP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	70%	90%	250,000,000	90%	270,000,000	100%	270,000,000	100%	270,000,000	100%	270,000,000	100%	1,330,000,000.00	Satpd PP
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	145,000,000.00	Satpd PP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	1,500,000,000	100%	590,000,000	100%	690,000,000	100%	690,000,000	100%	700,000,000	100%	4,170,000,000.00	Satpd PP



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah	98%	95%	280,000,000	95%	660,000,000	95%	660,000,000	95%	660,000,000	95%	660,000,000	95%	2,920,000,000.00	Satpol PP
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Keterlibatan, ketertarikan, keindahan)	98%	95%	800,000,000	95%	835,000,000	95%	835,000,000	95%	835,000,000	95%	835,000,000	95%	4,140,000,000.00	Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	200,000,000	100%	515,000,000	100%	515,000,000	100%	515,000,000	100%	515,000,000	100%	2,260,000,000.00	Satpol PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase kasus Pekat yang ditangani	98%	95%	21,000,000	95%	52,000,000	95%	55,000,000	95%	55,000,000	95%	55,000,000	95%	238,000,000.00	Satpol PP
01	BAKESBANGPOL				5,000,000,000		6,150,000,000		6,900,000,000		6,000,000,000		5,000,000,000		29,050,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	965,000,000	100%	1,296,500,000	100%	1,374,000,000	100%	1,817,500,000	100%	970,000,000	100%	6,423,000,000.00	Kesbangpol
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	60%	65%	250,000,000	70%	292,500,000	80%	309,000,000	85%	220,500,000	90%	255,700,000	90%	1,327,700,000.00	Kesbangpol
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	25,500,000	100%	28,000,000	100%	20,000,000	100%	23,500,000	100%	122,000,000.00	Kesbangpol
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	50%	55%	10,000,000	60%	17,750,000	65%	20,500,000	70%	14,700,000	75%	18,000,000	75%	80,950,000.00	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	33%	35%	450,000,000	40%	605,600,000	45%	640,000,000	50%	483,800,000	60%	567,000,000	60%	2,746,400,000.00	Kesbangpol
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Konflik	Persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan	78%	80%	2,250,000,000	82%	3,005,850,000	85%	3,176,200,000	90%	2,138,500,000	95%	2,371,000,000	95%	12,941,550,000.00	Kesbangpol
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	56%	66%	550,000,000	70%	242,800,000	75%	653,700,000	80%	808,600,000	85%	214,800,000	85%	2,469,900,000.00	Kesbangpol



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM	37%	40%	500,000,000	50%	663,500,000	60%	698,600,000	75%	496,400,000	80%	580,000,000	80%	2,938,500,000.00	Kesbangpol
01	BPBD				10,980,000,000		11,036,000,000		11,086,000,000		11,086,000,000		11,236,000,000		55,424,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	1,000,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	6,500,000,000.00	BPBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	70%	75%	4,750,000,000	80%	3,600,000,000	85%	3,600,000,000	90%	3,600,000,000	95%	3,600,000,000	95%	19,150,000,000.00	BPBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	30,000,000	100%	36,000,000	100%	36,000,000	100%	36,000,000	100%	36,000,000	100%	174,000,000.00	BPBD
	Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase terbentuknya desa tangguh	0%	3.55%	2,000,000,000	7.09%	2,425,000,000	10.5%	2,425,000,000	14%	2,425,000,000	17.5%	2,425,000,000	17.5%	11,700,000,000.00	BPBD
	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase korban bencana yang terbantu	100%	100%	700,000,000	100%	825,000,000	100%	825,000,000	100%	825,000,000	100%	825,000,000	100%	4,000,000,000.00	BPBD
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase daerah titik bencana yang terhabilitasi dan terekonstruksi	100%	100%	2,500,000,000	100%	2,850,000,000	100%	2,850,000,000	100%	2,850,000,000	100%	2,850,000,000	100%	13,900,000,000.00	BPBD
01	SOSIAL				6,805,500,000		6,190,000,000		6,190,000,000		6,190,000,000		6,215,000,000		31,590,500,000.00	
01	DINAS SOSIAL				6,805,500,000		6,190,000,000		6,190,000,000		6,190,000,000		6,215,000,000		31,590,500,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	300,000,000	100%	370,000,000	100%	370,000,000	100%	370,000,000	100%	375,000,000	100%	1,785,000,000.00	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	475,000,000	100%	630,000,000	100%	630,000,000	100%	630,000,000	100%	650,000,000	100%	3,015,000,000.00	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur terbina dengan baik	100%	100%	58,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	100%	478,000,000.00	DINAS SOSIAL
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	60%	100%	72,500,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	112,500,000.00	DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang ditangani	16%	20%	1,700,000,000	22%	900,000,000	25%	900,000,000	27%	900,000,000	29%	900,000,000	29%	5,300,000,000.00	DINAS SOSIAL



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perundang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik	100%	100%	1,200,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,575,000,000	100%	7,500,000,000.00	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	100%	100%	3,000,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	13,400,000,000.00	DINAS SOSIAL
01	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				63,804,000,000		88,192,000,000		93,811,000,000		89,820,000,000		92,030,000,000		427,657,000,000.00	
01	TENAGA KERJA				4,093,000,000		6,840,000,000		6,470,000,000		6,485,000,000		6,735,000,000		30,623,000,000.00	
01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				4,093,000,000		6,840,000,000		6,470,000,000		6,485,000,000		6,735,000,000		30,623,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	99,8%	100%	250,000,000	100%	285,000,000	100%	285,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	1,470,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpas aparatur dengan kondisi layak	60%	65%	40,000,000	70%	470,000,000	75%	75,000,000	80%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	735,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	85%	87%	20,000,000	90%	26,000,000	95%	26,000,000	97%	26,000,000	100%	26,000,000	100%	124,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	80%	88,000,000	85%	110,000,000	90%	110,000,000	95%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	528,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	70%	75%	25,000,000	80%	34,000,000	85%	34,000,000	90%	34,000,000	100%	34,000,000	100%	161,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan	0	0.82%	1,200,000,000	0.90%	2,050,000,000	0.99%	2,050,000,000	1.09%	2,050,000,000	1.20%	2,250,000,000	1.20%	9,600,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase masyarakat/pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (fokus sasaran TKI puma/keluarga TKI)	2%	3%	150,000,000	4%	240,000,000	5%	240,000,000	6%	240,000,000	7%	240,000,000	7%	1,110,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72.63%	73.36%	2,150,000,000	74.09%	3,400,000,000	74.83%	3,400,000,000	75.58%	3,400,000,000	76.34%	3,400,000,000	76.34%	15,750,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diberi pembinaan	7.03%	8%	170,000,000	8.80%	225,000,000	9.70%	250,000,000	10.60%	250,000,000	11.70%	250,000,000	11.70%	1,145,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,880,000,000		3,840,000,000		4,140,000,000		4,590,000,000		4,840,000,000		20,290,000,000.00	
01	BPPKB				2,880,000,000		3,840,000,000		4,140,000,000		4,590,000,000		4,840,000,000		20,290,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	96.6%	100%	850,000,000	100%	1,050,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,750,000,000	100%	6,400,000,000.00	BPPKB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi layak fungsi	96.50%	96.60%	300,000,000	96.70 %	395,000,000	96.80%	395,000,000	96.85%	395,000,000	97%	395,000,000	97%	1,880,000,000.00	BPPKB
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	96.60%	100%	25,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	165,000,000.00	BPPKB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat bintek / sosialisasi	96.60%	100%	170,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	1,190,000,000.00	BPPKB
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Persentase Pembinaan Keluarga	68%	70%	285,000,000	70%	435,000,000	70%	435,000,000	70%	435,000,000	70%	435,000,000	70%	2,025,000,000.00	BPPKB
	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan & anak	Persentase Penanganan pelayanan KDRT yang melapor	70.50%	71.25%	900,000,000	73.25 %	1,200,000,000	75.25%	1,300,000,000	76.75%	1,500,000,000	78%	1,500,000,000	78%	6,400,000,000.00	BPPKB
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	88.09%	88.20%	350,000,000	88.34 %	470,000,000	88.48%	470,000,000	88.66%	470,000,000	88.79 %	470,000,000	88.79 %	2,230,000,000.00	BPPKB
01	PANGAN				3,065,000,000		4,179,000,000		4,309,000,000		4,309,000,000		4,559,000,000		20,421,000,000.00	
01	KANTOR KETAHANAN PANGAN				3,065,000,000		4,179,000,000		4,309,000,000		4,309,000,000		4,559,000,000		20,421,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	170,000,000	100%	220,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	1,190,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	120,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	155,000,000	100%	740,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bintek/ sosialisasi	100%	100%	68,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	448,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	7,000,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	43,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan	75%	80%	1,850,000,000	85%	2,500,000,000	90%	2,550,000,000	95%	2,550,000,000	100%	2,750,000,000	100%	12,200,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Mutu produk Pangan	Peningkatan IKM yang telah memperoleh sertifikat BPOM dan MUI	0.39%	0.91%	850,000,000	1.43%	1,200,000,000	1.95%	1,250,000,000	2.47%	1,250,000,000	2.99%	1,250,000,000	2.99%	5,800,000,000.00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
01	PERTANAHAN				640,000,000		890,000,000		890,000,000		890,000,000		890,000,000		4,200,000,000.00	
	BAGIAN PEMERINTAHAN				640,000,000		890,000,000		890,000,000		890,000,000		890,000,000		4,200,000,000.00	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	25%	30%	295,000,000	40%	475,000,000	50%	475,000,000	55%	475,000,000	60%	475,000,000	60%	2,195,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Cakupan data dan informasi pertanahan	0%	22.73%	345,000,000	45.45%	415,000,000	68.18%	415,000,000	90.91%	415,000,000	100%	415,000,000	100%	2,005,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
01	LINGKUNGAN HIDUP				6,387,000,000		11,420,000,000		10,420,000,000		10,420,000,000		10,645,000,000		49,292,000,000.00	
01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				6,387,000,000		11,420,000,000		10,420,000,000		10,420,000,000		10,645,000,000		49,292,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	400,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	500,000,000	100%	2,325,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	500,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	2,300,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	170,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	70%	5%	50,000,000	5%	60,000,000	5%	60,000,000	5%	60,000,000	5%	60,000,000	95%	290,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	70	70,2	1,375,000,000	70,4	1,700,000,000	70,6	1,700,000,000	70,8	1,700,000,000	71	1,900,000,000	71	8,375,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks kualitas udara	94,99	95,2		95,4		95,6		95,8		96		96		
	Program Pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik		8%	325,000,000	9%	425,000,000	10%	425,000,000	11%	425,000,000	12%	425,000,000	12%	2,025,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah	Persentase peningkatan sampah yang dikelola oleh masyarakat	5500 ton	10%	1,500,000,000	10%	1,900,000,000	10%	1,900,000,000	10%	1,900,000,000	10%	1,900,000,000	50%	9,100,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks tutupan hutan	42,02	42,5	2,207,000,000	43	6,375,000,000	43,5	5,375,000,000	44	5,375,000,000	44,5	5,375,000,000	44,5	24,707,000,000.00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
01	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1,850,000,000		2,040,000,000		2,215,000,000		2,360,000,000		2,580,000,000		11,045,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
01	DISPENDUKCAPIL				1,850,000,000		2,040,000,000		2,215,000,000		2,360,000,000		2,580,000,000		11,045,000,000		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	390,000,000	100%	430,000,000	100%	445,000,000	100%	460,000,000	100%	480,000,000	100%	2,205,000,000.00	DISPENDUKCAPIL	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	100%	100%	400,000,000	100%	435,000,000	100%	450,000,000	100%	465,000,000	100%	485,000,000	100%	2,235,000,000.00	DISPENDUKCAPIL	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	240,000,000	100%	245,000,000	100%	250,000,000	100%	255,000,000	100%	260,000,000	100%	1,250,000,000.00	DISPENDUKCAPIL	
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	155,000,000.00	DISPENDUKCAPIL	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi	100%	100%	795,000,000	100%	900,000,000	100%	1,040,000,000	100%	1,145,000,000	100%	1,320,000,000	100%	5,200,000,000.00	DISPENDUKCAPIL	
01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8,690,000,000		10,510,000,000		10,510,000,000		10,510,000,000		10,830,000,000		51,050,000,000.00		
01	BAPEMAS				8,690,000,000		10,510,000,000		10,510,000,000		10,510,000,000		10,830,000,000		51,050,000,000.00		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	90%	100%	1,250,000,000	100%	1,555,000,000	100%	1,555,000,000	100%	1,555,000,000	100%	1,750,000,000	100%	7,665,000,000.00	BAPEMAS	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	90%	100%	450,000,000	100%	570,000,000	100%	570,000,000	100%	570,000,000	100%	570,000,000	100%	2,730,000,000.00	BAPEMAS
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	75%	80%	160,000,000	85%	205,000,000	90%	205,000,000	95%	205,000,000	100%	205,000,000	100%	980,000,000.00	BAPEMAS
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi	0%	100%	180,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	1,100,000,000.00	BAPEMAS
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase kinerja lembaga ekonomi perdesaan yang sehat	90%	91%	650,000,000	92%	375,000,000	93%	375,000,000	94%	375,000,000	95%	375,000,000	95%	2,150,000,000.00	BAPEMAS
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG dan melestarikan SDA	75%	77%	1,500,000,000	79%	1,875,000,000	81%	1,875,000,000	83%	1,875,000,000	85%	2,000,000,000	85%	9,125,000,000.00	BAPEMAS
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimtek	85%	87%	2,500,000,000	89%	3,200,000,000	91%	3,200,000,000	93%	3,200,000,000	95%	3,200,000,000	95%	15,300,000,000.00	BAPEMAS
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berkembang	80%	83%	2,000,000,000	86%	2,500,000,000	89%	2,500,000,000	92%	2,500,000,000	95%	2,500,000,000	95%	12,000,000,000.00	BAPEMAS
01	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,730,000,000		7,470,000,000		7,470,000,000		7,470,000,000		7,535,000,000		33,675,000,000.00	
01	DISPENDUKCAPIL				-		-		-		-		-		-	
	NULL				-		-		-		-		-		-	
01	BPPKB				3,730,000,000		7,470,000,000		7,470,000,000		7,470,000,000		7,535,000,000		33,675,000,000.00	
	Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta Keluarga Berencana	68%	70%	1,700,000,000	70%	4,750,000,000	70%	4,750,000,000	70%	4,750,000,000	70%	4,750,000,000	70%	20,700,000,000.00	BPPKB
	Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan	Persentase PUS yang mendapatkan KIE	100%	100%	1,900,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,600,000,000	100%	12,105,000,000.00	BPPKB
	Program pengembangan sistem informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	130,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	100%	185,000,000	100%	870,000,000.00	BPPKB
01	PERHUBUNGAN				11,965,000,000		8,435,000,000		13,435,000,000		8,454,000,000		8,754,000,000		51,043,000,000.00	
01	DISHUBKOMINFO				11,965,000,000		8,435,000,000		13,435,000,000		8,454,000,000		8,754,000,000		51,043,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	80%	82%	750,000,000	84%	1,000,000,000	86%	1,000,000,000	88%	1,000,000,000	90%	1,000,000,000	90%	4,750,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi	80%	82%	350,000,000	84%	465,000,000	86%	465,000,000	88%	465,000,000	90%	465,000,000	90%	2,210,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	82%	60,000,000	83%	81,000,000	84%	81,000,000	85%	100,000,000	86%	100,000,000	86%	422,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	13%	16%	130,000,000	19%	145,000,000	22%	155,000,000	25%	170,000,000	28%	185,000,000	28%	785,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dkumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	70%	70%	30,000,000	73%	4,000,000	76%	4,000,000	79%	4,000,000	82%	4,000,000	82%	46,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan	Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor	2%	1,9%	350,000,000	1,8%	450,000,000	1,7%	450,000,000	1,6%	450,000,000	1,5%	500,000,000	1,5%	2,200,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir	71%	74%	1,300,000,000	77%	1,750,000,000	80%	1,750,000,000	83%	1,750,000,000	86%	1,750,000,000	86%	8,300,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab	30%	32%	200,000,000	35%	260,000,000	38%	260,000,000	42%	260,000,000	45%	260,000,000	45%	1,240,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten	53%	55%	2,520,000,000	58%	1,355,000,000	61%	1,345,000,000	64%	1,330,000,000	67%	1,565,000,000	67%	8,115,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang berjin	11%	12%	6,200,000,000	14%	2,800,000,000	16%	7,800,000,000	18%	2,800,000,000	20%	2,800,000,000	20%	22,400,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	0%	16%	75,000,000	26%	125,000,000	36%	125,000,000	46%	125,000,000	56%	125,000,000	56%	575,000,000.00	DISHUBKOMINFO
01	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,650,000,000		4,550,000,000		5,650,000,000		5,900,000,000		6,000,000,000		24,750,000,000.00	
01	DISHUBKOMINFO				2,650,000,000		4,550,000,000		5,650,000,000		5,900,000,000		6,000,000,000		24,750,000,000.00	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase layanan publik yang menggunakan teknologi informasi (TI)	60%	62%	1,650,000,000	65%	3,150,000,000	70%	4,150,000,000	72%	4,150,000,000	75%	4,250,000,000	75%	17,350,000,000.00	DISHUBKOMINFO
	Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase desiminasi dan pendistribusian informasi	50%	52%	1,000,000,000	55%	1,400,000,000	60%	1,500,000,000	62%	1,750,000,000	65%	1,750,000,000	65%	7,400,000,000.00	DISHUBKOMINFO



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5,943,000,000		4,293,000,000		4,312,000,000		4,342,000,000		4,442,000,000		23,332,000,000.00	
01	DINKOP DAN UMKM				5,943,000,000		4,293,000,000		4,312,000,000		4,342,000,000		4,442,000,000		23,332,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	400,000,000	100%	525,000,000	100%	525,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	2,600,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	225,000,000	100%	295,000,000	100%	295,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	1,465,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	13,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100%	81,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	0%	13%	50,000,000	26%	65,000,000	39%	65,000,000	52%	65,000,000	65%	65,000,000	65%	310,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing	0.09%	0.12%	2,000,000,000	0.15%	381,000,000	0.17%	400,000,000	0.20%	400,000,000	0.22%	400,000,000	0.22%	3,581,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program pengembangan Kewira Usaha dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	256ribu	0.02%	1,245,000,000	0.04%	330,000,000	0.06%	330,000,000	0.08%	330,000,000	0.1%	330,000,000	0.1%	2,565,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan omzet UMKM yang terfasilitasi promosi dan temu bisnis	0%	20%	405,000,000	40%	520,000,000	60%	520,000,000	80%	520,000,000	100%	520,000,000	100%	2,485,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan UMKM	Persentase masyarakat yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan kerja dan akses pasar untuk menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing	0%	1.04%	305,000,000	2.08%	505,000,000	3.12%	505,000,000	4.16%	505,000,000	5.20%	505,000,000	5.20%	2,325,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	0%	1,1 %	650,000,000	1,2 %	805,000,000	1,3 %	805,000,000	1,4 %	805,000,000	1,5 %	805,000,000	1,5 %	3,870,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
		Persentase koperasi aktif	1%	1.1%		1.21%		1.33%		1.46%		1.61%		1.61%		
	Program/Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Usahanya berkembang	0%	10%	650,000,000	20%	850,000,000	30%	850,000,000	40%	850,000,000	50%	850,000,000	50%	4,050,000,000.00	DINKOP DAN UMKM
01	PENANAMAN MODAL				2,618,000,000		3,875,000,000		4,050,000,000		4,050,000,000		4,050,000,000		18,643,000,000.00	
01	KPTSP				2,268,000,000		3,420,000,000		3,595,000,000		3,595,000,000		3,595,000,000		16,473,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	97%	98%	261,000,000	98%	525,000,000	99%	525,000,000	99%	525,000,000	100%	525,000,000	100%	2,361,000,000.00	KPTSP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	97%	98%	1,000,000,000	98%	1,425,000,000	99%	1,450,000,000	99%	1,450,000,000	100%	1,450,000,000	100%	6,775,000,000.00	KPTSP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	350,000,000.00	KPTSP
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	99%	99%	32,000,000	99%	45,000,000	99%	45,000,000	99%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	212,000,000.00	KPTSP
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase pemrosesan ijin sesuai SOP	80%	83%	925,000,000	86%	1,350,000,000	89%	1,500,000,000	92%	1,500,000,000	95%	1,500,000,000	95%	6,775,000,000	KPTSP
03	BAGIAN PEREKONOMIAN				350,000,000		455,000,000		455,000,000		455,000,000		455,000,000		2,170,000,000.00	
	Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal	92.5%	100%	350,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	455,000,000	100%	2,170,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
01	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				5,300,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		42,700,000,000.00	
01	DISPORBUDPAR				5,300,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		9,350,000,000		42,700,000,000.00	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang Dibina	100%	100%	550,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	3,950,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausahaan muda yang dibina	37%	40%	800,000,000	43%	1,200,000,000	45%	1,200,000,000	47%	1,200,000,000	50%	1,200,000,000	50%	5,600,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	42%	45%	3,650,000,000	47%	5,300,000,000	50%	5,300,000,000	52%	5,300,000,000	55%	5,300,000,000	55%	24,850,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarpras OR dalam kondisi baik	40%	45%	300,000,000	50%	2,000,000,000	55%	2,000,000,000	60%	2,000,000,000	65%	2,000,000,000	65%	8,300,000,000.00	DISPORBUDPAR



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01	STATISTIK				270,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000		1,570,000,000.00	
01	BAPPEDA				270,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000		1,570,000,000.00	
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik	Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu	100%	100%	270,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	1,570,000,000.00	BAPPEDA
01	PERSANDIAN				-		-		-		-		-		-	
01					-		-		-		-		-		-	
	NULL				-		-		-		-		-		-	
01	KEBUDAYAAN				1,857,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		35,257,000,000.00	
01	DISPORBUDPAR				1,857,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		8,350,000,000		35,257,000,000.00	
	Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya	Persentase Fasilitas Event seni dan Budaya	46%	48%	1,359,000,000	50%	7,500,000,000	52%	7,500,000,000	54%	7,500,000,000	56%	7,500,000,000	56%	31,359,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dipelihara	50%	55%	498,000,000	60%	850,000,000	65%	850,000,000	70%	850,000,000	75%	850,000,000	75%	3,898,000,000.00	DISPORBUDPAR
01	PERPUSTAKAAN				700,000,000		810,000,000		880,000,000		880,000,000		905,000,000		4,175,000,000.00	
01	KPAD				700,000,000		810,000,000		880,000,000		880,000,000		905,000,000		4,175,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	1,225,000,000.00	KPAD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	170,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	770,000,000.00	KPAD
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	145,000,000.00	KPAD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum	11.000	5%	305,000,000	10%	380,000,000	10%	450,000,000	10%	450,000,000	10%	450,000,000	45%	2,035,000,000.00	KPAD
01	KEARSIPAN				321,000,000		245,000,000		245,000,000		245,000,000		250,000,000		1,306,000,000.00	
01	KPAD				321,000,000		245,000,000		245,000,000		245,000,000		250,000,000		1,306,000,000.00	
	Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan berbasis Teknologi Informasi	Persentase Lembaga pemerintahan daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	0%	19.80%	200,000,000	19.80 %	95,000,000	20.10%	95,000,000	20.10%	95,000,000	20.10 %	100,000,000	100%	585,000,000.00	KPAD
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi berbasis teknologi informasi di lembaga pemerintah daerah	0%	13.20%	40,000,000	13.20 %	50,000,000	13.20%	50,000,000	13.20%	50,000,000	13.20 %	50,000,000	66%	240,000,000.00	KPAD
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase peningkatan dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	3.128 dokumen	332.48%	81,000,000	332.48 %	100,000,000	332.48 %	100,000,000	332.48 %	100,000,000	332.48 %	100,000,000	332.48 %	481,000,000.00	KPAD
02	URUSAN PILIHAN				55,176,000,000		119,521,000,000		121,106,000,000		123,151,000,000		125,446,000,000		544,400,000,000.00	
02	KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,768,000,000		21,990,000,000		21,990,000,000		22,990,000,000		23,990,000,000		99,728,000,000.00	
02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,768,000,000		21,990,000,000		21,990,000,000		22,990,000,000		23,990,000,000		99,728,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi	100%	100%	450,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	550,000,000	100%	2,650,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		perkantoran														
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	93%	100%	150,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	100%	970,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	90,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	570,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	75%	80%	10,000,000	85%	15,000,000	90%	15,000,000	95%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	70,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Konsumsi	14.642,26 ton	42.7%	5,785,000,000	74.12 %	11,000,000,000	105.54 %	11,000,000,000	126.09 %	11,000,000,000	148.7 %	11,000,000,000	148.7 %	49,785,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase Peningkatan produksi perikanan non konsumsi	234.342.000 ekor	47%		80.81 %		122,4%		130,88 %		139,6 %		139,6 %		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	911,95 ton	5.55%	1,068,000,000	14.53 %	2,600,000,000	20.26%	2,600,000,000	26.27%	2,600,000,000	32.59 %	2,600,000,000	32.59 %	11,468,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina	400 org	50%	1,215,000,000	100%	7,500,000,000	150%	7,500,000,000	200%	8,500,000,000	250%	9,500,000,000	250%	34,215,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan budidaya	200 klp	2,5%		5%		7,5%		10%		12,5%				
		Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan budidaya	50 klp	2,5%		5%		7,5%		10%		12,5%				
02	PARWISATA				5,658,000,000		39,115,000,000		39,135,000,000		39,735,000,000		40,335,000,000		163,978,000,000.00	
02	DISPORBUDPAR				5,658,000,000		39,115,000,000		39,135,000,000		39,735,000,000		40,335,000,000		163,978,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	650,000,000	100%	880,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	4,530,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	60%	75%	1,050,000,000	80%	1,050,000,000	85%	1,050,000,000	90%	1,050,000,000	95%	1,050,000,000	95%	5,250,000,000.00	DISPORBUDPAR



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	40%	50%	25,000,000	60%	35,000,000	70%	35,000,000	80%	35,000,000	90%	35,000,000	90%	165,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	110,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	710,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase tempat wisata yang terpelihara	60%	65%	3,000,000,000	70%	33,000,000,000	75%	33,000,000,000	80%	33,000,000,000	85%	33,000,000,000	85%	135,000,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase event/tempat wisata yang dipromosikan	60%	65%	700,000,000	70%	3,000,000,000	75%	3,000,000,000	80%	3,000,000,000	85%	3,000,000,000	85%	12,700,000,000.00	DISPORBUDPAR
	Program Pengembangan Industri Kepariwisata	Persentase Peningkatan Usaha Wisata	5%	10%	123,000,000	12%	1,000,000,000	15%	1,000,000,000	18%	1,500,000,000	20%	2,000,000,000	20%	5,623,000,000.00	DISPORBUDPAR
02	PERTANIAN				24,630,000,000		39,746,000,000		41,331,000,000		41,631,000,000		41,956,000,000		189,294,000,000.00	
02	DINAS PERTANIAN				11,695,000,000		15,536,000,000		16,036,000,000		16,051,000,000		16,076,000,000		75,394,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	500,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	3,100,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	82.4%	300,000,000	84.87 %	390,000,000	87.42%	390,000,000	90.04%	390,000,000	92.74 %	390,000,000	92.74 %	1,860,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	80%	83.64%	90,000,000	85.31 %	21,000,000	87.02%	21,000,000	88.76%	21,000,000	90.53 %	21,000,000	90.53 %	99,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	82%	100%	32,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	190,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan utama	9.63%	9.92%	750,000,000	10.12 %	975,000,000	10.32%	975,000,000	10.526 %	975,000,000	10.74 %	975,000,000	10.74 %	4,625,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Mutu Produksi Tanaman Pangan	Rasio budidaya tanaman pangan ramah lingkungan	0%	0.1%	360,000,000	0.12%	450,000,000	0.14%	450,000,000	0.17%	450,000,000	0.21%	450,000,000	0.21%	2,150,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama	7.26%	7.48%	720,000,000	7.63%	2,750,000,000	7.78%	3,000,000,000	7.94%	3,000,000,000	8.09%	3,000,000,000	8.09%	13,750,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Mutu Produksi Tanaman Hortikultura	Rasio budidaya tanaman hortikultura ramah lingkungan	0%	0.10%	390,000,000	0.12%	475,000,000	0.14%	475,000,000	0.17%	475,000,000	0.21%	475,000,000	0.21%	2,250,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rasio peningkatan indeks pertanaman	1.69%	1.71%	6,703,000,000	1.73%	8,250,000,000	1.74%	8,500,000,000	1.76%	8,500,000,000	1.78%	8,500,000,000	1.78%	40,000,000,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase pemenuhan teknologi pertanian	42%	44.1%	1,300,000,000	46.3%	1,300,000,000	48.62%	1,300,000,000	51.05%	1,300,000,000	53.60 %	1,300,000,000	53.60 %	6,200,000,000.00	DINAS PERTANIAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Rasio Pemasaran terhadap seluruh komoditas pertanian	0.16%	0.18%	550,000,000	0.19%	235,000,000	0.21%	235,000,000	0.23%	250,000,000	0.26%	275,000,000	0.26%	1,170,000,000.00	DINAS PERTANIAN
02	DINAS PETERNAKAN				4,640,000,000		5,110,000,000		6,110,000,000		6,245,000,000		6,345,000,000		28,450,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	500,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	625,000,000	100%	3,000,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	93%	94%	450,000,000	95%	560,000,000	96%	560,000,000	97%	560,000,000	98%	560,000,000	98%	2,690,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	250,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	1,550,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	95,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	595,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu	0.10%	0.30%	680,000,000	0.50%	835,000,000	0.70%	835,000,000	0.90%	835,000,000	1.10%	835,000,000	1.10%	4,020,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan	1%	2.50%	460,000,000	4.50%	650,000,000	7.00%	1,650,000,000	9.50%	1,650,000,000	12.50 %	1,650,000,000	12.50 %	6,060,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan Promosi pemasaran hasil peternakan dan kualitas hasil peternakan	1.00%	3.00%	300,000,000	5.00%	365,000,000	7.00%	365,000,000	9.00%	365,000,000	11.00 %	365,000,000	11.00 %	1,760,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternakan	Peningkatan pembinaan usaha dan agribisnis peternakan	2%	12.00%	505,000,000	22.00 %	570,000,000	32.00%	570,000,000	42.00%	570,000,000	52.00 %	570,000,000	52.00 %	2,785,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan	Peningkatan ketrampilan di bidang peternakan	0%	20%	150,000,000	40.00 %	190,000,000	60.00%	190,000,000	80.00%	190,000,000	100.00 %	190,000,000	100.00 %	910,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
	Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan	Peningkatan Pengawasan Bahan/Produk Peternakan	1%	2%	1,250,000,000	3.00%	865,000,000	5.00%	865,000,000	10.00%	1,000,000,000	14.00 %	1,100,000,000	14.00 %	5,080,000,000.00	DINAS PETERNAKAN
02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				1,760,000,000		2,790,000,000		2,875,000,000		2,900,000,000		2,950,000,000		13,275,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	100%	225,000,000	100%	275,000,000	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	1,575,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	90%	100%	135,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	795,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	92.5%	100%	210,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	890,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	75%	80%	10,000,000	85%	15,000,000	90%	15,000,000	95%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	70,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan produksi perkebunan	2%	2.2%	585,000,000	2.4%	750,000,000	2.6%	750,000,000	2.8%	750,000,000	3.0%	750,000,000	3.0%	3,585,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sektor Perkebunan	Persentase produk tembakau yang sudah memenuhi standar kualitas	1.5%	1.7%	485,000,000	1.9%	1,275,000,000	2.1%	1,300,000,000	2.3%	1,300,000,000	2.5%	1,300,000,000	2.5%	5,660,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program pembinaan lingkungan sosial Sektor Perkebunan	Persentase peningkatan kapasitas petani cengkeh	1.75%	1.85%	110,000,000	1.95%	140,000,000	2.15%	150,000,000	2.25%	150,000,000	2.35%	150,000,000	2.35%	700,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN				6,535,000,000		16,310,000,000		16,310,000,000		16,435,000,000		16,585,000,000		72,175,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	375,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	2,375,000,000.00	BP4K
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	2,000,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	12,000,000,000.00	BP4K
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	125,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	245,000,000.00	BP4K
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	225,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	1,325,000,000.00	BP4K
	Program Pengembangan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian	50%	60%	750,000,000	70%	1,000,000,000	80%	1,000,000,000	90%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	5,050,000,000.00	BP4K
	Program Pengembangan Operasional Intensifikasi dan sarana produksi	Persentase pengembangan operasional intensifikasi dan sarana produksi	70%	75%	60,000,000	80%	80,000,000	85%	80,000,000	90%	80,000,000	95%	80,000,000	95%	380,000,000.00	BP4K
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis	Persentase pengembangan kewirausahaan dan agribisnis	15%	25%	300,000,000	35%	5,800,000,000	45%	5,800,000,000	55%	5,800,000,000	65%	5,800,000,000	65%	23,500,000,000.00	BP4K
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Sektor Penyuluhan	Persentase Petani Tembakau yang terlatih	0%	20%	2,000,000,000	40%	2,400,000,000	60%	2,400,000,000	80%	2,400,000,000	100%	2,400,000,000	100%	11,600,000,000.00	BP4K
	Program Pengembangan SDM Pertanian	Persentase pengembangan SDM Pertanian	50%	60%	700,000,000	70%	3,750,000,000	80%	3,750,000,000	90%	3,750,000,000	100%	3,750,000,000	100%	15,700,000,000.00	BP4K
02	KEHUTANAN				1,725,000,000		2,190,000,000		2,190,000,000		2,210,000,000		2,250,000,000		10,565,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
02	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				1,725,000,000		2,190,000,000		2,190,000,000		2,210,000,000		2,250,000,000		10,565,000,000.00	
	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan	1%	1.76%	1,285,000,000	1.94%	1,600,000,000	2.10%	1,600,000,000	2.30%	1,600,000,000	2.50%	1,600,000,000	2.50%	7,685,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	persentase Penurunan penanganan permasalahan permasalahan kawasan hutbun	8 kasus	12.5%	100,000,000	25%	130,000,000	37.5%	130,000,000	50%	150,000,000	62.5%	190,000,000	62.5%	700,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Peningkatan kapasitas SDM non aparatur kehutanan dan perkebunan	Persentase kelompok petani kehutanan dan perkebunan yang dibina	1.2%	1.40%	215,000,000	1.60%	290,000,000	1.80%	290,000,000	2.00%	290,000,000	2.20%	290,000,000	2.20%	1,375,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan	Peningkatan jenis komoditi yang di pasarkan	2 Komoditi	50% (3 komoditi)	125,000,000	100% (4 komoditi)	170,000,000	150% (5 komoditi)	170,000,000	200% (6 kmdt)	170,000,000	250% (7 kmdt)	170,000,000	250% (7 kmdt)	805,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN															
	NULL															
02	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
02	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG															
	NULL															
02	PERDAGANGAN				9,895,000,000		11,400,000,000		11,400,000,000		11,500,000,000		11,750,000,000		55,945,000,000.00	
02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				9,895,000,000		11,400,000,000		11,400,000,000		11,500,000,000		11,750,000,000		55,945,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	495,000,000	100%	590,000,000	100%	590,000,000	100%	590,000,000	100%	590,000,000	100%	2,855,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	445,000,000	100%	535,000,000	100%	535,000,000	100%	535,000,000	100%	535,000,000	100%	2,585,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	165,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	0%	17.65%	50,000,000	35.29%	90,000,000	52.94%	90,000,000	76.47%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100%	410,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Perlindungan Konsumen dan Pngamanan Perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan	0%	30%	900,000,000	40%	935,000,000	50%	935,000,000	62%	935,000,000	75%	935,000,000	75%	4,640,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Persentase IKM yang terfasilitasi pemasaran	0.1%	0.67%	650,000,000	0.77%	845,000,000	0.87%	845,000,000	0.97%	845,000,000	1.07%	845,000,000	1.07%	4,030,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan jumlah produk ekspor	0%	20%	50,000,000	40%	60,000,000	60%	60,000,000	80%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	290,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Persentase sarpras pasar yang layak fungsi	65%	65.65%	7,145,000,000	68.93%	8,150,000,000	72.38%	8,150,000,000	76%	8,250,000,000	79%	8,500,000,000	79%	40,195,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD	Persentase Peningkatan PAD BUMD	100%	100%	135,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	775,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02	PERINDUSTRIAN				5,940,000,000		6,720,000,000		6,720,000,000		6,820,000,000		6,950,000,000		33,150,000,000.00	
02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				5,940,000,000		6,720,000,000		6,720,000,000		6,820,000,000		6,950,000,000		33,150,000,000.00	
	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase IKM yang dilatih dalam pengembangan mutu dan sistim produksi	1.0%	2.1%	565,000,000	3.1%	750,000,000	4.2%	750,000,000	5.2%	750,000,000	6.2%	750,000,000	6.2%	3,565,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang di bina	10%	11.5%	3,340,000,000	13%	3,450,000,000	14.5%	3,450,000,000	16%	3,450,000,000	17.5%	3,450,000,000	17.5%	17,140,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang dibina dalam peningkatan kemampuan teknologi industri	1.0%	2.1%	100,000,000	3.1%	120,000,000	4.2%	120,000,000	5.2%	120,000,000	6.2%	150,000,000	6.2%	610,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Penataan Struktur Industri	Persentase kelompok industri yang terbina	2.5%	5%	1,050,000,000	7.5%	1,350,000,000	10%	1,350,000,000	12.5%	1,450,000,000	15%	1,550,000,000	15%	6,750,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Industri	Persentase IKM yang terfasilitasi	2.61%	4.69%	885,000,000	6.77%	1,050,000,000	8.85%	1,050,000,000	11.46%	1,050,000,000	14%	1,050,000,000	14%	5,085,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
02	TRANSMIGRASI				395,000,000		475,000,000		475,000,000		500,000,000		550,000,000		2,395,000,000.00	
02	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				395,000,000		475,000,000		475,000,000		500,000,000		550,000,000		2,395,000,000.00	
	Program transmigrasi regional	Persentase transmigran yang diberangkatkan	20.96%	28%	395,000,000	28%	475,000,000	31.25%	475,000,000	31.25%	500,000,000	31.25%	550,000,000	31.25%	2,395,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
03	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				142,307,500,000		179,772,000,000		179,972,000,000		181,722,000,000		184,522,000,000		868,295,500,000.00	
03	PERENCANAAN				9,410,000,000		14,075,000,000		14,075,000,000		14,325,000,000		14,475,000,000		66,360,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab			
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
03	BAPPEDA				9,410,000,000		14,075,000,000		14,075,000,000		14,325,000,000		14,475,000,000		66,360,000,000.00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	900,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	6,000,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	300,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	2,200,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana	10%	25%	200,000,000	40%	250,000,000	55%	250,000,000	70%	250,000,000	90%	250,000,000	90%	1,200,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	80%	100%	125,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	525,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Perencanaan Strategis Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah tepat waktu	-	100%	490,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	6,090,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah	1. Persentase usulan musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam dokumen RKPDP dan RKPDP-P	80%	85%	1,105,000,000	90%	1,350,000,000	95%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,550,000,000	100%	6,855,000,000.00	BAPPEDA			
		2. Persentase kesesuaian RKPDP-Renja dan RKPDP dan Renja-P	-	90%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	-	BAPPEDA
		3. Persentase kesesuaian RKPDP-PPAS dan RKPDP-PPAS	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		95%	95%	-	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang	Persentase program/kegiatan PD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPDP-Renja, RKPDP-PPAS)	40%	50%	1,750,000,000	60%	2,750,000,000	70%	2,750,000,000	80%	2,750,000,000	90%	2,750,000,000	90%	12,750,000,000.00	BAPPEDA			
	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase program/kegiatan PD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPDP-Renja, RKPDP-PPAS)	40%	50%	1,825,000,000	60%	2,500,000,000	70%	2,500,000,000	80%	2,500,000,000	90%	2,500,000,000	90%	11,825,000,000.00	BAPPEDA			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Persentase program/kegiatan PD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	50%	1,850,000,000	60%	2,500,000,000	70%	2,500,000,000	80%	2,500,000,000	90%	2,500,000,000	90%	11,850,000,000.00	BAPPEDA
	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase program/kegiatan PD Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	50%	625,000,000	60%	1,200,000,000	70%	1,200,000,000	80%	1,200,000,000	90%	1,200,000,000	90%	5,425,000,000.00	BAPPEDA
		2. Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah tepat waktu	80%	90%	240,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	1,640,000,000.00	BAPPEDA
03	KEUANGAN				42,302,000,000		54,672,000,000		54,672,000,000		55,422,000,000		56,622,000,000		263,690,000,000.00	
03	BPKAD				11,255,000,000		14,970,000,000		14,970,000,000		15,070,000,000		15,270,000,000		71,535,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	1,375,000,000	100%	1,650,000,000	100%	1,650,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,850,000,000	100%	8,275,000,000.00	BPKAD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	605,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	3,525,000,000.00	BPKAD
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	110,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	255,000,000	100%	1,130,000,000.00	BPKAD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	590,000,000	100%	735,000,000	100%	735,000,000	100%	735,000,000	100%	735,000,000	100%	3,530,000,000.00	BPKAD
	Program penyusunan anggaran keuangan daerah	Persentase dokumen penganggaran keuangan daerah yang tepat waktu	100%	100%	3,500,000,000	100%	4,900,000,000	100%	4,900,000,000	100%	4,900,000,000	100%	4,900,000,000	100%	23,100,000,000.00	BPKAD
	Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	1,075,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,350,000,000	100%	6,475,000,000.00	BPKAD
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan	100%	100%	2,000,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,850,000,000	100%	13,100,000,000.00	BPKAD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah	Persentase nilai aset daerah yang tercatat	80%	90%		93%		96%		100%		100%		100%	12,400,000,000.00	BPKAD
		Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	100%	2,000,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%		BPKAD
03	DINAS PENDAPATAN				31,047,000,000		39,702,000,000		39,702,000,000		40,352,000,000		41,352,000,000		192,155,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	24,000,000,000	100%	31,000,000,000	100%	31,000,000,000	100%	31,500,000,000	100%	32,000,000,000	100%	149,500,000,000.00	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	365,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	475,000,000	100%	2,265,000,000.00	Dinas Pendapatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	395,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000	100%	2,315,000,000.00	Dinas Pendapatan
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	37,000,000	100%	47,000,000	100%	47,000,000	100%	47,000,000	100%	47,000,000	100%	225,000,000.00	Dinas Pendapatan
	Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola	100%	100%	2.840.150.000	100%	3.349.165.000	100%	3.436.582.000	100%	3.480.240.000	100%	3.650.000.000	100%	16.756.137.000	Dinas Pendapatan
	Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	110%	100%	1.486.600.000	100%	1.735.260.000	100%	1.798.786.000	100%	1.878.665.000	100%	1.983.530.000	100%	8.882.841.000	Dinas Pendapatan
	Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah	Persentase tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah	100%	100%	622.600.000	100%	884.860.000	100%	890.846.000	100%	828.680.000	100%	911.540.000	100%	4.138.526.000	Dinas Pendapatan
	Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	10%	10%	1.300.650.000	10%	1.730.715.000	10%	1.573.786.000	10%	1.662.415.000	10%	1.804.930.000	60%	8.072.496.000	Dinas Pendapatan
03	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7,615,000,000		9,810,000,000		9,810,000,000		10,035,000,000		10,335,000,000		47,605,000,000.00	
03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				7,615,000,000		9,810,000,000		9,810,000,000		10,035,000,000		10,335,000,000		47,605,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	285,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	1,785,000,000.00	BKD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	440,000,000	100%	585,000,000	100%	585,000,000	100%	585,000,000	100%	585,000,000	100%	2,780,000,000.00	BKD
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	120,000,000.00	BKD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pengembangan data/Informasi Kepegawaian	93%	100%	320,000,000	100%	425,000,000	100%	425,000,000	100%	450,000,000	100%	550,000,000	100%	2,170,000,000.00	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Aparatur	62.51%	100%	1,500,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,950,000,000	100%	8,800,000,000.00	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	3,650,000,000	100%	4,800,000,000	100%	4,800,000,000	100%	4,900,000,000	100%	5,000,000,000	100%	23,150,000,000.00	BKD
	Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai	Persentase Penataan Karier sesuai dengan kompetensi	54.48%	100%	1,400,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,850,000,000	100%	8,800,000,000.00	BKD
03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,300,000,000		2,900,000,000		2,900,000,000		3,000,000,000		3,100,000,000		14,200,000,000.00	
03	BAPPEDA				2,300,000,000		2,900,000,000		2,900,000,000		3,000,000,000		3,100,000,000		14,200,000,000.00	
	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase permasalahan yang diusulkan oleh PD yang dapat ditindak lanjuti dalam bentuk kajian	17%	20%	2,150,000,000	20%	2,725,000,000	20%	2,725,000,000	20%	2,825,000,000	20%	2,925,000,000	20%	13,350,000,000.00	BAPPEDA
		2. Persentase program/kegiatan PD Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)	40%	50%	150,000,000	60%	175,000,000	70%	175,000,000	80%	175,000,000	90%	175,000,000	90%	850,000,000.00	BAPPEDA
03	SEKRETARIAT DPRD				24,000,500,000		31,765,000,000		31,765,000,000		32,015,000,000		32,515,000,000		152,060,500,000.00	
03	SEKRETARIAT DPRD				24,000,500,000		31,765,000,000		31,765,000,000		32,015,000,000		32,515,000,000		152,060,500,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	70%	77%	1,200,000,000	85%	1,575,000,000	93%	1,575,000,000	100%	1,575,000,000	100%	1,575,000,000	100%	7,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	85%	1,600,000,000	92%	2,150,000,000	98%	2,150,000,000	100%	2,150,000,000	100%	2,150,000,000	100%	10,200,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	90%	90%	235,000,000	92%	310,000,000	93%	310,000,000	94%	310,000,000	95%	310,000,000	95%	1,475,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti	70%	85%	3,348,500,000	86%	4,325,000,000	87%	4,325,000,000	88%	4,325,000,000	92%	4,325,000,000	92%	20,648,500,000.00	SEKRETARIAT DPRD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		diklat/bimtek/sosialisasi														
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	75%	75%	117,000,000	75%	155,000,000	75%	155,000,000	75%	155,000,000	75%	155,000,000	75%	737,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	85%	86%	17,500,000,000	88%	23,250,000,000	89%	23,250,000,000	90%	23,500,000,000	92%	24,000,000,000	92%	111,500,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
03	SEKRETARIAT DAERAH				33,520,000,000		41,490,000,000		41,485,000,000		41,610,000,000		42,110,000,000		200,215,000,000.00	
03	BAGIAN PEMERINTAHAN				2,305,000,000		4,065,000,000		4,065,000,000		4,165,000,000		4,615,000,000		19,215,000,000.00	
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi perumusan kebijakan pemerintahan desa	50%	60%	1,800,000,000	60%	3,450,000,000	60%	3,450,000,000	60%	3,550,000,000	70%	4,000,000,000	70%	16,250,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang mencapai sasaran	100%	100%	220,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	1,320,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	135,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	795,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan	Tingkat kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	0%	13.64%	150,000,000	27.27%	175,000,000	54.55%	175,000,000	68.18%	175,000,000	81.82%	175,000,000	81.82%	850,000,000.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
03	BAGIAN HUKUM				1,655,000,000		2,055,000,000		2,055,000,000		2,080,000,000		2,130,000,000		9,975,000,000.00	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan	65%	70%	375,000,000	75%	475,000,000	80%	475,000,000	85%	500,000,000	90%	550,000,000	90%	2,375,000,000.00	BAGIAN HUKUM
	Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	1. Persentase peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	70%	75%	380,000,000	80%	480,000,000	85%	480,000,000	90%	480,000,000	95%	480,000,000	95%	2,300,000,000.00	BAGIAN HUKUM
		2. Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang didokumentasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%
	Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	100%	100%	900,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	5,300,000,000.00	BAGIAN HUKUM
03	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				885,000,000		740,000,000		385,000,000		385,000,000		385,000,000		2,780,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan yang dirumuskan	100%	100%	590,000,000	100%	355,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	945,000,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Program Fasilitas & Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan yang difasilitasi	100%	100%	295,000,000	100%	385,000,000	100%	385,000,000	100%	385,000,000	100%	385,000,000	100%	1,835,000,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
03	BAGIAN PEREKONOMIAN				1,425,000,000		1,855,000,000		1,980,000,000		1,980,000,000		1,980,000,000		9,220,000,000.00	
	Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan rakyat	100%	100%	550,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	730,000,000	100%	3,470,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	Program Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Ekonomi	Persentase terlaksananya koordinasi dan perumusan kebijakan sumberdaya ekonomi	100%	100%	875,000,000	100%	1,125,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	5,750,000,000.00	BAGIAN PEREKONOMIAN
03	BAGIAN PEMBANGUNAN				2,110,000,000		2,785,000,000		2,785,000,000		2,785,000,000		2,785,000,000		13,250,000,000.00	
	Program Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun	25%	100%	245,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	325,000,000	100%	1,545,000,000.00	BAGIAN PEMBANGUNAN
	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan	25%	50%	100,000,000	50%	130,000,000	75%	130,000,000	75%	130,000,000	75%	130,000,000	75%	620,000,000.00	BAGIAN PEMBANGUNAN
	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah paket dan nilai pekerjaan pengadaan barang / jasa meningkat	75%	75%	1,650,000,000	80%	2,165,000,000	80%	2,165,000,000	90%	2,165,000,000	90%	2,165,000,000	90%	10,310,000,000.00	BAGIAN PEMBANGUNAN
	Program monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi yang terfasilitasi	100%	100%	115,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	165,000,000	100%	775,000,000.00	BAGIAN PEMBANGUNAN
03	BAGIAN ORGANISASI				1,110,000,000		1,550,000,000		1,725,000,000		1,725,000,000		1,725,000,000		7,835,000,000.00	
	Program Perencanaan dan Pelaporan PD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	80,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	575,000,000.00	BAGIAN ORGANISASI
	Program Peningkatan Kapasitas dan Efektifitas Kelengkapan	Persentase Penataan Kelembagaan menurut urusan Pemerintahan di Kabupaten Blitar	80%	85%	450,000,000	90%	650,000,000	90%	750,000,000	95%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	3,350,000,000.00	BAGIAN ORGANISASI
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Risalah Budaya Kerja, Tata Naskah Dinas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Operasional	80%	80%	285,000,000	85%	378,000,000	90%	400,000,000	95%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	1,863,000,000.00	BAGIAN ORGANISASI



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prosedur (SOP)														
	Program Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Analisa Jabatan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	60%	80%	295,000,000	85%	402,000,000	90%	450,000,000	95%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	2,047,000,000.00	BAGIAN ORGANISASI
03	BAGIAN UMUM				21,380,000,000		25,200,000,000		25,250,000,000		25,250,000,000		25,250,000,000		122,330,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	93%	4,000,000,000	95%	4,850,000,000	97%	4,850,000,000	99%	4,850,000,000	100%	4,850,000,000	100%	23,400,000,000.00	BAGIAN UMUM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	80%	85%	13,000,000,000	90%	14,900,000,000	95%	14,900,000,000	100%	14,900,000,000	100%	14,900,000,000	100%	72,600,000,000.00	BAGIAN UMUM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan aparatur yang profesional sesuai bidangnya	100%	100%	585,000,000	100%	705,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	3,540,000,000.00	BAGIAN UMUM
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan	100%	100%	3,500,000,000	100%	4,375,000,000	100%	4,375,000,000	100%	4,375,000,000	100%	4,375,000,000	100%	21,000,000,000.00	BAGIAN UMUM
	Program Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan PD yang tepat waktu	100%	100%	295,000,000	100%	370,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	375,000,000	100%	1,790,000,000.00	BAGIAN UMUM
03	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				2,650,000,000		3,240,000,000		3,240,000,000		3,240,000,000		3,240,000,000		15,610,000,000.00	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol	Persentase jumlah pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dilaksanakan dengan baik dalam 1 tahun	86%	90%	2,500,000,000	95%	3,025,000,000	96%	3,025,000,000	97%	3,025,000,000	98%	3,025,000,000	98%	14,600,000,000.00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	Program Sosialisasi Tentang Ketentuan Dibandang Cukai	Persentase ketentuan dibidang cukai yang disosialisasikan	100%	100%	150,000,000	100%	215,000,000	100%	215,000,000	100%	215,000,000	100%	215,000,000	100%	1,010,000,000.00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
03	INSPEKTORAT				5,670,000,000		7,215,000,000		7,420,000,000		7,470,000,000		7,520,000,000		35,295,000,000.00	
03	INSPEKTORAT				5,670,000,000		7,215,000,000		7,420,000,000		7,470,000,000		7,520,000,000		35,295,000,000.00	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	860,000,000	100%	1,195,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,300,000,000	100%	5,805,000,000.00	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	85,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	525,000,000.00	Inspektorat
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	25,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	165,000,000.00	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi	100%	100%	450,000,000	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	575,000,000	100%	2,750,000,000.00	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kdh	Persentase desa, perangkat daerah, BUMD yang diawasi dan dibina	65.61%	100%	4,250,000,000	100%	5,300,000,000	100%	5,500,000,000	100%	5,500,000,000	100%	5,500,000,000	100%	26,050,000,000.00	Inspektorat
03	KECAMATAN				16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		82,500,000,000.00	
	KECAMATAN				16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		16,500,000,000		82,500,000,000.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	2,475,000,000	100%	2,475,000,000	100%	2,475,000,000	100%	2,475,000,000	100%	2,475,000,000	100%	12,375,000,000.00	KECAMATAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	6,187,500,000.00	KECAMATAN
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	1,237,500,000	100%	6,187,500,000.00	KECAMATAN
	Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%	65%	5,775,000,000	70%	5,775,000,000	80%	5,775,000,000	90%	5,775,000,000	100%	5,775,000,000	100%	28,875,000,000.00	KECAMATAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program pelayanan kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	60%	65%	5,775,000,000	70%	5,775,000,000	80%	5,775,000,000	90%	5,775,000,000	100%	5,775,000,000	100%	28,875,000,000.00	KECAMATAN
		TOTAL BELANJA LANGSUNG			1,111,904,000,000		1,191,701,000,000		1,290,729,000,000		1,409,657,000,000		1,550,422,000,000		6,554,413,000,000	



BAB PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9

Ukuran kemajuan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Blitar periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Blitar ditetapkan sebagaimana telah disajikan pada bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9.1.

Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat (tabel 9.2), aspek pelayanan umum (tabel 9.3), dan aspek daya saing daerah (tabel 9.4).



Tabel 9.1

Indikator Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I: Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat											
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%)	> 5,5	1. Menurunnya angka kemiskinan	a. Angka Kemiskinan (%)	10,22	10-10,22	9,9-10	9,8-9,9	9,7-9,8	9,6-9,7	≤ 9,6
	2. Indeks Gini	≤ 0,3		b. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	23,39*)	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
				c. Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
			2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Misi II: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum											
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	a. Persentase penanganan konflik (%)	100	100	100	100	100	100	100
				b. Persentase penegakan PERDA (%)	95	95	95	95	100	100	100



VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)											
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	≥ 70	4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60
			5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	> 80	6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	BB	A	A
				b. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	36	30 besar	30 besar	30 besar	20 besar	20 besar	10 besar
				c. Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
			7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing												
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	> 47	8. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,01*)	17,08	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	
				b. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,86*)	13,04	13,36	13,86	14,36	14,86	15,36	
				c. Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)P	35,89*)	35,76	35,63	35,56	35,43	35,32	35,21	
				d. Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata (%)	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	
			9. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			10. Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	a. Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
				b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,31	66,7	67	68	69	70	71	



VISI: "MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
				(IKLH)							
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan											
6. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,75	11. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal (%)	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0



Tabel 9.2
Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar
pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1	Pertumbuhan PDRB	5,05	5,05-5,25	5,25-5,4	5,4-5,6	5,6-5,7	5,6-5,7	5,6-5,7	5,6-5,7
1.2	Laju Inflasi	1,71	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
1.3	PDRB per kapita (Juta Rp.)	23,39	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35	>40
1.4	Indeks Gini	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,3	0,3	≤0,3
1.5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	89,78	89,78-90	90-90,1	90,1-90,2	90,2-90,3	90,3-90,4	>90,4	>90,4
1.6	IPM	68,13	68,13-68,5	68,5-68,75	68,75-69	69-69,5	69,5-70	>70	>70
1.7	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
II. Kesejahteraan Masyarakat									
1. Pendidikan									
1.1	Angka Melek huruf (%)	98	98	98	99	99	99	99	99
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,24	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	8	8
1.3	Angka Partisipasi Kasar								
	- Jenjang SD/MI dan Paket A	123	99	100	100	100	100	100	100
	- Jenjang SMP/MTs dan Paket B	108	99	100	100	100	100	100	100
	- Jenjang SMA/SMK/MA	41	42	42	45	46	48	50	50
1.4	Angka Partisipasi Murni								
	- Jenjang SD/MI	108	99	99	100	100	100	100	100
	- Jenjang SMP/MTs	84	85	86	88	88	89	90	90
	- Jenjang SMA/SMK/MA	40	41	41	42	43	44	45	45
2. Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi/1000 KH	10,5	10,45	10,4	10,3	10,2	10,1	10	10
2.2	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,8	72,9	73	73,1	73,3	73,4	73,5	> 73
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,2	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,13	1,13
III. Seni Budaya dan Olahraga									
1. Kebudayaan									
1.1	Jumlah grup kesenian	245	245	252	265	278	281	295	295



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.2	Jumlah gedung	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah klub olahraga	616	623	646	678	711	746	783	783
2.2	Jumlah sarana/gedung olahraga	444	444	444	444	444	444	444	444

Tabel 9.3

**Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar
pada Aspek Layanan Umum**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I.	Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan								
1.1	Pendidikan dasar:								
a.	SD/MI								
a.1	Angka partisipasi sekolah (%)	96	96	97	97	98	98	98	98
a.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:180	1:180	1:180	1:180	1:179	1:179	1:175	1:175
a.3	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:16	1:16	1:17	1:18	1:19	1:20	1:20
a.4	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%)	82	83	85	87	89	92	95	95
a.5	Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%)	73	74	75	77	80	82	85	85
b.	SMP/MTs								
b.1	Angka partisipasi sekolah (%)	75	77	77	79	80	81	81	81
b.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:275	1:274	1:274	1:273	1:270	1:269	1:268	1:268
b.3	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:15	1:16	1:16	1:17	1:18	1:19	1:19



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
b.4	Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%)	78	79	80	82	83	85	87	87
b.5	Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat (%)	80	82	83	85	87	90	92	95
1.2	Fasilitas Pendidikan								
1.2.1	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90	89	90	91	92	93	95	95
1.2.2	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92	93	93	94	96	97	98	98
1.3	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99	99	99	99	100	100	100	100
1.4	Angka Putus Sekolah (APS)								
	- APS Jenjang SD/MI	0	0	0	0	0	0	0	0
	- APS Jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan (AL)								
1.5.1	AL Jenjang SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.2	AL Jenjang SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91	92	94	96	96	96	98	98
1.5.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	61	62	63	65	66	66	67	67
2.	Kesehatan								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	1:61	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55	1:55
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:10.908	1:10.800	1:10.700	1:10.600	1:10.500	1:10.400	1:10.300	1:10.300
2.3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1:1.517	1:1.500	1:1.500	1:1.500	1:1.500	1:1.500	1:1.500	1:1.500
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	1:10.000	1:6.899	1:6.800	1:6.500	1:6.000	1:5.500	1:5.000	1:5.000
2.5	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	1:1.853	1:1.853	1:1.800	1:1.500	1:1.300	1:1.200	1:1.100	1:1.100
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80	90	91	93	95	97	98	98
2.7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	99,95	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan Desa UCI (%)	92,34	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	32	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	9,77	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	91,69	92	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5
2.14	Cakupan Puskesmas	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
2.15	Cakupan Pustu	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
3.	Pekerjaan Umum dan penataan ruang								
3.1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65	66	67	69	71	73	75	75
3.2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	7,00	7,1	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,5
3.3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	525,64 km	553 km	581 km	643 km	711 km	789 km	882 km	882 km
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	70 km	75 km	80 km	91 km	103 km	116 km	131 km	131 km
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km	120 km
3.6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	50 km	55 km	60 km	71 km	83 km	96 km	111 km	111 km
3.7	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	28 buah	28 buah	29 buah	30 buah	31 buah	32 buah	33 buah	33 buah
3.8	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	18.000 Ha	18.250 Ha	18.500 Ha	19.000 Ha	19.500 Ha	20.000 Ha	21.000 Ha	21.000 Ha
3.9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	1,06	1,08	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman								



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	326.337	330.665	334.991	338.713	342.435	346.158	349.880	349.880
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	68%	69%	70%	72%	74%	77%	80%	80%
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	241.938	243.147	244.357	246.800	249.268	257.761	254.279	254.279
4.4	Kawasan kumuh (%)	1,90	1,85	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	1,40
4.5	Rumah layak huni	301.429	302.936	304.443	307.487	310.562	313.668	316.800	316.800
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat								
5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	4	4	4	4	4	4	4
5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	5	2	4	5	5	5	3	3
5.3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,6 (69 org)	2 (250 org)	2 (250 org)	2 (250 org)	2 (250 org)	2 (250 org)	2 (250 org)	2 (250 org)
5.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	71 ,23 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)	71 (8.159 org)
5.5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,31	1Pos/RT	1Pos/RT	1Pos /RT	1Pos/RT	1Pos/RT	1Pos/RT	1Pos /RT
5.6	Penegakan PERDA (%)	97,78	95	95	95	95	95	100	100
5.7	Cakupan patroli petugas Satpol PP (X/Hari)	2x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x
5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	97,78	95	95	95	95	95	100	100
5.9	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
5.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	45	40	40	35	30	25	20	45
5.12	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	70	73	75	80	85	90	95	95
6.	Sosial								



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	24	24	24	24 PA	24	24 PA	24	24
6.2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	12,02	80	80	80	80	80	80	80
6.3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	10,58	21,59	80	80	80	80	80	80
7.	Tenaga Kerja								
7.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (yang dilaporkandandiselesaikan)	22	20	18	16	14	12	10	10
7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,57	67,91	68,25	68,59	68,93	69,27	69,62	69,62
7.4	Pencari kerja yang ditempatkan	72,63	72,8	73	73,3	73,8	74	74,5	74,5
7.5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,7	2,7
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	85,64	85,8	86	87	88	89	90	90
8.2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	14,36	16	18	20	22	24	26	26
8.3	Persentase KDRT (%)	14	19	21	21	20	19	18	18
8.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur	1,66	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,35	< 1,5%
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,74	54	56	61	66	71	76	76
8.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	91	91	92	92	93	93	93	93
9.	Pangan								
9.1	Regulasi ketahanan pangan	0	0	1	1	1	1	1	5
9.2	Ketersediaan pangan utama (%)	50,7	995	1.042	1.092	1.141	1.191	1.240	1.240
10.	Pertanahan								
10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	40,41	40,6	41	42	43	44	45	45



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10.2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	Meningkat						
10.3	Penyelesaian izin lokasi (%)	50	53	55	60	65	70	75	75
11.	Lingkungan Hidup								
11.1	Persentase penanganan sampah (%)	32,73	33,8	35	40	45	50	55	55
11.2	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	72	74	75	78	81	84	87	90
11.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	6,13	6,3	6,5	7	7,5	8	8,5	8,5
11.4	Pencemaran Status Mutu Air (%)	3,70	4	4	4,5	5	5	5	5
11.5	Persentase Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Indeks Kualitas Air	70	70,1	70,2	70,4	70,6	70,8	71	71
11.7	Indeks Kualitas Udara	94,99	95,1	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96
11.8	Indeks Tutupan Lahan	42,02	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
12.1	Persentase Kepemilikan KTP (%)	81	84	85	86	87	88	89	89
12.2	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	48	50	51	52	53	54	55	55
12.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
13.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7	7	7	8	8	9	9	9
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9	9	9	9	9	9	9	9
13.3	Jumlah LSM	22	22	24	26	29	31	34	34
13.4	LPM Berprestasi	-	2	6	12	18	24	32	32
13.5	PKK aktif	271	271	271	271	271	271	271	271
13.6	Posyandu aktif	1.464	1.468	1.472	1.475	1.479	1.483	1.488	1.488
13.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta)	2.963,1	3.035	3.111,3	3.266,8	3.430,2	3.601,7	3.781,8	3.781,8
13.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Juta)	335,1	343	351,8	369,4	387,9	407,3	427,7	427,7
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2
14.2	Rasio akseptor KB	11	16	17	18	19	22	25	25
14.3	Cakupan peserta KB aktif (%)	74	70	70	71	71	73	74	74
14.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	35%	34%	34%	32%	32%	30%	25%	25%
15.	Perhubungan								
15.1	Jumlah penumpang angkutan umum	77.118	75.190	73.262	69.600	66.121	60.815	59.675	59.675
15.2	Rasio ijin trayek	0,003	0,0028	0,0027	0,0027	0,0026	0,0025	0,0024	0,0024
15.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.910	5.170	5.426	5.698	5.983	6.282	6.596	6.596
15.4	Jumlah angkutan laut/udara/terminal	4	4	4	4	4	4	4	4
15.5	Jumlah Angkutan Darat	14.494	15.264	16.020	16.821	17.662	18.545	19.472	19.472
15.6	Jumlah Kepemilikan KIR angkutan umum	3.210	3.370	3.548	3.725	3.912	4.107	4.313	4.313
15.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	60	60	60	60	60	60	60	60
15.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg
15.9	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	36,18%	42,22%	48,26%	54,30%	60,35%	66,39%	72,43%	72,43%
16.	Komunikasi dan Informatika								
16.1	Jumlah Jaringan Komunikasi	7	7	7	7	7	7	7	7
16.2	Rasio wartel/warnet Terhadap Penduduk	0,038	0,040	0,042	0,043	0,045	0,046	0,048	0,048
16.3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	10	11	11	16	21	26	31	31
16.4	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	28	28	28	28	28	28	28	28
16.5	Website Milik Pemerintah Daerah	59	62	64	69	74	79	84	84
16.6	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
17.1	Persentase Koperasi aktif	40%	50%	65%	75%	80%	85%	90%	90%
17.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	254.187	254.287	254.387	254.487	254.587	254.687	254.787	254.787



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	254.187	254.287	254.387	254.487	254.587	254.687	254.787	254.787
18.	Penanaman Modal								
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	1	2	2	3	3	3
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	7.397,352	7.755,560	7.755,560	7.755,600	7.755,650	7.755,700	7.755,750	7.755,750
18.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:660	1:680	1:700	1:740	1:780	1:820	1:840	1:840
18.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0	1	1	1,5	2	2,5	3	3
18.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (milyar rupiah)	7.754,55	7.754,56	7.754,58	7.754,6	7.754,65	7.754,7	7.754,75	7.754,75
19.	Kepemudaan dan Olahraga								
19.1	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27	27	27	27	27	27
19.2	Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	28	28	29	29	29	29	29	29
19.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	4	4	4	5	5	6	6
19.4	Jumlah kegiatan olahraga	5	5	6	6	6	6	6	6
19.5	Lapangan olahraga	444	444	444	444	444	444	444	444
20.	Statistik								
20.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada							
20.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada							
21.	Persandian								
22.	Kebudayaan								
22.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)	55	59	65	67	69	71	73	73
22.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	16	16	16	16	16	16	16	16
22.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36	36	36	36	36	36	36	36
23.	Perpustakaan								
23.1	Jumlah perpustakaan	567	567	567	567	567	567	567	567
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	11.000	11.000	22.816	22.816	22.816	22.816	22.816	125.080



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	26.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32.120
24.	Kearsipan								
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	0	11	19,8	39,6	59,7	79,8	100	100
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	66
II.	Pelayanan Urusan Pilihan								
1.	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi Perikanan (%)	104,5	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	0	0	23,91	32,61	40,91	50	56,82	56,82
1.3	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	13,08	11,77	10,11	9,09	8,17	7,83	7,5	7,5
1.4	Peningkatan Produksi benih ikan (juta ekor)	225,84	19,14	22,18	34,48	47,40	60,96	75,20	301,05
2.	Pariwisata								
2.1	Kunjungan wisata	1.560.015	1.638.016	1.723.193	1.817.768	1.921.592	2.036.888	2.163.175	2.163.175
3.	Pertanian								
3.1	Produktivitas tanaman pangan (Kuintal per hektar)								
	Padi sawah	63,41	64,35	65,31	67,27	69,29	71,37	73,51	73,51
	Padi ladang	52,54	53,33	54,12	55,74	57,41	59,13	60,91	60,91
3.2	Produksi tanaman pangan (Ton)								
	Padi sawah	323.549	328.400	333.255	343.253	353.550	364.157	375.082	375.082
	Padi ladang	28,02	28,43	28,86	29,72	30,61	31,54	32,48	32,48
3.3	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	8,75*)	8,80	8,85	8,90	8,95	9,01	9,50	≥ 9,50
3.4	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	13,14*)	13,27	13,40	13,54	13,67	13,81	13,95	> 13,5
3.5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	35,89*)	35,76	35,63	35,56	35,43	35,32	35,21	> 35
3.6	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	4,62*)	4,57	4,47	4,42	4,33	4,28	4,23	> 4
3.7	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.8	Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	0,07	0,12	0,17	0,27	0,37	0,47	0,57	0,57
3.9	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	2,18	2,3	2,54	2,6	2,67	2,73	2,79	2,79
3.10	Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan (%)	1,01	0,5	0,57	1,14	1,71	2,28	2,86	2,86
4.	Kehutanan								
4.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	405	100	100	110	120	130	140	140
4.2	Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	63,9	61,5	58,9	53,9	48,9	43,9	38,9	38,9
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
6.	Perdagangan								
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,01*)	17,08	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	>19
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta)	936	1.000	1.050	1.060	1.070	1.080	1.140	1.140
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1.674	50	84	90	91	97	102	2.188
7.	Perindustrian								
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	12,86*)	12,96	13,36	13,86	14,36	14,86	15,36	>15
7.3	Pertumbuhan Industri	18.868	19.100 (1,23%)	19.400 (1,57%)	19.800 (2,06%)	20.250 (2,27%)	20.700 (2,22%)	21.200 (2,42%)	21.200
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	900	100	100	100	125	125	150	1.500
8.	Ketransmigrasian								
8.1	Transmigran yang diberangkatkan (KK)	14	13	20	20	25	25	25	128



Tabel 9.4
Indikator Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Blitar
pada Aspek Daya Saing Daerah

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Kemampuan Ekonomi									
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	647.182	>700.000	>750.000	>800.000	>850.000	>900.000	>950.000	>950.000
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	318.460	>350.000	>350.000	>400.000	>400.000	>450.000	>500.000	>500.000
1.3.									
II. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
2.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,63	2,49	2,31	2,14	1,98	1,71	1,6	1,6
2.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	77.118	75.762	73.262	69.600	66.121	60.815	59.675	59.675
2.3.	Jumlah orang/barang melalui terminal	77.118	75.762	73.262	69.600	66.121	60.815	59.675	59.675
2.4.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Luas wilayah produktif (%)	7,56	7,56	7,559	7,558	7,557	7,552	7,247	7,247
2.6.	Luas wilayah industri (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Luas wilayah kebanjiran (%)	0,344	0,357	0,37	0,366	0,365	0,362	0,361	0,361
2.8.	Luas wilayah kekeringan (%)	1,099	1,099	1,098	1,098	1,097	1,097	1,096	1,096
2.9.	Luas wilayah perkotaan (%)	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177
2.10.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)	8 hotel, 2 penginapan (Melati Non Bintang)
2.11.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	70%	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%
III. Iklim Berinvestasi									



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.1	Persentase Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Jumlah demo	16	15	15	14	13	12	10	10
3.3	Lama proses perijinan (hari)	3	3	3	2	2	2	1	1
3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	44	40	40	40	40	40	40	40
3.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	2	2	3	3	4	4	4
3.6	Jumlah Desa Tertinggal	50	45	36	26	16	8	0	0
IV.	Sumber Daya Manusia								
4.1	Lulusan S1/S2/S3 (%)	1,83	3,1	4,4	5,7	7	8,3	9,6	> 9
4.2	Rasio ketergantungan	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	≤0,46



BAB **PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Blitar dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Blitar dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Tahun 2022 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Selanjutnya RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 kepada masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017 sampai dengan 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.



4. Seluruh SKPD melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dan Renstra SKPD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD.
6. Bupati Blitar wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
7. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Tentang RPJMD.
8. Masyarakat dapat melaporkan program yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

10.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2015 bahwa Pemerintah



- berperan memberikan Fasilitasi untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten; dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan Perusahaan.
- 3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

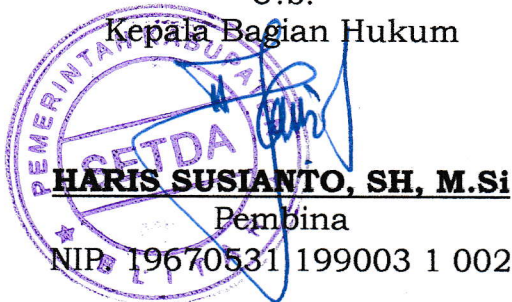
BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
Asisten Pemerintahan dan Kesra
U.b.

Kepala Bagian Hukum



HARIS SUSIANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002